



Modul

Pendidikan Kependudukan Bagi Aparatur Sipil Negara Berkarakter Kebangsaan



MODUL

PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERKARAKTER KEBANGSAAN

DIREKTORAT KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
JAKARTA, 2017

Perpustakaan Nasional R.I. : Data Katalog Dalam Terbitan (KTD)

**MODUL PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA BERKARAKTER KEBANGSAAN**

Ukuran 21 x 15 cm

Cetakan Ke-1 Tahun 2017

ISBN: 978-602-316-111-9

Diterbitkan oleh : Direktorat Kerjasama Pendidikan
Kependudukan BKKBN

PenanggungJawab : H. Nofrijal, S.P., MA
Plt. Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN

Penulis : 1. Dr. H.A. Rahmat Rosyadi, SH., MH.
2. Angela Sri Melani Winyarti, SE., MM.
3. Anindita Dyah Sekarpuri, S.Psi., MSR.

Editor : 1. Ahmad Taufik
2. Drs. Abdullah
3. Sofyan Zakaria
4. Rose Amelia
5. Ade Isyanah
6. Tim DITPENDUK

Modul ini dapat diunduh di <https://cis.bkkbn.go.id/dalduku> dan dapat diperbanyak pihak lain dengan seizin DITPENDUK, Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan, BKKBN

Telp. 021-8004929 EXT. 711, email: ditpenduk@bkkbn.go.id

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Modul Pendidikan Aparatur Sipil Negara Yang Berkarakter Kebangsaan merupakan salah satu modul jalur nonformal dapat diselesaikan dengan baik.

Pendidikan kependudukan merupakan upaya terencana dan sistematis untuk membantu pejabat/pegawai pemerintah dalam mengikuti Pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) agar memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran tentang kondisi kependudukan serta keterkaitan timbal balik antara perkembangan kependudukan yaitu kelahiran, kematian, perpindahan serta kualitas penduduk dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan, dan lingkungan hidup sehingga mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku yang berwawasan kependudukan.

Tersusunnya buku modul pendidikan kependudukan ini ditujukan sebagai salah satu bahan ajar dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, sehingga dapat membantu pejabat/pegawai pemerintah yang saat ini atau yang akan datang berperan sebagai pengambil kebijakan dan pelaksana program dibidangnya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada tim penulis dan pihak-pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan kependudukan Indonesia dimasa yang akan datang.

Jakarta, 22 Desember 2017

Direktur Kerjasama

Pendidikan Kependudukan,



Ahmad Taufik

KATA SAMBUTAN



Sesuai Peraturan Kepala BKKBN nomor 72/PER/B5/2011 tentang organisasi dan tata kerja BKKBN, dan salah satunya dibentuk Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan yang bernaung dibawah Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk. Salah satu tugas dari Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan adalah meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku pejabat/pegawai pemerintah tentang pembangunan berwawasan

kependudukan.

Isu kependudukan merupakan hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat luas. Saat ini Indonesia menghadapi sedikitnya lima isu kependudukan. Pertama, jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 237.641.326 jiwa (sensus 2010) sedangkan pertumbuhan penduduk Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan membuat masalah kependudukan semakin kompleks. Kedua, penduduk remaja dan orang muda. Penduduk muda banyak bertempat tinggal di perkotaan (umur 15-19 tahun) mengalami peningkatan 10,6 juta jiwa, sedangkan kaum muda yang tinggal dipedesaan terjadi penurunan atau konstan. Kaum muda merupakan kelompok penduduk yang dipersiapkan menjadi pelaksana pembangunan, namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi kaum muda antara lain tingginya angka putus sekolah (IPM pada posisi ke-69 dari 127 negara), lebih dari 40 persen orang muda diperkotaan dan dipedesaan (<15 tahun) sudah berpartisipasi secara aktif masuk kedalam pangsa kerja, buruknya lingkungan sekolah atau kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung sehingga menyebabkan kaum muda melakukan drop-out sekolah yang kemudian menjadi pengangguran, pergaulan sesama remaja yang sebaya yang berdampak negative (hubungan seksual pranikah, perkawinan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan serta narkoba). Ketiga, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sampai dengan tahun 2030 sangat besar dan merupakan

potensi pembangunan hanya jika dikelola dengan baik. Keempat, meningkatkan penduduk lanjut usia (> 64 tahun) setelah tahun 2030. Peningkatan proporsi dan jumlah penduduk lanjut usia pasca periode merupakan peluang demografi yang perlu direspon secara tepat dan cepat untuk menghindari persoalan yang sangat serius. Bahwa penduduk lansia memiliki pengaruh besar dalam pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Kelima, Lingkungan dan penduduk merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi. Setiap penduduk sesungguhnya bisa menjadi pelaku dalam menjaga pencemaran dan kerusakan lingkungan sekitarnya. Ketidakseimbangan antara lingkungan dan jumlah penduduk dapat berdampak negatif bagi keduanya. Begitupun juga jika penduduk yang berlebih dapat menggerus lingkungan sekitarnya.

Penduduk adalah pusat pembangunan yang merupakan pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan. Prasyarat dalam People Center Development adalah penduduk yang berkualitas. Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, maka perlu dilakukan literasi kependudukan kepada pejabat/pegawai pemerintah melalui jalur pendidikan nonformal. Pendidikan kependudukan melalui jalur nonformal dilaksanakan pada DIKLAT yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Pada tahun 2017 Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan menerbitkan modul sebagai bahan ajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta dalam mempelajari ilmu kependudukan.

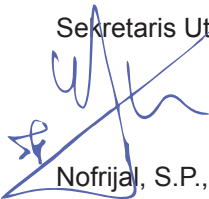
Pendidikan kependudukan bukan hanya sekedar ilmu, namun masalah kependudukan adalah masalah sikap dan perilaku yang berawal dari individu, generasi muda, keluarga dan masyarakat. Keberhasilan pendidikan kependudukan pada jalur nonformal akan berdampak pada meningkatnya pengetahuan, pemahaman serta

kesadaran para pejabat/pegawai pemerintah yang masa akan datang berperan sebagai pengambil kebijakan dan keputusan dalam mengatasi persoalan kependudukan dilingkungannya.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Modul Pendidikan Kependudukan Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Berkarakter Kebangsaan ini, saya sampaikan ucapan terima kasih. Akhirnya modul ini dapat memberikan manfaat bagi semua Aparatur Sipil Negara dalam membuat kebijakan dibidangnya untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Jakarta, 22 Desember 2017

Sekretaris Utama,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned over the printed name.

Nofrijal, S.P., MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KATA SAMBUTAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

MATERI 1 DASAR-DASAR KEPENDUDUKAN.....	3
A. Pendahuluan.....	4
B. Sejarah dan Perkembangan Demografi.....	4
C. Fertilitas	13
D. Mortalitas	21
E. Migrasi	27
F. Umur Harapan Hidup	28
G. Data Kependudukan	29
H. Manfaat Data Kependudukan	32
I. Rangkuman.....	36
J. Pendalaman Materi 1 Dasar-Dasar Kependudukan	40
K. Kunci Jawaban Materi 1 Dasar-Dasar Kependudukan	44

MATERI 2 LIMA ISU KEPENDUDUKAN.....	47
A. Pendahuluan.....	49
B. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia	49
C. Penduduk Remaja dan Orang Muda	51
D. Penduduk Usia Produktif	62
E. Penduduk Lanjut Usia	67
F. Lingkungan Ramah Penduduk.....	76
G. Rangkuman.....	88
H. Pendalaman Materi 2 Lima Isu Kependudukan	90
I. Kunci Jawaban Materi 2 Lima Isu Kependudukan	93

MATERI 3 PENDUDUK BERKARAKTER	
KEBANGSAAN.....	95
A. Pendahuluan.....	97
B. Konsep Revolusi Mental	97
C. Revolusi Mental Berbasis Pancasila.....	107
D. Prioritas Revolusi Mental	116
E. Kewarganegaraan dan Bela Negara.....	120
F. Rangkuman.....	125
G. Pendalaman Materi 3 Penduduk Berkarakter Kebangsaan.....	127
H. Kunci Jawaban Materi 3 Penduduk Berkarakter Kebangsaan.....	130
 MATERI 4 ISU KEPENDUDUKAN MASYARAKAT	
EKONOMI ASEAN.....	133
A. Pendahuluan.....	135
B. Terbentuknya ASEAN	135
C. Perjanjian Kerjasama ASEAN.....	136
D. Batasan MEA	138
E. Ciri-ciri dan Unsur MEA.....	140
F. Menghadapi Isu Kependudukan MEA.....	142
G. Rangkuman.....	144
H. Pendalaman Materi 4 Isu Kependudukan MEA	146
I. Kunci Jawaban Materi 4 Isu Kependudukan MEA	147
 STUDI KASUS PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN	149
DAFTAR PUSTAKA.....	155
RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT (RBPMD)	

SUBBAHASAN
PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA BERKARAKTER KEBANGSAAN

1

DASAR-DASAR KEPENDUDUKAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kependudukan ini peserta diklat dapat dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan kembali materi DASAR-DASAR KEPENDUDUKAN yang meliputi: (1) Perkembangan Teori Demografi; (2) Kebijakan Kependudukan; (3) Fertilitas; (4) Mortalitas; (5) Migrasi; (6) Umur Harapan Hidup; dan (7) Data Kependudukan.

A. Pendahuluan

Kata Demografi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk dan "*grafein*" yang artinya menggambar atau menulis. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan sebagai Tulisan-tulisan, atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Istilah ini pertama kali dipakai oleh Achille Guillard pada tahun 1855 dalam karyanya yang berjudul "*Elements de Statique Humaine, ou Demographie Comparee*" atau *Elements of Human Statistics or Comparative Demography*.

Pengertian tentang demografi berkembang seiring dengan perkembangan keadaan penduduk serta penggunaan statistik kependudukan yang dialami oleh para penulis kependudukan pada zamannya.

Berikut beberapa contoh tentang perkembangan pengertian demografi. Menurut Donald J. Bogue (1973), bahwa Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistic dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya lima komponen demografi yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.

Johan Sussmilch, 1762 (dalam Iskandar, 1994) berpendapat bahwa demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. David V. Glass (1953) menekankan bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.

Sedangkan menurut United Nations (1958) dan International Union for the *Scientific Study of Population*/IUSSP (1982) mendefinisikan demografi sebagai studi ilmiah masalah pendudukan yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Masalah demografi

lebih ditekankan pada studi kuantitatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendudukan, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Ketiga faktor ini biasanya disebut sebagai *variable demografi* atau komponen pertumbuhan pendudukan. Ketiga *variable demografi* tersebut ditambah dengan faktor lain seperti perkawinan, perceraian, dan mobilitas sosial (perubahan status sosial) akan menentukan struktur atau komposisi penduduk.

Phillip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan berpendapat bahwa demografi merupakan ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran territorial, komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut. George W. Barclay (1970) mendefinisikan demografi sebagai ilmu yang memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk. Demografi mempelajari perilaku penduduk secara menyeluruh bukan perorangan.

Dengan mengacu pada beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ilmu demografi* merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi/strukturnya.

Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi, yang pada gilirannya menyebabkan perubahan pada jumlah, struktur, dan persebaran penduduk. Demografi memberikan gambaran menyeluruh tentang perilaku penduduk, baik secara agregat maupun kelompok.

B. Sejarah dan Perkembangan Demografi

1. Perkembangan Teori Demografi

Dalam sejarah menunjukkan upaya-upaya untuk pencatatan statistik kependudukan sudah dilakukan sejak berabad-abad yang

lalu, meskipun sudah dilakukan dalam ruang lingkup yang kecil dan digunakan secara terbatas. Seperti John Graunt (1620-1674), seorang warga negara Inggris, dikenal sebagai pelopor dalam bidang pencatatan statistik penduduk. Bukunya yang berjudul *Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index and Made Upon the Bills of Mortality* (Graunt, 1662 dalam Iskandar, 1994).

John Graunt melakukan Analisis data kelahiran dan kematian yang diperoleh dari catatan kematian (*bills of mortality*) yang setiap minggu diterbitkan oleh petugas Gereja, sebagian besar berisi analisis mortalitas dan selebihnya mengenai fertilitas, migrasi, perumahan, data keluarga, perbedaan antara kota dan negara, dan jumlah penduduk laki-laki yang berada pada kelompok umur militer. Data yang digunakan dalam analisis kematian dan kelahiran tersebut bersumber dari catatan kematian (*The Bills of Mortality*) yang diterbitkan secara berkala oleh petugas gereja setiap minggu. Dari hasil penelitiannya itu, Graunt mencetuskan “hukum-hukum” pertumbuhan penduduk.

Graunt menyarankan agar penelitian yang menyangkut penduduk lebih menekankan aspek komposisi penduduk menurut jenis kelamin, negara, umur, agama dan sebagainya. Keistimewaan dari pendekatan yang dipergunakan oleh Graunt adalah kehati-hatiannya dan kekritisannya dalam pengumpulan data. Apabila informasi yang ada dirasakan terlalu sedikit, maka Graunt mengambil sampel untuk melakukan estimasi. Ia melakukan penelitian empiris terhadap jumlah dan perkembangan penduduk London pada masa itu. Dari usaha Graunt dalam bidang kependudukan yang mencakup topik-topik yang menarik, dapat dikatakan bahwa ilmu demografi lahir pada zamannya. Oleh karena itu Graunt dikenal pula sebagai “Bapak Demografi”.

Dalam studinya, Graunt memperoleh banyak dorongan dari William Petty, seorang ahli statistik. Karya Petty, *Political Arithmetic* (1690), berpengaruh besar terhadap perkembangan demografi. William Petty (1623-1687) yang hidup sezaman dengan Graunt menganjurkan berdirinya *Central Statistical Office* (Biro Pusat Statistik). Selain itu,

usaha memanfaatkan data statistik penduduk dilakukan pula oleh Edmund Halley (1656-1742), seorang Astronom, dengan menyusun tabel kematian (*life table*) modern yang pertama di kota Breslau pada tahun 1687-1691.

Setelah era Graunt, perhatian publik terhadap masalah kependudukan, baik mengenai pencatatan statistik maupun pertumbuhannya terus meningkat. Dalam sejarah perkembangan ilmu demografi, timbul masalah mengenai pembagian cabang ilmu ini. Awalnya, para pengamat berpendapat bahwa demografi lebih berfokus pada penyusunan statistik penduduk dan analisisnya. Pendapat ini memang dapat dimengerti karena pelopor-pelopor ilmu demografi, seperti Susmilch dan Guillard menganggap demografi sebagai bio-social book-keeping, yang artinya kelahiran sebagai faktor penambah jumlah penduduk, sedangkan kematian sebagai faktor pengurang jumlah penduduk.

Dalam sejarah perkembangannya beberapa pengamat membedakan masalah penduduk menjadi dua bagian yaitu yang bersifat kuantitatif yang membahas tentang jumlah, persebaran, serta komposisi penduduk, dan yang bersifat kualitatif membahas masalah penduduk dari segi genetis dan biologis. Gagasan ini kurang mendapat dukungan karena ternyata keduanya mengandung unsur kualitatif dan kuantitatif.

Oleh karena itu walaupun demografi menggunakan banyak hitungan tapi dapat juga bersifat kualitatif. Dengan demikian memberikan kesan kepada orang bahwa demografi hanyalah penyusunan statistik penduduk. Ini memang bisa dimengerti oleh karena pelopor-pelopor ilmu seperti: Susmilch, Guillard, Wolfe menganggap demografi sebagai semacam "Tata Buku Bio Sosial" atau *Bio-Social Bookkeeping*. Jadi memang pengumpulan angka-angka itu penting, tetapi angka-angka tersebut harus dinyatakan hubungan-hubungannya, setelah itu baru bisa dinamakan ilmu demografi.

Pada tahun 1973 dilaksanakan Kongres di Paris selama Kongres Masalah Kependudukan dilangsungkan, Adolphe Landry telah membuktikan secara matematika adanya hubungan antara unsur - unsur demografi seperti kelahiran, kematian, fertilitas, jenis kelamin, umur dan sebagainya. Ia menyarankan istilah *PURE DEMOGRAPHY* untuk cabang ilmu demografi yang bersifat analitik-matematika dan berbeda dari ilmu demografi yang bersifat deskriptif. Karya ini mendapat sambutan positif.

Demografi Murni (*Pure Demography*) atau juga disebut demografi formal menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data kependudukan. Dengan teknik-teknik tersebut dapat diperoleh perkiraan keadaan penduduk di masa depan atau di masa lampau.

Model-model formal sering kelihatan menakjubkan dan mempunyai kegunaan yang besar, tetapi mereka jarang menyajikan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan social tentang "MENGAPA" bentuk atau proses yang ada itu terjadi. Untuk memberikan keterangan "MENGAPA" tersebut diperlukan suatu ilmu lain yang biasa disebut dengan *Sociological Demography, Population Studies, Social Demography, Demographic Sociology*, atau *Kependudukan*. Ilmu ini merupakan penghubung antara penduduk dan system sosial, dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar: bagaimana kita menambah pengertian kita terhadap masyarakat melalui proses analisis kependudukan.

Data demografi, pengukuran, teknik-teknik, dan model-model adalah alat yang penting, tetapi mereka hanya sebagian dari gambaran analitik. Jadi determinan-determinan dan konsekuensi-konsekuensi dari pertambahan penduduk harus dianalisis pula. Dengan mengenal proses sosial dimana terjadi perubahan penduduk diharapkan para ahli demografi lebih mengerti dinamikanya penduduk.

Sekarang orang lebih menyadari bahwa demografi tidak dipelajari secara murni terlepas dari variable-variabel non-demografis, misalnya ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, dan sebagainya.

Juga bukan lagi merupakan *single theoretical discipline*, tetapi lebih menyerupai *interdisciplinary science*.

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk, secara terus-menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang terjadi pada semua golongan umur. Sementara itu migrasi juga berperan: 'imigran' (pendatang) akan menambah dan 'emigran' akan mengurangi jumlah penduduk.

Dapat disimpulkan bahwa *pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 4 komponen, yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), in-migration (migrasi masuk) dan out migration (migrasi keluar)*. Selisih antara inmigration dan out migration disebut net migration atau migrasi neto. Jadi pertumbuhan penduduk hanya dipengaruhi oleh 2 cara, yaitu: melalui perubahan reproduksi atau migrasi neto.

Pertumbuhan penduduk tersebut dapat dinyatakan dengan formula sebagai berikut:

$$P_t = P_o + (B - D) + (M_i - M_o)$$

Dimana :

- P_o : jumlah penduduk pada waktu terdahulu (tahun dasar)
- P_t : jumlah penduduk pada waktu sesudahnya
- B : kelahiran yang terjadi pada jangka waktu antara kedua kejadian tersebut.
- D : jumlah kematian yang terjadi pada jangka waktu antara kedua kejadian tersebut.
- M_o : migrasi keluar pada jangka waktu antara kedua kejadian.
- M_i : migrasi masuk pada jangka waktu antara kedua kejadian.

Apabila proses pertumbuhan penduduk beserta komponen-komponennya digambarkan pada suatu model maka akan berbentuk demikian:

Model Pertumbuhan Penduduk

	Migrasi		
	Positif	Negatif	Nol
$M > F$	N, T, S	T	T
$M < F$	N	N, T, S	N
$M = F$	N	T	S

Keterangan:

M : Mortalitas (Kematian)

F : Fertilitas (Kelahiran)

N : Naik

T : Turun

S : Stabil

Dari model ini maka dapat dilihat secara jelas bagaimana pengaruh masing-masing komponen demografi terhadap pertumbuhan penduduk.

2. Studi Kependudukan

Dari Malthus ke Neo-Malthusian. Tentang Teori Kependudukan mengatakan bahwa: (1) hubungan antara penduduk dan keterbatasan sumber alam/pangan (penduduk optimum); dan (2) hubungan antara penduduk dan lingkungan (*carrying capacity*/daya dukung)

Thomas Robert Malthus. Tentang Teori Kelebihan Penduduk (*over population theory*): Mengembangkan pemikiran yang sudah dikembangkan oleh ayahnya, Daniel Malthus, mengenai hubungan antara penduduk dan pangan. Diterbitkan pertama kali sebagai *Essay on the Principle of Population* (1798).

Tiga proposisi besar T.R. Malthus, menyatakan bahwa: (1) Penduduk dibatasi oleh sumber-sumber subsistensi/pangan; (2) Penduduk dengan sendirinya akan meningkat kalau sumber-sumber subsistensi meningkat, kecuali kalau ada penghambat; dan (3) Penghambat tersebut, dan penghambat yang menekan kekuatan perkembangan penduduk, serta penahan dampaknya pada tingkat subsistensi, semuanya dapat dipecahkan melalui ketahanan moral, kejahatan, dan kesengsaraan.

Pendapat Malthus yang terkenal: kalau tidak ada halangan maka penduduk akan tumbuh menurut deret ukur sedangkan sumber-sumber pangan hanya akan berkembang menurut deret hitung. Pandangan Malthus: (1) Selama sumber-sumber subsistensi jauh melebihi kebutuhan penduduk maka penduduk akan berkembang cepat untuk mencapai keseimbangan dengan sumber-sumber subsistensi yang ada; dan (2) Kalau sumber-sumber subsistensi ditingkatkan maka penduduk dapat tumbuh lebih cepat lagi.

Kritik terhadap Malthus (Anti-Malthusian, Abad 19). Malthus tidak setuju undang-undang kemiskinan (*poor laws*) yang memberi bantuan kepada orang miskin. Malthus berpendapat bahwa bantuan kepada orang miskin sama dengan meningkatkan sumber-sumber subsistensi orang-orang miskin, yang karenanya akan terdorong untuk mempunyai anak lebih banyak.

Malthus berpendapat jika orang miskin tidak dibantu maka perilaku mereka akan berubah dan mereka akan mengurangi jumlah anak mereka. Karena ketidaksetujuannya terhadap *poor laws*, Malthus dikritik oleh dua kubu: (1) pertimbangan ekonomi: menekankan faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, pembagian pekerjaan dan upah; dan (2) pertimbangan demografi: terutama penemuan dan pemikiran mengenai perkembangan penduduk (*population trends*) dan fertilitas, yang berlawanan dengan proposisi klasik Malthus mengenai penduduk (terutama di Eropa). Kelompok Anti-Malthusian berpendapat bahwa masalah jumlah penduduk dapat diatasi dengan lebih efektif melalui upaya pencegahan kelahiran.

Mazhab Ekonomi Klasik (Abad 19). Pada akhir abad 19 terdapat asumsi-asumsi mazhab klasik mengenai teori pertumbuhan ekonomi dan penduduk makin dipertanyakan karena: (1) Fertilitas menunjukkan penurunan; (2) Emigrasi terjadi di beberapa negara Eropa (Irlandia terutama waktu terjadi potato famine); (3) Impor pangan terjadi kalau diperlukan; (4) Perkembangan teknologi; (5) Pengetahuan manusia dan kekayaan produktif makin meningkat; dan (6) Perubahan sosial yang melawan kecenderungan terhadap hasil yang makin berkurang (*diminishing returns*).

Marshall (1920): walaupun peranan alam dalam produksi menunjukkan hasil yang semakin berkurang, peranan manusia cenderung meningkatkan hasil atau hasil yang makin meningkat (*increasing returns*). Peningkatan hasil (volume produksi): (1) bersumber pada kecenderungan *external economies* (pasar yang tidak tertutup); dan (2) sebagian karena adanya *internal economies* (berbagai perubahan yang terjadi dalam sistem perekonomian dalam negeri)

Perekonomian berkembang karena: (1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) Peningkatan spesialisasi atau pembagian pekerjaan dan mesin-mesin; (3) Lokasi industri yang makin baik; (4) Perluasan (ukuran) industri/perusahaan; (5) Efisiensi dalam penggunaan bahan mentah; dan (6) Perbaikan komunikasi dan pemasaran.

Marshall berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk di Eropa masih berguna dalam jangka pendek dan tidak menyetujui pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara berkembang.

Mazhab Sosialis dan Marx serta Engels (Abad 19). Dialectic materialism, sistem filsafat Marx dan Engels, jika diterapkan terhadap perubahan sosial disebut *historical materialism*, sejarah manusia merupakan kontinum perjuangan antar kelas dimana sistem sosial sederhana digantikan dengan sistem sosial yang lebih maju (kompleks) seperti halnya dengan berkembangnya kaum borjuis menggantikan

golongan feodal maka kelompok proletar akan menggulingkan golongan feodal dalam sistem kapitalis.

Dalam konteks *historical materialism* Marx dan Engels tidak mengemukakan teori kependudukan secara khusus. Marx berpendapat tidak ada hukum universal mengenai penduduk. Penduduk lebih banyak ditentukan oleh keadaan sosial dan ekonomi yang berlaku di berbagai masyarakat. Masalah-masalah kependudukan, kesengsaraan/kemiskinan, dan kelebihan pekerja merupakan hasil-hasil dari sistem ekonomi kapitalis, dan akan dapat diselesaikan dengan mereorganisasi masyarakat.

Neo-Malthusian (Abad 19 dan abad 20). Neo-Malthusian berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat dibatasi dengan melakukan pembatasan kelahiran. *Malthus sendiri menentang pembatasan kelahiran.*

3. Kebijakan kependudukan di Indonesia

Orde Lama: Pronatalis. Presiden Soekarno pada tahun 1964 pernah berkata, "Bagi saya, penyelesaiannya ialah membuka tanah lebih luas lagi, sebab bila engkau membuka seluruh tanah di Indonesia, engkau dapat memberi makan 250 juta jiwa, dan saya hanya punya 103 juta jiwa ... Dalam negeriku, makin banyak (anak) makin baik."

Pembatasan kelahiran terutama penggunaan kontrasepsi bertentangan dengan moral bangsa. Indonesia dan hanya dapat disetujui jika dimaksudkan untuk mengatur kelahiran demi menjaga kesehatan ibu dan Ketidaksetujuan tokoh-tokoh agama.

Orde Baru: Anti-Natalis. Tahun 1967 Presiden Suharto menandatangani United Nations Declaration on Population bersama 29 pemimpin lain di dunia. Diawal Pemerintahan Presiden Suharto: Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana Nasional pada Oktober 1968 dan Pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1970. Dalam pidatonya tanggal 16 Agustus 1967

menyatakan: "*Indonesia harus benar-benar memperhatikan usaha pembatasan kelahiran*". Deklarasi mengakui penentuan jumlah dan jarak kelahiran anak sebagai hak dasar manusia.

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang meliputi: kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), migrasi masuk (*in-migration*) dan migrasi keluar (*out migration*). Selisih antara *inmigration* dan *out migration* disebut migrasi neto (*net migration*). Data demografi tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber data kependudukan, seperti sensus penduduk, registrasi vital, dan survei.

Data demografi tersebut selanjutnya diolah untuk menghasilkan ukuran-ukuran demografi yang dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Ukuran-ukuran demografi dikelompokkan menjadi angka absolut dan angka relatif. Angka absolut berkaitan dengan ukuran kohor, periode, dan prevalensi. Sedangkan angka relatif terdiri atas persentase, proporsi, angka, dan rasio.

C. Fertilitas

1. Pengertian

Fertilitas dalam istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fertilitas adalah penambahan jumlah anggota baru dari suatu penduduk disebabkan kelahiran. Jumlah kelahiran adalah banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan fertilitas yaitu:

- a. Lahir hidup (*Live Birth*) atau kelahiran hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan yang ditandai dengan adanya tanda-tanda kehidupan bayi saat dilahirkan seperti bernafas, denyut jantung atau gerakan lainnya.

- b. Lahir Mati (*still birth*) adalah kelahiran bayi dari kandungan yang berumur dari paling sedikit 20 minggu, tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas adalah masa reproduksi (*Childbearing Age*). Masa reproduksi adalah masa dimana wanita mampu melahirkan mulai saat *menarche* hingga memasuki masa *menopause* yang disebut usia subur (15 – 49 tahun). Ada tiga tahapan dalam proses reproduksi yaitu:

- a. Tahap hubungan kelamin
- b. Tahap konsepsi (*conception*)
- c. Tahap kehamilan (*gestation*).

Selain ketiga faktor tersebut terdapat faktor sosial, ekonomi dan budaya yang dapat mempengaruhi fertilitas sebagai faktor tidak langsung yang disebut “variabel antara”. Terdapat 11 variabel antara yaitu :

- a. Umur memulai hubungan kelamin;
- b. Akibat permanen/proporsi wanita yang tidak pernah melakukan hubungan kelamin;
- c. Lamanya status kawin;
- d. Abstinasi sukarela;
- e. Abstinensi terpaksa (sakit, berpisah sementara);
- f. Frekuensi sanggama;
- g. Pemakaian kontrasepsi;
- h. Fekunditas atau infekunditas yang disebabkan hal-hal yang tidak disengaja;
- i. Fekunditas atau infekunditas yang disebabkan hal-hal yang disengaja (misalnya sterilisasi);
- j. Mortalitas jenis karena disebabkan hal-hal yang tidak disengaja;
- k. Mortalitas jenis yang disebabkan hal-hal yang disengaja.

3. Ukuran Fertilitas

Beberapa ukuran fertilitas yang akan dibahas dalam materi pembelajaran ini yaitu: (1) *General Fertility Rate* (GFR); (2) *Age Specific Fertility Rate* (ASFR); *Crude Birth Rate* (CBR); (3) (4) *Total Fertility Rate* (TFR); (5) *Gross Reproduction Rate* (GRR); (6) *Net Reproduction Rate* (NRR); dan (7) *Child Women Ratio* (CWR).

a. Angka Fertilitas Umum/*General Fertility Rate* (GFR)

General Fertility Rate bisa juga disebut Angka Fertilitas Umum adalah jumlah anak yang dilahirkan setiap 1000 wanita usia subur (15–49 tahun) pada tahun tertentu. GFR dapat memberikan indikasi yang lebih jelas terhadap perubahan tingkah laku fertilitas.

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{GFR} = \frac{B}{P^f} \times k$$

Keterangan:

GFR = Angka Kelahiran Umum

B = Jumlah Kelahiran Hidup

P^f = Jumlah wanita usia reproduktif
(15–49 tahun)

K = Bilangan Konstanta, biasanya 1000

Contoh:

Misalnya di desa A pada tahun 2017 terjadi kelahiran 20 orang. Jumlah penduduk wanita usia 15-49 tahun sebanyak 1500 orang.

$$\text{GFR} = \frac{20}{1.500} \times 1.000 = 13,3$$

Ini berarti terdapat 13-14 kelahiran hidup per 1000 wanita usia 15–49 tahun di desa A pada tahun 2017.

b. Angka Fertilitas Kelompok Umur/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR)

Angka kelahiran rata-rata menurut kelompok umur atau *Age Specific Fertlity Rate* (ASFR) yaitu banyaknya kelahiran tiap 1000 wanita pada kelompok umur tertentu.

Cara perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$ASFR = \frac{B_i}{P_i^f} \times k$$

Keterangan:

ASFR = Angka Kelahiran menurut kelompok umur

i = Kelompok umur wanita usia ke i

Interval umur (i) bisa 5 tahunan atau 1 (satu) tahun, biasanya ditulis interval (15 – 19, 20 – 24, 25 – 29,.....,45 – 49).

B_i = Banyak kelahiran hidup di dalam kelompok umur selama satu tahun.

P_i^f = Banyaknya wanita kelompok umur i pada pertengahan tahun.

k = Bilangan Konstanta, yaitu 1000.

Contoh:

Banyaknya kelahiran dari 200 wanita kelompok umur 15 – 19 tahun adalah 3

$$\text{ASFR} = \frac{3}{200} \times 1000 = 15,00$$

Ini berarti bahwa secara rata-rata terdapat 15 kelahiran per 1000 wanita usia 15 – 19 tahun.

Banyaknya kelahiran dari 250 wanita kelompok umur 20 – 24 tahun adalah 6

$$\text{ASFR} = \frac{6}{250} \times 1000 = 24,00$$

Ini berarti bahwa secara rata-rata terdapat 24 kelahiran per 1000 wanita usia 20 – 24 tahun.

Banyaknya kelahiran dari 260 wanita kelompok umur 25 – 29 tahun adalah 8

$$\text{ASFR} = \frac{8}{260} \times 1000 = 30,77$$

Ini berarti bahwa secara rata-rata terdapat sekitar 31 kelahiran per 1000 wanita usia 25 – 29 tahun.

Banyaknya kelahiran dari 300 wanita kelompok umur 30 - 34 tahun adalah 2

$$\text{ASFR} = \frac{2}{300} \times 1000 = 6,67$$

Ini berarti bahwa secara rata-rata terdapat sekitar 7 kelahiran per 1000 wanita usia 30 – 34 tahun.

Banyaknya kelahiran dari 280 wanita kelompok umur 35 – 39 tahun adalah 1

$$\text{ASFR} = \frac{1}{280} \times 1000 = 3,57$$

Ini berarti bahwa secara rata-rata terdapat sekitar 4 kelahiran per 1000 wanita usia 35 – 39 tahun.

Banyaknya kelahiran dari 110 wanita kelompok umur 40 – 44 tahun adalah 0

$$\text{ASFR} = \frac{0}{110} \times 1000 = 0$$

Ini berarti bahwa tidak terdapat kelahiran per 1000 wanita usia 40 – 44 tahun.

Banyaknya kelahiran dari 100 wanita kelompok umur 45 – 49 tahun adalah 0

$$\text{ASFR} = \frac{0}{100} \times 1000 = 0$$

Ini berarti bahwa tidak terdapat kelahiran per 1000 wanita usia 45 – 49 tahun.

4. Angka Fertilitas Total/Total Fertility Rate (TFR)

Angka Fertilitas Total (TFR) adalah salah satu ukuran fertilitas yang sangat penting karena dapat menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dapat dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya dan dihitung dengan menjumlah ASFR, dengan catatan bahwa umur dinyatakan dalam satu tahun.

Jika umur dikelompokkan ke dalam 5 tahunan maka TFR dihitung sebagai berikut:

$$\text{TFR} = 5 \cdot \sum_{i=1}^7 \text{ASFR}_i$$

Keterangan:

ASFR = Angka Kelahiran menurut kelompok umur.

i = Kelompok umur 5 tahunan, dimulai dari 15-19 tahun.

7 = Jumlah / banyaknya kelompok umur

Contoh :

Perhitungan ASFR dan TFR di Desa A tahun 2017

Kelompok Umur Wanita	Penduduk Wanita	Kelahiran	ASFR
(1)	(2)	(3)	(4)
15 - 19	200	3	15
20 – 24	250	6	24
25 – 29	260	8	30,77
30 – 34	300	2	6,67
35 – 39	280	1	3,57
40 – 44	110	0	0
45 – 49	100	0	0

Sumber : Data Fiktif

Jadi TFR Desa tersebut

$$= 5 (15 + 24 + 30,77 + 6,67 + 3,57 + 0 + 0)$$

$$= 5 \times 80,01 = 400,05 \text{ per seribu wanita usia } 15 - 49 \text{ tahun}$$

Atau TFR = 0,4 untuk tiap wanita 15 – 49 tahun.

Ini berarti bahwa tiap wanita di Desa A pada tahun 2017 rata-rata mempunyai anak 0,4 orang di akhir masa reproduksi.

D. Mortalitas

1. Pengertian Mortalitas

Mati (*death*) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Keadaan mati selalu didahului dengan keadaan hidup. Lahir mati (*fetal Death*) adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Mortalitas atau kematian adalah pengurangan jumlah anggota dari suatu penduduk dikarenakan kematian.

2. Ukuran Mortalitas

Ukuran kematian merupakan suatu angka atau indeks yang dipakai sebagai dasar menentukan tinggi rendahnya tingkat mortalitas di suatu negara atau wilayah. Ukuran-ukuran dasar untuk mempelajari perubahan/berkurangnya penduduk antara lain:

a. Angka kematian kasar atau *Crude Death Rate* (CDR)

CDR (*Crude Death Rate*) atau Angka Kematian Kasar adalah jumlah kematian pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{CDR} = \frac{\text{Jumlah kematian pada thn tertentu}}{\text{Jumlah penduduk pertengahan thn tertentu}} \times 1000$$
$$\text{atau CDR} = \frac{D}{P} \times k$$

Keterangan :

D = Jumlah kematian pada tahun tertentu

P = Jumlah penduduk pertengahan tahun

k = Bilangan konstanta, yaitu 1000

Contoh :

Penduduk Desa B pada tanggal 1 Januari 2017 sebanyak 5500 orang dan pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebanyak 5600 orang. Apabila terdapat 15 kematian di desa tersebut selama tahun 2017, maka CDR di Desa A tersebut adalah :

$$5500 + 5600$$

$$\text{Penduduk pertengahan tahun} = \frac{\text{-----}}{2} = 5550$$

$$15$$

$$\text{CDR} = \frac{\text{-----}}{5550} \times 1000 = 2,70$$

Jadi rata – rata kematian di Desa B tersebut adalah sekitar 3 orang per 1000 penduduk pada tahun 2017.

- b. Angka kematian Menurut Umur atau *Age Specific Death Rate* (ASDR)

ASDR (*Age Spesific Death Rate*) atau Angka Kematian berdasarkan kelompok umur adalah jumlah kematian pada kelompok umur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada kelompok umur yang sama.

Perhitungannya :

$$\text{ASDR} = \frac{D_i}{P_i} \times k$$

Keterangan :

D_i = Kematian pada kelompok umur ke i

P_i = Penduduk pada kelompok umur ke i

K = Bilangan konstanta, yaitu 1000

Contoh :

Di Desa C pada tahun 2017 terdapat kematian pada kelompok umur 10 - 14 tahun sebanyak 2 orang. Jumlah penduduk pada kelompok umur 10 – 14 tahun = 2.500.

2

$$\text{ASDR (10 - 14)} = \frac{2}{2500} \times 1000 = 0,8$$

Ini berarti pada tahun 2017 di Desa C terjadi kematian sekitar 1 orang per 1000 penduduk usia 10 – 14 tahun.

- c. Angka kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR)

Infant Mortality Rate (IMR) menunjukkan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Angka Kematian Bayi atau IMR merupakan

indikator yang sangat baik untuk mengukur status kesehatan masyarakat pada suatu wilayah.

Perhitungan :

$$\text{IMR} = \frac{D}{B} \times K$$

Keterangan :

D = Kematian bayi usia di bawah 1 tahun pada tahun tertentu

B = Jumlah kelahiran hidup satu tahun tertentu

K = bilangan konstanta, yaitu 1000

Contoh :

Pada tahun 2017 di Desa D terdapat kematian bayi usia di bawah 1 tahun sebanyak 8 anak. Pada tahun yang sama jumlah kelahiran hidup 25 anak.

$$\text{IMR} = \frac{8}{25} \times 1000 = 32$$

Ini berarti terdapat 32 kematian bayi usia di bawah 1 tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup di Desa D pada tahun 2017.

d. Angka Kematian Anak atau *Childhood Mortality Rate* (CMR)

Angka Kematian Anak adalah jumlah kematian anak berusia 1–4 tahun selama 1 tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu.

Rumus :

$$\text{CMR} = \frac{D}{P} \times k$$

Keterangan :

D = Jumlah kematian anak (1-4 tahun) pada tahun tertentu

P = Jumlah anak (1-4 tahun) pertengahan tahun tertentu

K = Bilangan konstanta, yaitu 1000

Contoh :

Jumlah anak (1-4 thn) di Desa B pada pertengahan tahun 2017 sebanyak 550 anak dan terdapat 2 kematian anak (1-4 thn) di desa tersebut selama tahun 2017, maka CMR di Desa B tersebut adalah :

$$\text{CMR} = \frac{2}{550} \times 1000 = 3,64$$

Jadi rata-rata kematian anak di Desa B tersebut adalah sekitar 4 anak per 1000 penduduk per tahun.

e. Angka Kematian Ibu atau *Maternal Mortality Rate* (MMR)

Angka kematian ibu melahirkan atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) adalah Kematian Ibu yang disebabkan kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah persalinan, terlepas dari lama dan tempat persalinan dari setiap penyebab yang berhubungan dengan kehamilan atau penanganannya, dan bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan (WHO, 1998)

$$\text{MMR} = \frac{\text{Jumlah kematian ibu pada thn tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup pada thn tertentu}} \times 100.000$$

$$\text{MMR} = \frac{\text{DM}}{\text{B}} \times \text{k}$$

Keterangan :

DM = Kematian Ibu (*Mothers Death*)

B = Kelahiran Hidup

k = Bilangan konstanta, biasanya 100.000
(oleh karena kasusnya kecil)

Contoh :

Jumlah kelahiran hidup di Kabupaten C tahun 2017 sebanyak 130.000. Ibu yang meninggal akibat melahirkan (saat melahirkan 3 hari, seminggu, s/d 42 hari sesudah melahirkan) sebanyak 54 orang.

$$\text{Jadi MMR} = \frac{54 \text{ orang}}{130.000} \times 100.000 = 41,5$$

Artinya di Kabupaten C pada tahun 2017 terdapat rata- rata 42 kematian ibu untuk setiap 100.000 kelahiran hidup

E. Migrasi

1. Pengertian Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/ negara ataupun batas administratif bagian dalam suatu negara. Jadi migrasi dapat dikatakan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari suatu daerah ke daerah lain.

Ada dua dimensi penting yang perlu ditinjau dalam penelaahan migrasi, yaitu dimensi waktu dan dimensi daerah. Untuk dimensi waktu, ukuran yang pasti tidak ada karena sulit menentukan berapa lama seorang pindah tempat tinggal untuk dapat dianggap sebagai seorang migran. Tapi biasanya digunakan definisi yang ditentukan dalam sensus penduduk 1971 dan 1980 adalah 6 bulan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi

a. Faktor Pendorong (*push factor*)

- 1) Makin berkurangnya sumber-sumber kehidupan seperti menurunnya daya dukung lingkungan, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil tambang, kayu atau bahan dari pertanian.

- 2) Menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal (misalnya tanah untuk pertanian di perdesaan yang makin menyempit)
 - 3) Adanya tekanan-tekanan politik, agama, suku sehingga mengganggu hak azasi penduduk di daerah asal
 - 4) Alasan pendidikan, pekerjaan atau perkawinan
 - 5) Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.
- b. Faktor-faktor Penarik (*pull factor*)
- 1) Adanya harapan akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup
 - 2) Adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik
 - 3) Keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas publik lainnya
 - 4) Adanya aktifitas-aktifitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang daerah lain untuk bermukim di kota besar tsb.

F. Umur Harapan Hidup (*Expectation Of Life*)

Umur harapan hidup (*Expectation of Life*) adalah suatu estimasi dari sejumlah umur rata-rata bagi seseorang yang hidup dibanding dengan jumlah kematian rata-rata umur tertentu pada tahun tertentu. Umur harapan hidup merupakan indikator dari kondisi kesehatan pada

saat ini dan bukan suatu rate. Kecenderungan perubahan tingkat kematian akan menambah harapan hidup seseorang.

Contoh:

Jika di wilayah A umur harapan hidup pada waktu lahir tahun 2005 adalah 60 tahun, berarti bahwa setiap bayi yang dilahirkan pada tahun 2005 akan mempunyai harapan hidup 60 tahun apabila pola kematian tidak berubah.

G. Data Kependudukan

1. Tujuan Analisis Demografi

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan berbagai permasalahan, terutama dalam bidang ekonomi dan sosial. Para ahli demografi menjelaskan bahwa jumlah penduduk yang terlampaui besar akan menekan standar hidup masyarakat, terutama kalau jumlah penduduk dikaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Sebaliknya jika terjadi kekurangan penduduk maka diperlukan insentif (pendorong) untuk menambah kelahiran. Hal ini diperlukan analisis kependudukan yang mencakup data demografi yang dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

Tujuan para ahli Demografi melakukan Analisis Demografi yaitu untuk dapat membawa manfaat berupa:

- a. Mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk;
- b. Menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau, kecenderungannya, dan persebarannya;
- c. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial,

ekonomi, budaya, lingkungan dan lain-lain;

- d. Memperkirakan pertumbuhan penduduk atau proyeksi penduduk pada masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinannya.

Pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai pelaku pembangunan dapat mempersiapkan terlebih dahulu melalui pemberdayaan yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Keterkaitan antara kependudukan dengan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, lingkungan, dan hubungannya dengan fertilitas, mortalitas dan keluarga berencana terbukti berhasil mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitas kependudukan.

2. Sumber Data Kependudukan

Secara umum data dapat diartikan sebagai kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan berupa angka, lambang atau sifat yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan.

Sedangkan kependudukan atau demografi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu.

Data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan

lain lain. Berdasarkan tipenya, sumber data kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer, ialah segala catatan asli atau data yang diperoleh dari responden secara langsung. Contohnya, tabel-tabel penduduk yang diterbitkan Badan Pusat Statistik.
- b. Sumber Data Sekunder, ialah data yang telah diolah dan disajikan baik dalam buku teks, laporan penelitian, maupun karya tulis terbitan-terbitan periodik atau buku tahunan.

Sumber data kependudukan yang pokok dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) sensus penduduk; (2) registrasi penduduk; dan (3) survey penduduk.

a. Sensus Penduduk

Sensus penduduk menurut PBB adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Karakteristik tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan sensus penduduk adalah semua orang, waktu tertentu, dan wilayah tertentu.

Cara pencacahannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sensus *De jure* (pencacahan penduduk yang hanya dikenakan kepada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah sensus tersebut.) dan sensus *De facto* (pencacahan penduduk yang dikenakan kepada setiap orang-orang yang pada saat pencacahan berada di wilayah sensus).

b. Registrasi Penduduk

Registrasi penduduk merupakan sistem kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemerintah setempat yang meliputi pencacatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan. Tujuan registrasi adalah sebagai suatu catatan resmi dari peristiwa tertentu dan

sumber yang berharga dalam penyusunan proses perencanaan masyarakat.

c. Survei Penduduk

Hasil sensus dan registrasi penduduk mempunyai keterbatasan karena hanya menyediakan data statistik kependudukan dan kurang memberikan informasi tentang sifat dan perilaku penduduk tersebut. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, perlu dilaksanakan survei penduduk yang sifatnya lebih luas dan mendalam.

Pada umumnya, survei penduduk dilakukan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi kasus. Contohnya, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang secara berkala yaitu setiap 5 tahun diadakan oleh BKKBN, Kementerian Kesehatan dan Badan Pusat Statistik (BPS). BPS juga melaksanakan berbagai survei, seperti Survei Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja, dan Survei Antarsensus.

H. Manfaat Data Kependudukan

Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh Negara dengan menyimpannya di Data Center. Data Center digunakan sebagai tempat atau ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan instansi pelaksana (PP No. 37 Tahun 2013, Pasal 1 point 30).

Data pribadi penduduk yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau cacat mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang harus dilindungi kerahasiaannya (Pasal 84 ayat 1) dan ketentuan lebih lanjut seperti tersebut Pasal 84 ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk:

- a. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
- c. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
- d. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
- e. Penegakkan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja ilegal.

Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan data kependudukan baik bagi petugas pada penyelenggara, instansi pelaksana, dan pengguna data kependudukan. Dengan demikian perlu diterapkan sanksi pidana bagi setiap penduduk sehingga tidak ada lagi diskriminasi sesama penduduk maka diperlukan penyesuaian besarnya sanksi pidana bagi penduduk Warga Negara Indonesia maupun penduduk Warga Negara Asing.

Ketentuan pidana tentang penyalah-gunaan data kependudukan dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain:

- a. Pasal 94 menyebutkan bahwa setiap orang yang memerintahkan atau memfasilitasi, memanipulasi data kependudukan atau elemen data penduduk. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 77 dapat pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. Pasal 95A menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menyebarkan data kependudukan sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (3) dan data pribadi seperti diatur dalam pasal 86 ayat (1a) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Pasal 95B menyebutkan bahwa setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan atau memfasilitasi dan melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam pasal 79A dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.0000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- d. Pasal 96 menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan blangko dokumen kependudukan sesuai dengan bunyi Pasal 5 huruf f dan huruf g akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Dengan diterapkannya sanksi pidana tersebut diharapkan petugas dan pengguna data kependudukan tidak berwenang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Penyajian data kependudukan berskala provinsi (pasal 6 UU No. 24 Tahun 2013) dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota (pasal 7 UU No. 24 Tahun 2013) berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Data Kependudukan diterbitkan secara berkala, untuk skala Nasional, skala Provinsi dan Kabupaten/Kota diterbitkan persemester yaitu semester pertama diterbitkan tiap tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember setiap tahun kelender (penjelasan pasal 5 s/d 7 UU No. 24 Tahun 2013). Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai kekhususannya berbeda dengan provinsi yang lain karena diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Administrasi Kependudukan seperti kabupaten/kota. (Pasal 7 ayat 2).

Pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau badan hukum Indonesia adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 ayat 4 UU No. 24 Tahun 2013).

Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid dapat dipergunakan sebagai data/bahan/masukan untuk pembangunan database kependudukan kabupaten, juga sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu dan untuk pelaksanaan pemilu Kepala Daerah serta dalam jangka panjang digunakan sebagai data dasar dalam rangka Pembangunan Data

I. Rangkuman

1. Demografi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk dan "*grafein*" yang artinya menggambar atau menulis. Demografi dapat diartikan sebagai tulisan-tulisan, atau karangan-karangan mengenai rakyat atau penduduk. Istilah ini pertama kali dipakai oleh Achille Guillard pada tahun 1855.
2. Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistic dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya lima komponen demografi yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial (Donald J. Bogue, 1973).
3. Pencatatan statistik kependudukan sudah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu dalam ruang lingkup yang kecil dan digunakan secara terbatas oleh John Graunt (1620-1674), seorang warga negara Inggris. Dalam bukunya yang berjudul *Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index and Made Upon the Bills of Mortality*, John Graunt melakukan Analisis data kelahiran dan kematian yang diperoleh dari catatan kematian (*bills of mortality*) yang berisi analisis mortalitas, fertilitas, migrasi, perumahan, data keluarga, perbedaan antara kota dan Negara, dan jumlah penduduk laki-laki yang berada pada kelompok umur militer. Dari usaha Graunt dalam bidang kependudukan yang mencakup topik-topik yang menarik, dapat dikatakan bahwa ilmu demografi lahir pada zamannya. Oleh karena itu Graunt dikenal pula sebagai "Bapak Demografi".
4. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk, secara terus-menerus penduduk akan dipengaruhi oleh

jumlah bayi yang lahir (*Fertilitas*), tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian (*Mortalitas*) yang terjadi pada semua golongan umur. Sementara itu migrasi juga berperan: 'imigran' (*immigration*) akan menambah dan 'emigran' (*outmigration*) akan mengurangi jumlah penduduk.

5. Studi Kependudukan dari Malthus ke Neo-Malthusian. Tentang Teori Kependudukan mengatakan bahwa: (1) hubungan antara penduduk dan keterbatasan sumber alam/pangan (penduduk optimum); dan (2) hubungan antara penduduk dan lingkungan (*carrying capacity*/daya dukung). Tentang Teori Kelebihan Penduduk (*over population theory*): Mengembangkan pemikiran yang sudah dikembangkan oleh ayahnya, Daniel Malthus, mengenai hubungan antara penduduk dan pangan.
6. Kebijakan kependudukan di Indonesia pada Orde Lama: Pronatalis. Pembatasan kelahiran terutama penggunaan kontrasepsi bertentangan dengan moral bangsa. Indonesia dan hanya dapat disetujui jika dimaksudkan untuk mengatur kelahiran demi menjaga kesehatan ibu dan Ketidaksetujuan tokoh-tokoh agama. Pada Orde Baru: Anti- Natalis dengan menandatangani *United Nations Declaration on Population* bersama 29 pemimpin lain di dunia. Kemudian Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana Nasional pada Oktober 1968 dan Pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional pada tahun 1970.
7. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan antara komponen kependudukan yang meliputi: kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), migrasi masuk (*in-migration*) dan migrasi keluar (*out migration*). Selisih antara *immigration* dan *out migration* disebut migrasi neto (*net migration*). Data demografi diperoleh dari sumber data kependudukan seperti sensus penduduk, registrasi vital, dan survei. Ukuran-ukuran

demografi dikelompokkan menjadi angka absolut dan angka relatif. Angka absolut berkaitan dengan ukuran kohor, periode, dan prevalensi. Angka relatif terdiri atas persentase, proporsi, angka, dan rasio.

8. Fertilitas adalah reproduksi yang nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita berkaitan dengan banyaknya bayi yang lahir hidup sebagai penambahan jumlah anggota baru dari suatu penduduk disebabkan kelahiran. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan fertilitas yaitu: Lahir hidup (*Live Birth*); Lahir Mati (*still birth*); dan Abortus (*Abortion*).
9. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas adalah masa reproduksi (*Childbearing Age*) wanita melahirkan mulai *menarche* hingga *menopause* yang disebut usia subur (15-49 tahun). Ada tiga tahapan dalam proses reproduksi yaitu: Tahap hubungan kelamin; Tahap konsepsi (*conception*); dan Tahap kehamilan (*gestation*). Selain ketiga faktor tersebut terdapat faktor sosial, ekonomi dan budaya dapat mempengaruhi fertilitas sebagai faktor tidak langsung yang disebut “variabel antara”.
10. Beberapa ukuran fertilitas yang akan dibahas dalam materi pembelajaran ini yaitu: *General Fertility Rate* (GFR); *Age Specific Fertility Rate* (ASFR); *Crude Birth Rate* (CBR); *Total Fertility Rate* (TFR); *Gross Reproduction Rate* (GRR); *Net Reproduction Rate* (NRR); dan *Child Women Ratio* (CWR).
11. Mortalitas atau kematian adalah pengurangan jumlah anggota dari suatu penduduk disebabkan kematian. Mati (*death*) adalah menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen. Mati selalu didahului dengan keadaan hidup. Lahir mati (*fetal Death*) adalah peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum dikeluarkan dari rahim ibunya.

12. Ukuran kematian merupakan suatu angka atau indeks yang dipakai dasar menentukan tinggi rendahnya tingkat mortalitas di suatu negara atau wilayah dengan menggunakan ukuran-ukuran: Angka kematian kasar atau *Crude Death Rate* (CDR); Angka kematian Menurut Umur atau *Age Specific Death Rate* (ASDR); Angka kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR); Angka Kematian Anak atau *Childhood Mortality Rate* (CMR); dan Angka Kematian Ibu atau *Maternal Mortality Rate* (MMR).
13. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif bagian dalam suatu negara yang relatif permanen. Dua dimensi penting dalam penelaahan migrasi, yaitu dimensi waktu dan dimensi daerah. Dalam dimensi waktu, ukuran yang digunakan dalam sensus adalah 6 bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi yaitu faktor pendorong (*push factor*); dan faktor-faktor penarik (*pull factor*).
14. Umur harapan hidup (*Expectation of Life*) suatu estimasi dari sejumlah umur rata-rata bagi seseorang yang hidup dibanding dengan jumlah kematian rata-rata umur tertentu pada tahun tertentu sebagai indikator dari kondisi kesehatan pada saat ini.
15. Analisis demografi bermanfaat untuk: mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk; menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau, kecenderungannya, dan persebarannya; mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan lain-lain; dan memperkirakan pertumbuhan penduduk atau proyeksi penduduk pada masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinannya.

16. Sumber Data Kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data kependudukan yang pokok dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: sensus penduduk; registrasi penduduk; dan survey penduduk.
17. Manfaat data kependudukan untuk: pelayanan publik; perencanaan pembangunan; alokasi anggaran; pembangunan demokrasi; dan penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.
18. Penyalahgunaan data dapat dipidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dengan sanksi pidana supaya petugas dan pengguna data kependudukan tidak sewenang-wenang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

J. PENDALAMAN MATERI 1 DASAR-DASAR KEPENDUDUKAN

Jawablah pertanyaan dengan memilih sala satu jawaban yang paling tepat dari pilihan A, B, C, D, atau E dengan memberi tanda (X) di bawah ini:

1. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 4 komponen, di bawah ini, kecuali :
 - A. kelahiran (fertilitas)
 - B. kematian (mortalitas)
 - C. kesuburan (fecunditas)
 - D. in-migration (migrasi masuk)
 - E. out migration (migrasi keluar)
2. Ilmu demografi bersifat kuantitatif berarti...
 - A. Menjadi satuan yang terukur dan dapat dibuktikan secara ilmiah dan merupakan suatu hitungan yang dilakukan dalam rumus matematika dan sosiologis mengenai fenomena kependudukan.

- B. Mempunyai ukuran-ukuran yang dilandaskan pada prinsip statistika dan matematika untuk mengukur fenomena fertilitas, mortalitas dan migrasi.
 - C. Bisa terukur dan dapat menjadi patokan yang pasti dalam kelahiran penduduk
 - D. mempunyai ukuran-ukuran yang dilandaskan pada prinsip geografi dan matematika untuk mengukur fenomena fecunditas, mortalitas dan migrasi.
 - E. Mempunyai definisi ukuran yang tepat dalam sudut pandang ilmu monografi yaitu adalah bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu fenomena penduduk
3. Tujuan dari pengukuran fenomena demografis adalah....
- A. Perubahan yang terjadi dapat dibuktikan secara ilmiah dan objektif
 - B. Adanya perbandingan antara penduduk sebelumnya dan sesudahnya dengan cara membandingkan fenomena
 - C. Menyediakan bukti-bukti yang terorganisir dan dibuktikan secara matematis
 - D. Dapat mengukur tingkat kelahiran dan kesuburan dalam penduduk sebagai satu-satunya acuan dalam perubahan penduduk.
 - E. Dinamika yang terjadi dalam penduduk dapat diketahui, dipelajari secara sistematis, dianalisis dan dibandingkan.
4. Ukuran fertilitas yaitu ...
- A. *Crude Death Rate* (CDR);
 - B. *General Migration Rate* (GMR),
 - C. *Age Specific Fertility Rate* (ASFR),
 - D. *Total Mortality Rate* (TMR),
 - E. *Child Adult Ratio* (CAR).

5. Definisi mati (*death*) menurut UN & WHO adalah...
- A. Keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
 - B. Keadaan mati tidak selalu didahului dengan keadaan hidup.
 - C. Keadaan lenyapnya semua tanda-tanda kehidupan secara bertahap yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
 - D. Keadaan munculnya semua tanda-tanda kematian secara permanen
 - E. Keadaan menghilangnya nyawa makhluk hidup yang bisa terjadi setiap saat dan tidak harus didahului dengan kehidupan
6. Ukuran mortalitas yaitu ...
- A. *Crude Death Rate* (CDR);
 - B. *General Migration Rate* (GMR),
 - C. *Age Specific Fertility Rate* (ASFR),
 - D. *Total Mortality Rate* (TMR),
 - E. *Child Adult Ratio* (CAR).
7. Umur harapan hidup atau *Expectation of Life* adalah...
- A. Suatu harapan kehidupan yang ada pada makhluk hidup pada tahun tertentu
 - B. suatu estimasi dari sejumlah umur rata-rata bagi seseorang hidup, didasarkan pada kematian rata-rata umur tertentu pada tahun tertentu.
 - C. Suatu kondisi munculnya kehidupan yang dapat membawa harapan dan tidak mencakup kematian pada masa tertentu
 - D. Suatu kondisi mengenai kehidupan yang dianalisis melalui rumus demografi mengenai dinamika kependudukan
 - E. Kehidupan yang diharapkan dapat dihitung

8. Analisis kependudukan didasarkan kriteria yaitu
- A. Pendidikan, kewarganegaraan, agama, etnisitas
 - B. Kegemaran, kedudukan, lokasi, pekerjaan
 - C. Suku, ras, agama, kondisi pekerjaan
 - D. Tempat tinggal, ekonomi, tingkat pendidikan
 - E. Etnisitas, kegemaran, kesehatan, pendidikan
9. Manfaat melakukan analisis demografi yaitu, kecuali:
- A. Mempelajari kuantitas dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu.
 - B. Mengembangkan hubungan penyebab antara perkembangan masyarakat tertentu dengan bermacam-macam aspek organisasi pendidikan, politik, kondisi perekonomian
 - C. Menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau, kecenderungannya, dan persebarannya dengan data yang tersedia.
 - D. Mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan lain-lain.
 - E. Memperkirakan pertumbuhan penduduk (proyeksi penduduk) pada masa yang akan datang dan kemungkinan-kemungkinan konsekuensinya.
10. Sumber data kependudukan yaitu:
- A. Sensus, Pencacahan, dan Pengkodingan Penduduk
 - B. Registrasi, Pencatatan dan Pelaporan Penduduk
 - C. Survei, Kuesioner dan Diskusi Penduduk
 - D. Sensus , Registrasi dan Survei Penduduk
 - E. Pemilu, Pilkada dan Sensus Penduduk

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban singkat!

1. Sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas?
2. Apa yang dimaksud dengan mortalitas sebagai salah satu komponen demografi?
3. Sebut dua faktor yang dapat mempengaruhi adanya migrasi!
4. Jelaskan secara singkat para ahli kependudukan melakukan analisis demografi!
5. Apa manfaat data kependudukan bagi pembangunan nasional?

K. KUNCI JAWABAN MATERI 1 DASAR-DASAR KEPENDUDUKAN

1. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 4 komponen, di bawah ini, kecuali :
C. Kesuburan (fecunditas)
2. Ilmu demografi bersifat kuantitatif berarti...
A. Menjadi satuan yang terukur dan dapat dibuktikan secara ilmiah dan merupakan suatu hitungan yang dilakukan dalam rumus matematika dan sosiologis mengenai fenomena kependudukan.
3. Tujuan dari pengukuran fenomena demografis adalah....
E. Dinamika yang terjadi dalam penduduk dapat diketahui, dipelajari secara sistematis, dianalisis dan dibandingkan.
4. Ukuran fertilitas yaitu ...
C. *Age Specific Fertility Rate* (ASFR)

5. Definisi mati (*death*) menurut UN & WHO adalah...
 - A. keadaan menghilangnya semua tanda tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
6. Ukuran mortalitas yaitu ...
 - D. Total Mortality Rate (TMR)
7. Umur harapan hidup atau *Expectation of Life* adalah...
 - B. Suatu estimasi dari sejumlah umur rata-rata bagi seseorang hidup, didasarkan pada kematian rata-rata umur tertentu pada tahun tertentu.
8. Analisis kependudukan didasarkan kriteria yaitu
 - D. Tempat tinggal, ekonomi, tingkat pendidikan
9. Manfaat melakukan analisis demografi yaitu, kecuali:
 - B. Mengembangkan hubungan penyebab antara perkembangan masyarakat tertentu dengan bermacam-macam aspek organisasi pendidikan, politik, kondisi perekonomian
10. Sumber data kependudukan yaitu:
 - D. Sensus , Registrasi dan Survei Penduduk

SUBBAHASAN
PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA BERKARAKTER KEBANGSAAN

2

LIMA ISU KEPENDUDUKAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kependudukan ini peserta diklat dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan kembali materi LIMA ISU KEPENDUDUKAN yang meliputi: (1) Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk; (2) Penduduk Remaja dan Orang Muda; (3) Penduduk Usia Produktif; (4) Penduduk Lanjut Usia; dan (5) Lingkungan Ramah Penduduk.

A. Pendahuluan

Jumlah dan pertumbuhan penduduk selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Berdasarkan sensus yang telah dilakukan masing-masing Negara di dunia, pada umumnya hampir setiap Negara terus mengalami pertumbuhan penduduk. Hal ini menuntut akses terhadap pemenuhan segala kebutuhannya. Jika tidak terpenuhi akan memunculkan banyak dampak serta problematikanya terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan juga dapat mengancam integrasi nasional.

B. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia

Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya Negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Jumlah penduduk Indonesia dari hasil Sensus 2010 mencapai angka 237.641.326 jiwa. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan pertumbuhan penduduk Indonesia sangat cepat sejak sensus penduduk dari 1930-2010.

Tabel 1
Pertumbuhan Penduduk dari Tahun 1930-2010

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
1930	60,7
1940	-
1950	-
1961	97,1
1971	119,2
1980	146,9
1990	178,6
2000	205,1
2010	232,5

Sumber: Badan Pusat Statistik 2010 (Dalam Jutaan)

Pertumbuhan penduduk Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan membuat masalah kependudukan semakin kompleks. Selain itu juga beberapa masalah kebutuhan penduduk perlu mendapatkan perhatian secara khusus guna pembangunan manusia Indonesia.

Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif dari besarnya jumlah penduduk antara lain sebagai penyedia tenaga kerja yang melimpah, potensi pemasaran produk, dan pertahanan Negara. Sedangkan dampak negatif dapat menimbulkan kerawanan Sosial, berkurangnya daya dukung lingkungan, pendidikan rendah, dan lapangan pekerjaan yang terbatas.

Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai masalah lingkungan dan aspek lainnya. Hal ini membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan tempat yang lebih banyak. Padahal lahan sebagai tempat tinggal penduduk semakin berkurang karena wilayah Indonesia tidak bertambah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dalam mengendalikan penduduk sangat diperlukan dalam bentuk kebijakan yang terkait dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia.

Program-program yang ditawarkan pemerintah seperti Keluarga Berencana harus lebih dioptimalkan melalui berbagai sektor pembangunan. Pendekatan-pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat melalui aparat perlu ditingkatkan. Hal ini agar dapat menggugah semua elemen bangsa untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang pentingnya merencanakan keluarga, pendewasaan usia perkawinan dan kesempatan pendidikan yang lebih luas.

Sudah saatnya laju pertumbuhan penduduk ini menjadi perhatian semua pihak termasuk para aparatur sipil negara melalui Pendidikan dan Pelatihan. Para Aparatur Sipil Negara dapat memberikan wawasan kependudukan melalui penjelasan dan penyuluhan kepada

masyarakat. Melalui para aparat ini dapat disosialisasikan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk sehingga para aparat memiliki wawasan kependudukan dan mampu menjadi aparat yang bertanggung jawab.

C. Penduduk Remaja dan Orang Muda

1. Batasan Remaja dan Orang Muda

Remaja dan orang muda dua istilah dalam kelompok penduduk yang sama. Remaja itu disebut orang muda demikian juga orang muda masuk dalam kelompok remaja. Istilah orang muda didefinisikan di dalam Kamus Bahasa Indonesia: *anak muda* (dengan kata dasar “anak”) adalah orang yang masih muda; pemuda. Dengan kata dasar “muda” didapatkan kata *pemuda* diartikan orang yang masih muda; orang muda: harapan bangsa.

Batasan usia orang muda yang digunakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggunakan usia 12-24 tahun sebagai “*Adolescent and Youth*”, atau pada usia 10-24 tahun yang lebih rendah lagi untuk menyebut “Kaum Muda”. Orang muda adalah bagian masyarakat yang paling sehat dan dinamis, tetapi tantangan dan persoalan senantiasa mengancam mereka. Memahami dinamika orang muda bukan hanya berorientasi pada masa kini, namun sekaligus terhadap masa depannya.

Materi pembelajaran ini dimaksudkan untuk membahas hal-hal pokok yang berkaitan dengan orang Muda dan pengaruhnya terhadap pembangunan bangsa. Diawali dengan memahami dan karakteristik orang Muda dilanjutkan dengan berbagai aspek positif dan kesulitan yang dihadapi oleh orang muda. Kemudian dirumuskan kebijakan yang dapat diambil, atau dilakukan, oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan potensi orang muda menjadi potensi pembangunan bangsa.

2. Fakta dan Karakteristik Penduduk Remaja dan Orang Muda

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,6 juta jiwa yang terdiri dari laki-laki 51% dan wanita 49%. Dari jumlah penduduk tersebut diantaranya 53,4 juta kelompok muda. Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2025 berdasarkan perhitungan proyeksi data Sensus Penduduk (SP) 2010 memperkirakan jumlah orang muda akan meningkat menjadi 59 juta ditahun 2025.

Penduduk Muda banyak bertempat tinggal di perkotaan dibandingkan pedesaan. Untuk periode 2000 hingga 2010, Kaum Muda yang bertempat tinggal diperkotaan mengalami peningkatan, kecuali pada kelompok umur 15-19 tahun yang bertahan pada angka 10,6 juta jiwa. Sedangkan yang tinggal di pedesaan, jumlah Kaum Muda terjadi penurunan atau konstan. Sehingga yang tinggal di perkotaan mempunyai pengaruh besar.

Besarnya angka Kaum Muda Indonesia dewasa ini merupakan potensi bagi Indonesia kedepan. Kelompok usia Muda 10-19 tahun akan menjadi pelaku utama pembangunan pada satu hingga dua dasawarsa kedepan. Ahli kependudukan memperhitungkan bahwa sejak tahun 2020, Indonesia akan memiliki peluang besar dari memiliki Kaum Muda yang jumlahnya besar.

Kaum Muda merupakan kelompok penduduk yang dipersiapkan menjadi pelaksana pembangunan. Mereka harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik. Disamping itu perlu adanya perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi serta jaminan kesehatan mental dan fisiknya. Pendidikan dan keterampilan serta pelatihan menjadi aspek penting yang harus dimiliki oleh Kaum Muda.

3. Tantangan dan Peluang Orang Muda di Bidang Pendidikan

Berdasarkan laporan *Education for All* (EFA) yang dirilis tahun 2011, tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan Indonesia diurutan terendah diantara Negara yang termasuk dalam *Education Development Index*.

Indonesia berada pada posisi ke-69 dari 127 negara, sedangkan Malaysia ke-65 dan Brunei ke-34. Data pendidikan tahun 2010 menyebutkan 1,3 juta anak usia 7-15 tahun terancam putus sekolah. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka putus sekolah ini. Namun yang paling umum adalah tingginya biaya pendidikan yang membuat siswa tidak dapat melanjutkan pendidikan dasar dan menengah, apalagi hingga ke perguruan tinggi.

Jenjang pendidikan dasar dan menengah keduanya menunjukkan peningkatan proporsi yang bermakna. Proporsi terbesar ini berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Proporsi ini agak mengkhawatirkan mengingat masih besarnya orang muda yang bersekolah masih berada pada tingkat dasar maupun menengah. Padahal dengan rentang usia 15-24 tahun mereka seharusnya sudah berada dijenjang sekolah yang lebih tinggi.

Di dalam banyak literatur kependudukan, telah lama difahami bahwa semakin meningkatnya proporsi wanita yang bersekolah berpengaruh positif pada kelangsungan hidup anaknya. Sebenarnya akan sangat menarik jika dapat dilakukan analisis terhadap dorongan di masyarakat untuk menyekolahkan anak wanitanya. Mengingat selama ini tata nilai anak yang umum dianut dibanyak tempat lebih mendahulukan anak laki-laki dari pada anak wanita.

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) secara umum digunakan sebagai indikator pertama melihat proporsi penduduk yang bersekolah disetiap jenjang pendidikan dari tahun ke tahun menunjukkan angka penurunan yang sangat drastis. Meskipun perlu dicatat juga, bahwa angka proporsi partisipasi dimasing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan.

Dalam hal selisih antara APK dengan APM di perkotaan dan di pedesaan menunjukkan kecenderungan yang sama. Pada kedua jender tersebut menunjukkan peningkatan selisih APK dengan APM. Proporsi APK dan APM di perkotaan lebih tinggi dari pada di pedesaan menunjukkan bahwa orang muda di perkotaan lebih banyak yang menempuh pendidikan. Perlu diperhatikan mengapa APK di pedesaan jauh lebih rendah dari pada diperkotaan. Hal ini menunjukkan orang muda di pedesaan sudah tidak sekolah lagi. Apakah mereka bekerja atau menganggur. Ini merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh pemerintah.

Selain tantangan tersebut sesungguhnya orang muda memiliki peluang besar di bidang pendidikan sebagai jaminan untuk memperbaiki masa depannya yang perlu menjadi perhatian. Orang muda Indonesia memiliki catatan luar biasa di bidang pendidikan dalam olimpiade ilmu pengetahuan, antara lain:

- a. *Internasional Mathematics Olimpiad (IMO)*. Kompetisi ini diselenggarakan 1959 sampai 2003. Indonesia telah 16 kali mengikuti IMO. Pertama kali di Australia dengan hasil yang diperoleh selama lima tahun adalah satu medali perak, lima perunggu dan lima *honorable mention*.
- b. *Internasional Physic Olimpiad (IPhO)*. Kompetisi ini pertama kali diadakan di Warsawa, Polandia tahun 1969. Selanjutnya diselenggarakan setiap tahun di negara yang berbeda. Indonesia pertama kali mengikuti kompetisi ini pada tahun 1993 dengan prestasi satu medali perunggu dan satu *honorable mention*. Sampai tahun 2003 Indonesia sudah mengumpulkan 5 medali emas, 7 medali perak, 17 medali perunggu dan 16 *honorable mention*.
- c. *Internasional Biology Olimpiad (IBO)* pada tahun 1999 Indonesia baru pertama kali mengirimkan tim observer karena persyaratan untuk menjadi anggota tim IBO harus menjadi anggota observer dulu. Baru pada tahun 2000 Indonesia mengirimkan peserta ke

Antalya, Turki, dengan memperoleh satu medali perunggu atas nama Putri Dianita dari SMU Negeri 8 Jakarta. Sampai tahun 2003, Indonesia telah mengumpulkan satu medali perak, enam medali perunggu, dan 3 *honorable mention*.

- d. *Internasional Olimpiad in Informatics* (IOI). Kegiatan olimpiade komputer internasional ini diikuti pertama kali oleh Indonesia di Eindhoven, Belanda. Waktu itu wirawan, dari SMU St Albertus, Malang, Jawa timur memperoleh satu medali perak. Sampai tahun 2003 Indonesia telah mengumpulkan 1 medali emas, 4 medali perak, 6 medali perunggu dan 4 *honorable mention*.
- e. *Internasional Astronomy Olimpiad* (IAO). Kali pertama Indonesia berpartisipasi kepada IAO kedelapan di Stochlom, Swedia, Oktober 2003. Prestasi yang diraih adalah *second prize*, 1 *third prize* dan 1 *special prize*. Selanjutnya, Kaum Muda Indonesia yang terdiri dari 9 pelajar SD, SMP, dan SMA mengukir prestasi Internasional pada *international Exhibition for Young Inventors* (IEYI) yang berlangsung pada 28-30 Juni 2012 di Bangkok, Thailand. Senam karya yang diikuti semua memperoleh penghargaan berupa 2 medali emas, 2 medali perunggu, dan 2 penghargaan spesial.

4. Tantangan dan Peluang Orang Muda Bidang Ketenagakerjaan

a. Pekerja anak

Secara umum, ada dua kelompok orang muda dimasyarakat. Kelompok pertama mereka yang masih bersekolah sesuai dengan usianya. Kelompok kedua mereka yang tidak sekolah karena berbagai belakang alasan dan masalahnya kemudian aktif bekerja. Sesuai dengan klasifikasi yang berlaku di Indonesia, mereka yang berusia 15 tahun termasuk ke dalam angkatan kerja, padahal mereka masih dianggap anak-anak yang harus mendapat perlindungan.

Orang muda yang berusia kurang dari 15 tahun kemudian masuk ke pasaran kerja, seharusnya menjadi keprihatinan bersama.

Orang muda dalam usia tersebut yang masuk ke dalam pangsa kerja tidak disebut sebagai pekerja melainkan disebut “pekerja-anak” atau anak yang diperkerjakan. Bahkan jauh lebih menyedihkan lagi orang muda tidak bersekolah dan juga tidak bekerja. Mereka disebut juga pengangguran yang akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan Negara.

Di Indonesia, dalam 40 tahun terakhir ini partisipasi angkatan kerja muda di pedesaan maupun di perkotaan cenderung makin meningkat. Lebih dari 40 persen orang muda di perkotaan dan di pedesaan ternyata sudah berpartisipasi secara aktif dalam pekerjaan pada usia muda. Hal ini merupakan kenyataan yang sungguh memprihatinkan karena seharusnya mereka masih dalam belajar. Perbedaan tingkat partisipasi dalam angkatan kerja antara orang muda perkotaan dan pedesaan terkait dengan perbedaan rasio orang muda yang terdaftar di sekolah di perkotaan dan dipedesaan.

Tingkat pengangguran pekerja orang muda dengan latar belakang pendidikan tinggi tetap tinggi dan cenderung terus meningkat. Situasi ini menunjukkan semakin banyaknya pencari kerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Pengangguran pekerja muda dengan pendidikan tinggi dapat dilihat dari jumlah lulusan baru yang mencari pekerjaan untuk pertama kali.

Tingginya rasio pengangguran orang muda dibandingkan jumlah pengangguran secara keseluruhan mencerminkan betapa sulitnya para pencari kerja muda mendapatkan pekerjaan. Tenaga kerja muda lebih mudah dipengaruhi oleh benturan-benturan yang terjadi di pasar tenaga kerja dibandingkan pekerja dewasa. Orang muda dengan kualifikasi yang rendah memiliki kesulitan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap karena tidak adanya keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

b. Drop-out Sekolah dan Pengangguran Muda

Idealnya orang Muda berada pada situasi belajar atau bekerja

yang baik. Berbagai sebab, orang muda ternyata tidak lagi bersekolah sekaligus juga tidak bekerja. Ternyata bersekolah juga bukan pilihan yang nyaman bagi orang muda. Buruknya lingkungan fisik sekolah menghambat orang muda untuk menyalurkan bakatnya malah sebaliknya menambah stres psikologis. Dengan demikian drop-out sekolah semakin tinggi kemudian menjadi pengangguran.

Orang Muda dihadapkan pada lingkungan yang segala sesuatunya berubah secara cepat. Mereka dibanjiri oleh informasi yang begitu banyak dan terkadang terlalu cepat untuk mereka serap dan difahami sehingga menimbulkan *information overload*. Ketidak mampuan kaum muda mengikuti perkembangan teknologi yang sedemikian cepat bisa membuat mereka merasa gagal, malu, kehilangan harga diri, dan mengalami gangguan emosional. Akibat yang timbul adalah perasaan terasing, keputusasaan, absurditas (kemustahilan), problem identitas dan masalah-masalah yang berhubungan dengan benturan budaya.

c. Perkawinan dan Kehamilan

Persoalan perkawinan, kehamilan, mengasuh anak dan fertilitas merupakan urusan penting kependudukan, kesehatan dan sosial. Orang muda yang melahirkan terlalu muda beresiko buruk secara demografi dan sosial. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang terlalu muda mempertinggi resiko sakit dan bahkan kematian. Remaja putri, terutama yang berusia kurang dari 18 tahun akan berdampak buruk pada kehamilan dan kematian. Selain itu juga terlalu dini menikah akan membatasi kesempatan belajar dan memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan batas usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita adalah 16 tahun. Perbedaan penetapan usia nikah pertama kali antara laki-laki dan wanita, serta kurang perlindungan bagi wanita menghadapi tradisi pernikahan usia dini merupakan praktek yang merugikan dan membahayakan kesehatan fisik dan psikis wanita.

Undang-Undang perkawinan itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Menurut UUPA dalam Pasal 26

dinyatakan bahwa siapa saja yang berusia dibawah 18 tahun masuk dalam kategori sebagai anak. Sebaiknya para orangtua bertanggung jawab untuk mencegah pernikahan anaknya yang dibawah umur.

Undang-undang perkawinan tersebut dianggap tidak sesuai dengan ketentuan internasional dengan merujuk pada ketentuan *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan Konvensi Hak-hak Anak. Dalam konteks kesetaraan jender, CEDAW menuntut setiap pemerintah agar melakukan upaya menghapus diskriminasi terhadap wanita yang berkaitan dengan perkawinan dan perlakuan antar sesama anggota keluarga, khususnya kesamaan hak dalam memutuskan waktu menikah. Konvensi Hak-hak Anak menentukan 18 tahun sebagai usia minimum untuk menikah bagi laki-laki maupun wanita.

Pada kenyataannya bahwa usia perkawinan pertama terus meningkat selama dua dekade terakhir. Sejak tahun 1991, rata-rata usia menikah telah meningkat dari 17 tahun ke 19 tahun. Meskipun demikian, pernikahan anak wanita yang berusia 15 tahun kebawah, masih banyak terjadi di Indonesia, terutama didaerah pedesaan.

d. Hubungan Seksual Pra-Nikah

Survey secara nasional terkait dengan isu hubungan seksual pra-nikah dikalangan remaja dan orang muda pada tahun 2003 dan 2007 dengan topik "*Indonesia Young Adult Reproductive Health (IYARH)*" menunjukkan tingkat hubungan seksual pra-nikah pada wanita usia 15-24 tahun sebesar 1,1%, dan laki-laki sebesar 8,6 % pada tahun 2007. Sedangkan hasil survey tahun 2003 mencapai 1% wanita dan 5% laki-laki. Hasil survey tersebut juga mengumpulkan informasi perilaku pacaran yang sudah menjurus kepada hubungan seksual. Survey ini mendapatkan 9,1% wanita melakukan petting pada masa pacaran dan 26,5% laki-laki.

Bagaimanapun caranya dan beberapapun tingkat kebenarannya di masyarakat, isu hubungan seksual pra-nikah saat ini perlu

mendapatkan perhatian banyak kalangan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidik, politisi, maupun para aparatur pengambil kebijakan. Perhatian itu untuk melindungi remaja dan orang muda dari perilaku hubungan seksual pra-nikah supaya tidak berhubungan seksual. Hal ini merupakan salah satu upaya memperkuat pencegahan resiko terinfeksi HIV/AIDS di kalangan mereka.

Hasil survey juga memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan orang Muda sekitar Kesehatan reproduksi masih relatif rendah. Sebagai contoh hanya sekitar 25% Kaum Muda yang memiliki pengetahuan yang benar tentang masa subur yang dapat menyebabkan kehamilan didalam siklus menstruasi wanita. Hanya sekitar 52% orang Muda yang memiliki pengetahuan yang benar tentang resiko kehamilan. Program kesehatan reproduksi remaja di Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan kelompok melalui penyuluhan kesehatan reproduksi kepada orang muda yang tergabung sebagai anggota kelompok yang telah ada di dalam masyarakat seperti misalnya pramuka, kelompok pengajian, karang taruna, dan sebagainya.

Data SDKI 2017 menyebutkan bahwa terjadi penurunan tingkat total jumlah kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 38 pada tahun 2012 menjadi 36 pada tahun 2017 dan pada kelompok umur 20-24 tahun juga menurun dari tahun 2012 sebesar 138 menjadi 111 pada tahun 2017 (BKKBN, 2017).

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, menyebutkan bahwa Kaum Muda yang sudah aktif secara seksual sebelum menikah tidak memungkinkan untuk mendapatkan pelayanan kontraspasi. Dalam kaitan ini maka pemerintah juga tidak dimungkinkan untuk menyediakan akses pelayanan kontrasepsi bagi mereka yang belum menikah. Namun faktanya memang tidak bisa dipungkiri banyak dari mereka telah melakukan hubungan seks pranikah dengan menggunakan kontrasepsi salah satunya jenis kontrasepsi kondom.

e. Perokok Remaja

Rokok dianggap pintu masuk paling mudah bagi remaja dan orang muda sebagai pengguna narkoba. Kenaikan prevalensi merokok tahun 2007 mencapai tiga kali lipat pada kaum muda laki-laki dan lima kali lipat pada kaum muda wanita dibandingkan tahun 1995. Beberapa hasil survey di Indonesia seperti Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS) dan *Global Adults Tobacco Survey* (GATS) menunjukkan pengaruh konsumsi rokok bagi kesehatan masyarakat. Menurut GATS 2011, prevalensi laki-laki merokok sebesar 67% dan wanita 2.7%. Lebih lanjut data Riskesdas 2007 menunjukkan prevalensi laki-laki perokok sebesar 65.6%.

Data analisis nasional Riskesdas 2007, menemukan adanya kaum muda laki-laki usia 10-14 tahun yang merokok sebesar 3.5% dan wanita sebesar 0.5%. Bila dibandingkan, data riskesdas 1995 menunjukkan ada 71.126 perokok kaum muda usia 10-14 tahun di Indonesia meningkat pesat menjadi 426.214 orang di tahun 2007. Hal ini menunjukkan selama 12 tahun tersebut telah terjadi kenaikan 6 kali lipat perokok kaum muda usia kurang dari 10 tahun.

Data Komnas perlindungan anak menunjukkan selama tahun 2008 hingga 2012 jumlah perokok anak dibawah umur 10 tahun di Indonesia mencapai 239.000 orang. Sedangkan jumlah perokok anak antara usia 10-14 tahun mencapai 1,2 juta orang. Kondisi ini yang menyebabkan Indonesia disebut sebagai Negara satu-satunya di dunia dengan *baby smoker* karena rata-rata perokok anak di Indonesia menghabiskan 40 batang rokok perhari.

f. Remaja Pengguna Narkoba

Orang muda menggunakan narkoba disebabkan beberapa hal antara lain untuk gembira atau hura-hura, pengaruh teman, ingin tahu atau coba-coba cari sensasi pengalaman baru, solidaritas kelompok, tekanan dari kelompoknya, ingin menunjukkan keberaniannya, adanya sikap pemberontakan kepada keluarga dan lingkungannya, ingin menghilangkan stres dan rasa bosan, mudahnya mendapat narkoba di pasaran sehingga mendorong mereka gampang untuk

menyalahgunakan narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa data kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan. Dewasa ini korbannya mencapai lebih dari 5 juta jiwa. Dikalangan pelajar sebagai bagian dari orang muda jumlah penggunaanya mencapai sekitar 921.695 orang. Pengguna yang meninggal pada tahun 2012 mencapai angka rata-rata 50 orang perhari. Data yang dicatat oleh BNN itu hanya yang terlaporkan atau yang tertangkap secara rill di lapangan selain itu masih banyak kasus yang belum diketahui.

Penyalahguna narkoba tidak hanya berdomisili di kota besar yang terkonsentrasi dipulau jawa saja. Sebaran mereka merata disemua pelosok ditanah air. Dari data yang dibuat dimedia masa, menunjukan informasi-informasi penting yang disarikan sebagai berikut. Perkembangan terakhir masalah Narkoba telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Perdagangan narkoba telah menyusup ke masyarakat usia 7-8 tahun, pada mereka ditemukan telah menggunakan ganja atau zat lainnya dalam bentuk makanan ringan.

5. Kebijakan Menghadapi Penduduk Muda

Penduduk usia muda merupakan modal bangsa saat ini dan harta kebanggaan di masa depan. Dalam kaitannya dengan pembangunan, Kaum Muda adalah pelaksana bonus demografi di masa datang. Untuk kebutuhan remaja dan orang muda perlu dipersiapkan secara baik sesuai kebutuhan mereka melalui kebijakan kependudukan yang tepat. Kebijakan termaksud yang mampu membantu dan/ atau memfasilitasi mereka untuk meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan nasional.

Remaja dan orang muda adalah mereka yang masih terus berkembang fisik maupun kejiwaannya. Sejalan dengan itu, maka persiapan yang perlu diberikan kepadanya harus sejalan dengan kondisi tersebut. Berbagai skema untuk mengoptimalkan pertumbuhan

fisik orang muda dapat disinergikan diantara institusi masyarakat dengan fokus pemenuhan fisiknya salah satunya sarana berolahraga, pendidikan dan lapangan pekerjaan perlu diberi prioritas.

Selain itu juga pelayanan kesehatan dengan segala kelengkapannya sebagai rujukan kelompok usia muda yang mengalami kondisi fisikalnya tidak optimal. Kelompok remaja ini harus mendapat akses seluas-luasnya terhadap informasi dan konseling kesehatan, termasuk kesehatan remaja yang ramah-remaja dalam menghindarkan dirinya dari perilaku beresiko. Hal ini untuk menghindari diskriminatif dalam berbagai bentuk pelayanan bagi kebutuhan para remaja difabel.

Dari segi mental-psykologis, kelompok muda perlu mendapat dukungan pengajaran dan pendidikan dasar serta pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemandirian, kesetiakawanan, sikap visioner dan bermanfaat sehingga mereka mampu untuk melanjutkan upaya menggapai pendidikan yang lebih tinggi dan/atau bekerja secara manusiawi.

Sejalan dengan hal itu, karakter sistim pengajaran, pendidikan dan pelatihan perlu diberi dukungan agar mampu selalu menyesuaikan diri menghadapi berbagai perubahan di masyarakat sehingga mampu meningkatkan potensi diri dan kreatifitasnya. Ruang publik kelompok muda sebagai wadah ekspresi diri mereka perlu diperluas, mendapat dukungan dan difasilitasi serta sejauh mungkin terhindar dari perilaku negatif.

D. Penduduk Usia Produktif

1. Batasan Usia Produktif

Struktur demografi Indonesia saat ini berdasarkan data statistik menunjukkan penduduk Indonesia berada pada kelompok usia produktif. Usia produktif ini akan memberi sumbangan terbesar bagi pertumbuhan penduduk di kemudian hari. Hal ini menjadi pekerjaan

setiap komponen masyarakat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah melalui BKKBN berupaya untuk melakukan pendekatan dengan kelompok usia produktif (15-64) tahun melalui program-program seperti Pusat Informasi dan Konseling (PIK) remaja, Generasi Berencana (Genre), dan program-program lainnya.

Penduduk usia produktif ialah penduduk dalam masa rentang antara 15-64 tahun. Hal ini dapat dipahami bahwa usia di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun tidak disebut usia produktif. Penduduk usia produktif bisa menjadi modal pembangunan nasional suatu negara bila dapat dikendalikan secara baik atau terpenuhi segala kebutuhannya sesuai usianya. Namun sebaliknya menjadi hambatan bagi kemajuan sosial dan ekonomi negara jika tidak sesuai dengan kemampuan negara untuk memenuhi segala kebutuhan penduduknya. Bagi negara yang pertumbuhan penduduknya mulai terjadi perubahan kearah penduduk usia produktif maka akan mengalami apa yang disebut dengan Bonus Demografi.

Bonus demografi seringkali dihubungkan dengan adanya penduduk usia produktif. Bonus demografi adalah masa dimana angka beban ketergantungan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif paling rendah. Dengan arti kata setiap penduduk usia kerja menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Bonus demografi ini dapat bermanfaat apabila penduduk usia produktif memiliki kemampuan dan kesempatan dalam pekerjaan.

Konsekuensi ikutan dari kondisi ini adalah penduduk yang bekerja akan memperoleh penghasilan secara ekonomis. Dari penghasilan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan selebihnya dapat ditabungkan. Dengan tingkat tabungan yang semakin tinggi dapat menjadi sumber investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kondisi ini sebagai dampak positif dari adanya bonus demografi yang suatu saat dialami oleh setiap negara.

Apabila bonus demografi ini tidak dapat dimanfaatkan oleh negara maka akan terjadi dampak negatif dari bonus demografi berbalik menjadi “Bencana Demografi”. Ketika penduduk usia produktif tersebut tidak memiliki pendidikan yang memadai, tidak memperoleh keterampilan yang cukup, tidak tersedia lapangan kerja yang dibutuhkannya. Demikian juga tidak terpenuhinya semua itu akan berakibat penduduk usia produktif menjadi penganggur sehingga ada konsekuensi ikutannya yang berdampak negatif bagi stabilitas nasional.

2. Kebutuhan Penduduk Usia Produktif

Untuk mengantisipasi bertambahnya penduduk usia produktif sebagai Bonus Demografi, maka berikut ini perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi kebutuhan mereka, antara lain yaitu:

- a. Perlu disediakan pendidikan yang memadai agar mereka yang masuk ke dalam usia produktif dapat meningkatkan tingkat pendidikan yang lebih baik serta keterampilan mereka dipasar kerja.
- b. Perlu disediakan lembaga keterampilan kerja, serta informasi lapangan kerja. Proses informasi lapangan kerja sehingga memudahkan mereka untuk masuk ke pasar kerja untuk memberdayakan mereka.
- c. Perlu upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, dan sosial. Sehingga semakin banyak kelompok produktif yang dapat menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi barang dan jasa.

3. Fenomena Ketenagakerjaan

Data makro memperhatikan tahun 2009 sebanyak 41,4 juta bekerja di lapangan kerja pertanian kemudian menjadi 39,2 juta tahun 2012, atau 35,7% dari total angkatan kerja. Dari hasil Susenas menunjukkan dua pertiga angka kemiskinan disumbangkan oleh

rumah tangga pertanian. Sisanya adalah mereka yang masuk ke dalam kelompok buruh perkotaan dengan upah yang rendah.

Dari berbagai kegiatan penelitian yang telah dilakukan beberapa kelompok rumah tangga yang paling marginal produktivitasnya adalah Rumah tangga nelayan, Rumah tangga petani berlahan sempit, Sektor informal perkotaan, dan Buruh Kontrak. Kelompok ketenagakerjaan ini perlu diperhatikan untuk meningkatkan produktifitas mereka.

Pada masa yang akan datang akan terjadi perubahan komposisi tenaga kerja, jika dilihat dari latar belakang pendidikannya. Apa yang menarik adalah bahwa pada tahun 2010 sekitar 7,5% dari angkatan kerja yang memiliki pendidikan tamat Pendidikan Diploma sampai universitas. Diperkirakan sampai tahun 2025 penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi pada jenis pendidikan komunitas, kepoliteknikan dan universitas akan mencapai 16% dari distribusi keseluruhan tenaga kerja,

Demikian juga upaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja selain meningkatkan proporsi mereka yang berpendidikan tinggi, juga memperkuat jumlah penduduk yang mengecap pendidikan menengah. Jelas terlihat bahwa pendidikan vokasional jenjang menengah akan mendominasi untuk menyediakan tenaga kerja terdidik. Komposisinya akan ditingkatkan dari sekitar 14,7 persen menjadi 20%, pertambahan juga terjadi pada kelompok yang menamatkan pendidikan menengah atas umum. Tetapi yang jelas, pendidikan yang hanya menamatkan pendidikan dasar diperkirakan hanya tersisa menjadi 30% dari sekitar 50,5 tahun 2010.

4. Kebijakan Untuk Meningkatkan Akses dan Mutu Tenaga Kerja

a. Menyediakan Pasar Kerja Inklusif

Penekanan kebijakan ini sebagai konsekuensi logis tuntutan buruh. Secara empiris buruh yang ikut anggota perserikatan relatif memiliki kesejahteraan lebih tinggi dari yang bukan anggota. Tetapi yang

sering terjadi tuntutan buruh yang mengarah kepada ketidakstabilan proses kerja pada sektor industri sehingga menggoyahkan stabilitas nasional.

Daya serap ekonomi tidak berdasarkan kompetensi melainkan menggeser ke pola pemanfaatan tenaga kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini:

Pertama, tenaga kerja yang ada sekarang adalah masuk ke dalam kategori tenaga kerja *unskilled* atau *semi skilled labor*. Komposisi tenaga kerja tidak terampil ini, yang diperlihatkan oleh struktur pendidikan angkatan kerja 49,3% hanya tamat sekolah dasar.

Kedua, tidak meratanya daya tarik investasi antar daerah. Arah investasi selama ini masih tetap didominasi oleh industri yang berkembang pada kawasan-kawasan tertentu. Hal ini berakibat pada tingginya mobilitas tenaga kerja antar daerah yang tidak seimbang. Padahal Indonesia membutuhkan pemerataan investasi supaya perluasan lapangan kerja meluas dan sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan terwujud di setiap daerah.

Ketiga, kemajuan teknologi, sebagian besar pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki pekerjaan terampil yang relatif tinggi. Diantaranya adalah dalam memenuhi tambahan pekerjaan pada sektor jasa dan manufaktur berteknologi tinggi. Permintaan akan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi, bahkan diisi oleh pekerja yang berasal dari tenaga kerja asing.

Keempat, dari sisi penawaran dapat dipahami bahwa sekalipun semakin banyak pencari kerja muda yang berpendidikan menengah dan tinggi tetapi belum siap memasuki dunia kerja. Hasil olahan data Susenas menjelang tahun 2010 menunjukkan bahwa angka pengangguran pencari kerja terdidik bahkan telah mencapai 20 - 40%.

b. Memperbaiki Sisi Supply

Investasi merupakan pendorong perluasan lapangan kerja. Makin tinggi investasi semakin besar peluang lapangan kerja. Pemerintah

menawarkan masalah investasi semakin berkualitas. Ada empat pendekatan yang perlu dilakukan untuk memenuhi target pekerja inklusif ini.

Pertama, mengintensifkan upaya untuk membekali tenaga kerja menjadi tenaga kerja berketerampilan. Program pengembangan keterampilan menjadi sangat perlu pada masa yang akan datang yang harus dilakukan oleh dinas tenaga kerja di setiap daerah.

Kedua, pemerintah tidak seharusnya hanya fokus dalam mengelola pengupahan minimum. Pemerintah sebaiknya mulai meningkatkan kompetensi ketenagakerjaan yang berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan.

Ketiga, memastikan informasi pasar kerja dapat diketahui secara luas oleh pencari kerja. Semakin banyak peluang penawaran lapangan kerja dapat menurunkan jumlah pengangguran. Walaupun dalam kaitan ini pasar kerja masih banyak disektor kerja tidak formal.

Keempat, pemerintah sebaiknya meningkatkan mutu penawaran tenaga kerja formal. Selama ini pekerja formal masih belum banyak mendapatkan perhatian dan sentuhan. Dalam kasus seperti ini, maka setiap daerah memberlakukan peta jalan yang jelas bagaimana meningkatkan keberadaan dari pasar kerja formal.

E. Penduduk Lanjut Usia

1. Batasan Penduduk Usia Lanjut

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dinyatakan bahwa usia lanjut adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Lansia termasuk dalam kategori penduduk rentan dilihat dari segi kemunduran fisik, psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan.

Perubahan jumlah penduduk lansia perlu direspon secara tepat

dan cepat untuk menghindari persoalan yang sangat serius. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa penduduk lansia memiliki pengaruh besar dalam pembangunan sosial ekonomi suatu Negara. Disamping itu lansia memiliki hak politik, sosial maupun ekonomi yang harus dipenuhi. Dalam rangka itulah, pemerintah membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia yang disahkan berdasarkan Kepres Nomor 52 Tahun 2004 untuk mengkoordinasi segala upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Jumlah penduduk usia lanjut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan nasional. Keberhasilan karena peningkatan jumlah lansia merupakan dampak dari peningkatan usia harapan hidup. Sementara tantangan peningkatan jumlah lansia akan menimbulkan permasalahan sosial. Bila permasalahan tersebut tidak diantisipasi, maka proses pembangunan akan mengalami berbagai hambatan. Permasalahan lanjut usia harus menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah, lembaga masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.

2. Transisi Demografi Penyebab Penduduk Lanjut Usia

Jumlah penduduk usia lanjut dari tahun ketahun terus meningkat sebagai akibat dari terjadinya transisi demografi. Transisi demografi ditandai dengan penurunan tingkat kematian bersamaan dengan penurunan tingkat kelahiran. Penurunan tingkat kelahiran disertai dengan peningkatan usia harapan hidup telah merubah komposisi penduduk dari kelompok penduduk muda bergeser menjadi kelompok penduduk tua. Penurunan tingkat fertilitas dan penurunan tingkat mortalitas khususnya pada kelompok usia tua menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk usia lanjut.

Demikian juga tingkat harapan hidup semakin mengalami peningkatan seiring dengan menurunnya tingkat kematian penduduk. Tingkat harapan hidup penduduk Indonesia pada usia 60 tahun ke atas akan mengalami peningkatan pada kurun waktu 2000-2050.

Diproyeksikan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia akan meningkat lagi dari usia 60 tahun menjadi 65 tahun. Dalam kurun waktu 50 tahun mendatang angka harapan hidup penduduk akan mencapai usia 80 tahun.

Tingkat harapan hidup penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki. Kesenjangan usia antara laki-laki dan perempuan ini disebut *gender gap*. Kesenjangan angka harapan hidup laki-laki dan perempuan pada tahun 2045-2050 diproyeksikan akan mencapai 4,7 tahun. Penyebab kesenjangan tersebut antara lain faktor sosial, ekonomi, dan perilaku seperti aktivitas hidup. Selain itu faktor biologi dan genetika menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya angka harapan hidup laki-laki. Penduduk usia lanjut di Indonesia akan meningkat lebih dari empat kali lipat pada tahun 2050 hingga mencapai angka 69.533.900 jiwa.

Sedangkan Rasio Jenis Kelamin menunjukkan tingkat harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sensus Penduduk tahun 2010 hampir tidak berubah, yaitu 84,9. Akan tetapi diperkirakan rasio jenis kelamin penduduk lansia akan menurun hingga 2050 mencapai angka 83,4. Rasio jenis kelamin penduduk berusia 80 tahun keatas pada tahun 1950 adalah 87. Rasio ini terus menurun hingga 69,4 pada tahun 2000 dan 69,9 pada tahun 2010 (SP 2010). Rasio jenis kelamin penduduk usia 80 tahun keatas ini diproyeksikan menurun menjadi 55,9 pada tahun 2050.

Rasio ketergantungan pada tahun 2050 hampir sama besarnya dengan rasio ketergantungan pada tahun 2000. Meskipun pada tingkatan yang sama, komposisi rasio ketergantungan keduanya akan berbeda. Pada tahun 2000, penduduk muda lebih banyak pada kelompok yang ditanggung oleh kelompok usia produktif. Pada beberapa tahun kedepan, komponen penduduk muda dan tua dalam rasio ketergantungan akan sama. Pergeseran ini merupakan akibat dari peningkatan harapan hidup dan penurunan fertilitas.

3. Persoalan Yang Dihadapi Penduduk Lansia

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk usia lanjut mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Saat ini, jumlah penduduk usia lanjut yang berpartisipasi dalam angkatan kerja lebih sedikit dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. TPAK penduduk usia lanjut di Indonesia menurun sebesar 23 persen selama 50 tahun terakhir (1950-2000). Pada tahun 1950, 1 dari 2 penduduk usia lanjut merupakan pekerja.

Pada tahun 1950, TPAK penduduk laki-laki yang berusia 65 tahun ke atas sebesar 88 persen. Penurunan TPAK terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dimana pada tahun 2000 TPAK penduduk laki-laki usia 65 tahun ke atas ini turun hampir setengah dari angka sebelumnya menjadi 48,5 persen. Berbeda dengan laki-laki, TPAK perempuan mengalami penurunan yang lebih kecil dari 30,9 persen tahun 1950 menjadi 24,1 persen pada tahun 2000.

Secara umum, proporsi penduduk laki-laki usia lanjut yang aktif secara ekonomi lebih tinggi dibanding perempuan. Namun, seiring dengan lebih cepatnya penurunan TPAK laki-laki usia lanjut, kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja mengalami peningkatan.

b. Angka Buta Huruf

Angka buta huruf penduduk usia lanjut di Indonesia mengalami penurunan meskipun angkanya masih tetap tinggi. Sebesar 76,9 penduduk usia lanjut di Indonesia masih buta huruf pada tahun 1980. Angka buta huruf penduduk usia lanjut terus menurun hingga mencapai 48,7 persen pada tahun 2000. Pada tahun 2010 angka buta huruf penduduk usia lanjut akan menurun sekitar 16 persen menjadi 32,58 persen.

Penurunan angka buta huruf penduduk usia lanjut laki-laki di Indonesia lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Hal ini

menyebabkan kesenjangan gender dalam hal melek huruf meningkat lebih dari 20 tahun terakhir. Pada tahun 1980, angka buta huruf perempuan usia lanjut (89,8 persen) 27,7 persen lebih tinggi dari laki-laki (62,1 persen). Pada tahun 2000, perbedaan ini meningkat menjadi 31,8 persen dimana 63,3 persen perempuan usia lanjut masih buta huruf dan hanya 31,5 persen laki-laki yang masih buta huruf. Gender gap dalam melek huruf penduduk usia lanjut di Indonesia akan menurun sekitar menjadi 20 persen pada tahun 2010, dimana angka buta huruf perempuan 41,73 persen dan penduduk laki-laki 21,82 persen.

Pada tahun-tahun berikutnya kondisi ini tetap sama, hanya saja angkanya terus menurun dari tahun ketahun. Pada 2010, masih 40,9 persen penduduk usia 70 tahun keatas yang buta huruf di Indonesia. Sekitar 31,7 persen penduduk usia 65-69 dan 24 persen penduduk usia 60-64 masih buta huruf pada tahun 2010 di Indonesia. Kondisi ini menjadikan penduduk usia lanjut di Indonesia menjadi sumber daya manusia yang sudah tidak produktif dan juga tidak berkualitas.

c. Tingkat Kesenjangan Lansia

Persoalan yang dihadapi lansia sangat kompleks terutama jika dikaitkan dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi. Salah satu isu pokok terkait dengan persoalan lansia adalah munculnya tiga masalah kesenjangan.

Pertama, kesenjangan geografis. Sejalan dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi, penduduk Indonesia akan semakin “mobil” bukan hanya dari sisi intensitas tetapi juga jarak. Orang akan semakin pergi dalam jarak yang semakin jauh, seiring dan bahkan berjangka waktu lama. Hal ini akan menyebabkan anak semakin cepat meninggalkan orang tua. Terdapat implikasi penting dari fenomena tersebut, yaitu orang tua lebih cepat menjadi sendirian karena ditinggalkan oleh anak.

Kedua, penyantunan orangtua. Anak mengalami kesulitan

untuk menyantuni orang tua, karena berjauhan secara fisik akibat kesenjangan geografis. Akibatnya, penyantunan terhadap orang tua yang pada dasarnya adalah kewajiban sosial psikologis anak akan ditransfer menjadi tanggung jawab ekonomi. Ketidakhadiran anak secara fisik dan psikologis yang digantikan oleh adanya orang lain yang dibayar untuk menyantuni orang tua menimbulkan persoalan tersendiri. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan psikologis tidak sepenuhnya dapat terpenuhi.

Ketiga, Ekonomi keluarga. Kondisi yang terkait dengan perubahan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Dalam masyarakat tradisional, biasanya penduduk tinggal dalam satu keluarga luas (extended). Dalam keluarga luas, pengelolaan ekonomi bersifat tunggal. Pendapatan yang diperoleh oleh siapapun yang tinggal di keluarga tersebut akan dibagi atau dimanfaatkan oleh anggota keluarga yang ada. Berbeda dengan keluarga batih di zaman modern pada umumnya ekonomi keluarga terbagi-bagi berdasarkan anggotanya.

Selain itu menjadi lansia akan berhadapan dengan masalah terkait dengan kesulitan fungsional lansia. Penuaan penduduk, sebuah proses alamiah hilangnya fungsi tubuh secara optimal dari sebuah siklus hidup seseorang dalam hidupnya. Penuaan tersebut dapat dilihat dari kemunduran dari segi fisik, psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan. Pada pembahasan ini kesulitan yang dihadapi oleh lansia meliputi kesulitan fungsional dalam kehidupan sehari-hari seperti kesulitan lansia dalam melihat dan mendengar.

Persoalan penyantunan tersebut muncul khususnya pada kelompok rentan, yaitu lansia yang tidak sehat, tidak produktif, miskin dan kehilangan *peer group*. Penyantunan ekonomi utamanya adalah pada lansia perempuan di perdesaan yang biasanya akan kehilangan sumber ekonomi setelah suaminya meninggal. Jika anak tinggal berjauhan, (kemungkinan) jika anggota keluarga dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan dan dukungan ekonomi dari tetangga berkurang.

d. Kebutuhan Lansia

Lansia sebagaimana manusia pada kelompok umur yang lain membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik atau kebutuhan dasar berupa makan, minum dan tempat tinggal. Kebutuhan ini diperlukan untuk bertahan hidup dan sekaligus menjaga kesehatan. Kebutuhan yang kedua adalah keamanan dan perlindungan. Kebutuhan sosial yaitu perasaan diterima sebagai anggota kelompok dan dicintai. Kemudian kebutuhan penghargaan yaitu pengakuan dan harga diri. Sebagai kebutuhan untuk pemahaman dan pengembangan diri.

Dengan segala persoalan yang dihadapi oleh lansia sesuai dengan karakteristinya, maka kebutuhan lansia dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan non-fisik. Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan dasar yaitu makan, minum, tempat tinggal serta kesehatan. Sementara kebutuhan non-fisik merupakan akumulasi dari kebutuhan sosial dan psikologis. Dengan identifikasi kebutuhan lansia tersebut maka semua kebijakan mengenai lansia harus ditunjukkan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut.

4. Program Pemberdayaan Lansia

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, diatur mengenai masyarakat rentan termasuk didalamnya adalah lansia. Penduduk lansia merupakan penduduk rentan yang dijamin kesejahteraannya oleh pemerintah melalui kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Bentuk kesejahteraan sosial yang diberikan kelansia adalah berupa asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Lanjut Usia yang disahkan berdasarkan Kepres No. 52 tahun 2004 yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi segala upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden.

Persoalan kesejahteraan yang dialami lansia dapat berupa

bentuk pelayanan kesejahteraan yang optimal untuk mendukung keberlanjutan mereka dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Program kesehatan lansia menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan melaksanakan program perawatan dan pendampingan lansia, program posyandu lansia, puskesmas lansia, dan program bina keluarga lansia yang bertujuan untuk mendorong lansia agar tetap sehat dan memiliki peran dalam kehidupan sehari-harinya.

Kegiatan ini bisanya diakomodir oleh masing-masing pemerintah daerah yang disesuaikan dengan agenda masing-masing dan dijalankan oleh dokter atau pegawai local yang mengurus masalah lansia. Selain itu, para lansia juga dibekali dengan jaminan kesehatan lansia yang meringankan mereka ketika akan mengakses layanan kesehatan. Berikut adalah gambaran program yang terkait dengan pemberdayaan lansia antara lain:

- a. Program Jaminan Sosial Lanjut Usia
Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (PJSLU) merupakan program pemerintah yang dilakukan dengan program subsidi langsung tunai kepada lansia tidak produktif untuk meningkatkan kesejahteraannya atau sekedar mencukupi kebutuhan hidupnya. Tujuan dari program ini antara lain: (1) Meringankan beban pengeluaran lansia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya; (2) Memelihara taraf kesejahteraan lansia agar mampu hidup wajar.
- b. Usaha Ekonomi Produktif
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan program pemerintah yang dilakukan kepada lansia produktif yang potensial dan mampu untuk bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Program ini memberikan bantuan modal usaha berupa kredit lunak untuk membentuk lansia untuk terus bekerja dan bertujuan agar lansia tidak menggantungkan pada anak atau familinya yang masih muda.
- c. Program Pendampingan dan Perawatan Lansia di Rumah
Program Pendampingan dan Perawatan Lansia di Rumah

(*Home Care*) merupakan program pemerintah yang dilakukan dengan basis kekeluargaan untuk meningkatkan fungsi lansia. Program ini lebih menekankan pada pendampingan, perawatan, dan pelayanan sosial kepada lansia di luar panti sebagai wujud solidaritas sosial. Tujuan dari program ini antara lain: (1) Meningkatkan kemampuan lansia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan diri secara fisik, mental dan sosial; (2) Terpenuhinya hak dan kebutuhan lansia agar tetap mampu berperan dalam masyarakat; (3) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam perawatan dan pendampingan lansia di rumah; dan (4) Terciptanya rasa aman dan nyaman bagi lansia di lingkungan sekitarnya.

d. Posyandu Lansia

Posyandu Lansia, merupakan program pemerintah provinsi yang kegiatannya meliputi pemeriksaan kesehatan lansia, penyuluhan lansia dan penimbangan berat badan. Pemeriksaannya dilakukan dengan memaksimalkan peran dokter dari puskesmas setempat.

e. Puskesmas Lansia

Puskesmas Lansia merupakan program lansia yang dilakukan secara swadaya. Program kegiatan yang dilakukan antara lain adalah senam bersama, arisan, makan bersama, dan kegiatan lain yang menunjang perhatian terhadap lansia. Kegiatan dilakukan oleh tenaga puskesmas, kader, atau sukarelawan yang peduli dengan nasib lansia.

f. Bina Keluarga Lansia

Bina Keluarga Lansia merupakan program pemerintah daerah yang dilakukan secara swadaya sebagai wujud perhatian mereka terhadap lansia. Beberapa kegiatan yang dilakukan melalui program ini antara lain: (1) Pemeriksaan kesehatan secara rutin; (2) Pembentukan kegiatan ekonomi produktif; dan (3) Memberikan pelatihan dengan melihat potensi wilayah.

5. Solusi Penanganan Lansia

Pada dasarnya lansia terbagi menjadi dua kelompok yaitu lansia yang produktif sehingga secara ekonomi masih potensial dan lansia yang “tidak produktif” karena kondisi kesehatan dan ekonomi yang kurang menguntungkan. Untuk kelompok pertama, penekanan kebijakan diarahkan pada memberikan lingkungan yang kondusif untuk memberikan kesempatan bagi lansia selalu produktif.

Bentuknya dapat dilakukan dengan memperluas kesempatan untuk kegiatan sub-contracting dalam hal-hal lansia masih memiliki kompetensi. Bentuknya adalah Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sementara itu untuk usia yang “tidak produktif” fokus utamanya adalah pemberian santunan baik ekonomi maupun kesehatan, utamanya adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan.

Pemerintah harus mampu mewujudkan suatu lingkungan fisik atau sosial yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi lansia, yaitu lingkungan yang ramah (layak) lansia. Sebagai contoh sarana dan prasarana fisik untuk publik yang ada harus mengakomodasi kebutuhan lansia, misalnya transportasi, perkantoran dan tempat pelayanan umum lainnya.

Sebagai contoh adalah penyediaan ruang publik (*public space*) untuk lansia dan transportasi umum yang ramah terhadap lansia. Sementara itu perlu diciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi lansia yang memungkinkan lansia dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Pengembangan *peer group* lansia adalah salah satu contoh untuk pengembangan lingkungan sosial yang ramah lansia.

F. Lingkungan Ramah Penduduk

1. Batasan Lingkungan Ramah Penduduk

Beberapa pengertian atau batasan lingkungan dan lingkungan hidup tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli di bidang lingkungan antara lain sebagai berikut:

- a. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. (Pasal 1 UULH).
- b. Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis pengertian ruang sangat luas, tetapi secara praktis kurang dibatasi menurut kebutuhan yang ditentukan.
- c. Lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik yang terdapat di alam. Pengertian lingkungan seperti ini hanya mencakup lingkungan hayati, yaitu lingkungan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena ketiga lingkungan inilah secara langsung merasakan kemanfaatan dan kerusakan lingkungan.

2. Lingkungan Ramah Penduduk

Untuk menciptakan lingkungan ramah penduduk sesungguhnya dapat dimulai dari lingkungan terkecil. Salah satunya adalah lingkungan rumah tempat tinggal. Di dalam lingkungan terkecil itu, setiap penduduk atau penghuni rumah memiliki kemampuan untuk mengubah dan memperbaiki kerusakan yang ada sedikit demi sedikit. Lingkungan terkecil itu berada sangat dekat dengan kehidupan setiap individu yang berlangsung setiap hari karena lingkungan ini berada di lingkungan rumah penghuni.

Walaupun merupakan lingkungan terkecil, pada dasarnya setiap rumah memiliki peran penting sebagai cermin yang merefleksikan hubungan penghuninya dengan Pencipta, lingkungan sosial dan lingkungan alam. Rusaknya lingkungan alam dan lingkungan sosial yang terjadi selama ini, tidak lain adalah rusaknya tatanan-tatanan kehidupan manusia yang bermula dari ruang lingkup terkecil ini. Sebaliknya, terjaganya keberlanjutan alam dan keberlangsungan masyarakat juga merupakan akumulasi dari upaya-upaya sederhana di dalam setiap rumah untuk terus memperbaiki diri dan lingkungannya.

Di dalam setiap bentuk fisik hunian penduduk rumah sesungguhnya dapat bercermin dan menatap bayangan penghuni rumah. Kondisi lingkungan rumah yang sebenarnya dapat dicermati melalui kondisi penduduknya. Sikap mental, cara pandang dan visi kehidupan penduduknya terhadap lingkungan sekitar. Misalnya jika setiap rumah dapat menanam pohon maka akan terjadi akumulasi hutan lingkungan terkecil disekitar rumah penduduk sehingga tercermin lingkungan rumah penduduk.

Langkah awal dalam melakukan perbaikan terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial, sebenarnya dapat dimulai di hunian rumah penduduk masing-masing. Selanjutnya, rumah sebagai lingkungan terkecil kita adalah tempat yang paling tepat untuk memulai perbaikan-perbaikan kecil yang akan menjadi akar dari setiap perbaikan yang lebih besar nantinya. Setiap perbaikan dalam sikap mental, cara pandang dan visi kehidupan itu, pada akhirnya diharapkan mewujudkan satu demi satu dalam bentuk perbaikan kualitas lingkungan alam dan lingkungan sosial dalam ruang lingkup yang lebih besar, yaitu keseluruhan alam semesta dan umat manusia.

Pemanasan global dan perubahan iklim yang melanda dunia memberikan dampak serius pada kehidupan sosial, ekonomi, lingkungan serta budaya. Pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi tidak hanya ditimbulkan oleh rangkaian kejadian alam biasa, akan tetapi lebih diakibatkan oleh perilaku manusia. Hasil kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) pada tahun 2007 memastikan bahwa perubahan iklim global terjadi akibat atmosfer bumi dipenuhi oleh Gas Rumah Kaca (GRK), seperti karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄).

Gas karbon dioksida dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan oleh kendaraan bermotor dan industri serta gas hasil kebakaran hutan, sementara gas metana dihasilkan dari aktivitas pembuangan sampah dan peternakan. Ditegaskannya perilaku manusia sebagai penyebab utama timbulnya pemanasan

global dan perubahan iklim menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia, sebagai negara terpadat keempat di dunia, untuk menjadikan penduduknya lebih berperilaku peduli lingkungan.

Pada dasarnya kepedulian penduduk terhadap lingkungan tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Diperlukan berbagai perangkat untuk mewujudkannya, seperti penegakan hukum, infrastruktur yang memadai, dan program-program edukasi. Perangkat tersebut akan lebih tepat guna baik pada saat perencanaan, monitoring maupun evaluasi, jika data terkait sejauh mana kepedulian penduduk terhadap lingkungannya.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas tersedianya data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan di berbagai bidang baik sektoral maupun lintas sektoral, Badan Pusat Statistik (BPS) berupaya menyediakan data mengenai perilaku penduduk yang merusak atau mencemari lingkungan hidup maupun perilaku penduduk yang ramah lingkungan. Untuk itu BPS melakukan Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH) 2013 dengan pendekatan rumah tangga. Survei ini terkait perilaku peduli lingkungan hidup yang pertama kali dilakukan oleh BPS.

Suasana lingkungan hidup perkotaan di berbagai daerah yang padat dengan penduduk tanpa dibarengi dengan penataan lingkungan sekitarnya membuat suasana kota itu menjadi panas. Daerah permukiman padat di kota-kota besar yang nampak juga gedung-gedung bertingkat sebagai rumah kaca menambah suasana kota menjadi gersang. Kenyataan ini merupakan salah satu contoh sederhana, betapa disadari atau tidak, degradasi kualitas lingkungan telah terjadi dan berdampak pada perubahan suasana kota. Jika secara sepiantas terjadinya peningkatan suhu kota atau genangan air di jalan raya perkotaan sesungguhnya telah terjadi perubahan besar pada lingkungan alam perkotaan.

Perubahan yang terjadi, berupa penurunan kualitas lingkungan, sejatinya jauh lebih besar daripada yang secara sepiantas disadari.

Lingkungan alam merupakan wadah manusia mengembangkan lingkungan binaannya. Lingkungan alam ini memperoleh dampak negatif dari usaha manusia membangun dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dampak negatif ini pada akhirnya kembali lagi kepada manusia dalam bentuk penurunan kualitas kesehatan dan masalah kependudukan lainnya.

Setiap penduduk sesungguhnya bisa menjadi pelaku dalam menjaga pencemaran dan kerusakan lingkungan disekitarnya. Sebagai penduduk biasa ini pun dapat melakukan sesuatu yang lebih daripada yang dipikirkan selama ini oleh para ahli lingkungan. Beberapa hal 'kecil' namun penting yang dapat dilakukan dengan memulai dari lingkungan sendiri untuk menciptakan penduduk yang 'ramah lingkungan', sehingga akan terjadi sebaliknya akan tercipta lingkungan ramah penduduk. Setiap penduduk berusaha mencegah dampak negatif terhadap lingkungannya. Misalnya dengan tidak membuang sampah disembarang tempat, menghemat penggunaan detergen, dan hal-hal kecil lainnya. Selanjutnya, sedikit demi sedikit dapat mulai mengadakan perbaikan-perbaikan sederhana untuk meningkatkan mutu lingkungan disekitarnya.

Hal yang tidak kalah penting adalah menyisakan lahan hijau disekitar rumah hunian untuk resapan air hujan. Air hujan yang meresap ke dalam tanah sangat dibutuhkan karena dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Salah satu penyelesaian sederhana yang dapat digunakan adalah dengan menyediakan sumur resapan untuk menampung rembesan air dari talang atau dari saluran air kotor sekitar rumah penduduk daripada membuangnya ke sungai.

3. Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Membicarakan lingkungan selalu berkaitan dengan istilah kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Kerusakan maupun pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi dan mengancam kehidupan penduduk sehingga menjadikan lingkungan

tidak ramah penduduk.

Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya hutan dibuka untuk kepentingan hidup manusia untuk dijadikan lahan pertanian atau pemukiman. Para ahli lingkungan memperkirakan lebih dari 70% hutan di dunia yang alami telah ditebang atau rusak parah. Meningkatnya jumlah penduduk akan diiringi pula dengan meningkatnya penggunaan sumber alam hayati. Adanya pembukaan hutan secara liar untuk dijadikan tanah pertanian atau untuk mencari hasil hutan sebagai mata pencaharian penduduk akan merusak ekosistem hutan.

Pencemaran lingkungan disebabkan oleh aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sering menimbulkan dampak buruk pada lingkungan. Misalnya penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan dan kertas. Pembakaran hutan untuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian, dan rawa/lahan gambut dikeringkan. Mendirikan pabrik untuk memenuhi kebutuhan sandang. Untuk mempercepat transportasi, diciptakan berbagai jenis kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan polusi udara. Pembuangan limbah pabrik atau rumah tangga membuat air kotor.

Apabila tidak dilakukan dengan benar, aktivitas seperti contoh tersebut lambat laun dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem. Misalnya penebangan hutan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor, serta dapat melenyapkan kekayaan keanekaragaman hayati di hutan tersebut. Apabila daya dukung lingkungan terbatas, maka pemenuhan kebutuhan penduduk selanjutnya menjadi tidak terjamin.

Di daerah yang padat, karena terbatasnya tempat penampungan sampah, seringkali sampah dibuang di tempat yang tidak semestinya, misalnya di sungai. Akibatnya timbul pencemaran air dan tanah. kebutuhan transportasi juga bertambah sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat. Hal ini akan menimbulkan pencemaran

udara dan suara. Jadi kepadatan penduduk yang tinggi dapat mengakibatkan timbulnya berbagai pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem.

4. Lingkungan dan Penduduk

Lingkungan dan penduduk merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling mempengaruhi. Lingkungan yang berkualitas akan memberi pengaruh positif terhadap penduduk disekitarnya. Demikian juga sebaliknya penduduk yang terkendali dan berperilaku baik dapat memelihara lingkungan hidup yang ramah.

Kualitas penduduk harus dilihat secara komprehensif yaitu dari sisi kuantitas fisik, ekonomi, sosial, politik dan lingkungan. Pendekatan ini harus dilakukan untuk menyusun perencanaan dan pengembangan kualitas penduduk, terutama pertimbangan terhadap tata ruang dan lingkungan yang memadai.

Ketidakseimbangan antara lingkungan dan jumlah penduduk dapat berdampak negatif bagi keduanya. Lingkungan yang tidak ramah membuat penduduk menjadi berperilaku tidak baik. Begitu pun jika penduduk yang berlebih dapat menggerus lingkungan sekitarnya. Berbagai peristiwa selama ini telah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia hidup di bawah bayang-bayang bencana yang terjadi silih berganti sehingga membuat lingkungan tidak ramah terhadap penduduk.

Bencana seperti banjir dahsyat “menenggelamkan” Ibu Kota dan sekitarnya, beberapa gunung meletus, tanah longsor di sebagian wilayah Indonesia. Hal menjadi indikator yang memperlihatkan bagaimana kelemahan struktural dan sistemik dalam tata kelola lingkungan hidup. Beragam bencana yang melanda negeri ini sejatinya menegaskan bahwa kualitas lingkungan hidup kian terdegradasi lantaran salah mengelola. Kesalahan penataan demikian dapat mempengaruhi kualitas penduduk Indonesia juga mulai terabaikan

Untuk mengelola lingkungan dan bertanggung jawab secara benar terhadapnya, kualitas penduduk harus menjadi prioritas. Artinya penduduk harus diberi pemahaman bahwa lingkungan hidup memiliki peran vital dalam menunjang hidup manusia. Kesalahan mengelola lingkungan hidup hanya akan mendatangkan bencana. Penduduk juga harus disadarkan bahwa daya dukung bumi sudah semakin berat lantaran ledakan penduduk dunia yang berimplikasi pada penguasaan dan pemanfaatan lingkungan hidup secara tidak bertanggungjawab.

Penguasaan dan pemanfaatan yang membabitkan mengakibatkan terjadi krisis air di mana-mana, pemanasan global, perubahan iklim yang drastis dan tidak menentu, kelaparan, kemiskinan, tanah longsor, banjir dan berbagai penyakit sebagai matarantai dari akibat kerusakan lingkungan hidup. Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia yaitu tingkat kemampuan penduduk dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraannya. Mutu sumber daya manusia pada suatu negara dapat dilihat dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan tingkat kesehatannya.

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Masalah Lingkungan hidup di Indonesia saat ini terjadinya penebangan hutan secara liar dalam bentuk pembalakan hutan; polusi air dari limbah industri dan pertambangan; polusi udara asap dan kabut dari kebakaran hutan; perambahan suaka alam/suaka margasatwa; perburuan liar, perdagangan dan pembasmian hewan liar yang dilindungi; penghancuran terumbu karang; pembuangan sampah B3/radioaktif dari negara maju; pembuangan sampah tanpa pemisahan dan pengolahan.

Padahal menurut Kementerian Lingkungan hidup, bahwa sekitar 60 juta penduduk Indonesia menggantungkan kehidupannya pada

hutan bahkan lebih dari separuh penduduknya bergantung pada energi biomasa tradisional, termasuk kayu bakar, sebagai sumber energi utama, khususnya di daerah pedesaan. Sebagai ekosistem kompleks kaya akan biomasa, banyak energi tersimpan pada hutan Indonesia. Hutan tidak hanya dilihat sebagai sumber energi, namun juga sebagai sarana mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan energi.

Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan bahwa secara global hutan menyediakan energi sekitar 10 kali lebih besar dari konsumsi tahunan energi utama dunia. Di Indonesia, dengan lebih dari setengah area di daratan yang tertutupi oleh pohon, tersimpan biomasa yang berlimpah, yang dapat digunakan penduduknya untuk memenuhi kebutuhan energi. Tantangan terbesar adalah bagaimana menggunakan hutan sebagai sumber daya yang berharga secara berkesinambungan dan bertanggung jawab.

Sekitar 80 persen konsumsi kayu bakar dalam negeri adalah untuk kebutuhan rumah tangga dan 20 persen untuk tujuan industri dan komersial. Di sisi lain, selama satu dekade terakhir kebutuhan kayu bakar di Indonesia telah menurun sebesar 35 persen, dan kecenderungan ini diharapkan berlanjut di masa depan. Dari generasi ke generasi, hutan luas Indonesia dan pohon di luar hutan telah memenuhi kebutuhan kayu bakar begitu banyak orang di daerah pedesaan.

Belakangan ini, Indonesia telah mulai mewujudkan potensi besar hutan melalui penciptaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, misalnya dalam bentuk pelet kayu dan bahan bakar hayati. Hutan merupakan tempat dari berbagai bentuk energi lainnya seperti panas bumi, tenaga air, bahkan tenaga angin. Hutan merupakan sumber energi sangat besar bagi pembangunan ekonomi dan manusia di Indonesia.

Melihat dari pertumbuhan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan di Indonesia, maka pepohonan memainkan peran

penting dalam perkembangan perkotaan untuk tujuan estetika dan keramahan lingkungan tempat tinggal. Kegiatan menanam pohon merupakan aktivitas penting untuk membantu menurunkan suhu di daerah perkotaan sekitar 2-8 derajat Celcius , dalam arti pohon-pohon mampu mengatur iklim setempat, membantu menurunkan suhu lingkungan dengan menahan sinar matahari, dan melalui proses evapotranspirasi, berperan sebagai pendingin ruangan alami, mengurangi konsentrasi polusi udara sehingga mengurangi tagihan listrik penduduk kota.

Kebijakan energi nasional Kebijakan Energi Nasional memberi panduan strategis terkait penggunaan energi baru dan terbarukan yang didapat dari hutan. Kebijakan tersebut bermaksud meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan dalam konsumsi energi nasional sehingga mencapai 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050. Di antaranya, program edukasi tentang penggunaan biomasa secara berkelanjutan, terutama dari kayu, dibutuhkan untuk mencapai target-target tersebut.

Dengan teknologi yang tepat, hutan merupakan sumber energi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan ekonomis. Dari perspektif ekonomi, kayu lebih murah dari pada bahan bakar lain. Bagi lingkungan, penggunaan kayu yang berkelanjutan juga bermanfaat dalam menjaga iklim dunia. Lebih dari itu, hutan bisa menjadi sumber pendapatan bagi komunitas yang tinggal di hutan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan sebuah program bioenergi, di mana kayu bakar sangat penting bagi ekonomi masyarakat desa. Sebuah contoh dalam mendukung inisiatif penduduk setempat dalam penggunaan energi baru dan terbarukan, dan kolaborasi yang efektif antara program pemerintah dengan penduduk setempat. Peran hutan Indonesia berubah dari sumber energi kunci menjadi sarana mitigasi perubahan iklim, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia.

Hutan memiliki kapasitas yang besar untuk menyerap dan

menyimpan energi, pengelolaan hutan secara lestari merupakan hal yang amat penting. Mengelola hutan secara berkelanjutan akan membantu Indonesia mencapai target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal*), khususnya dalam meningkatkan pasokan energi baru dan terbarukan pada tahun 2030.

Kerja sama diantara pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai target-target pembangunan, sekaligus memastikan hutan-hutan Indonesia tetap menjadi sumber utama energi baru dan terbarukan untuk masyarakat di pedesaan dan sebagai penyimpan karbon yang memberikan manfaat terhadap iklim global dan kesehatan dari generasi mendatang.

5. Kebijakan Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia sebanding dan sejalan dengan penurunan kualitas penduduk. Dalam bidang lingkungan hidup timbul kesadaran dari pihak pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat itu sendiri untuk bersama-sama berupaya melindungi sumber daya alam yang masih ada serta memperbaiki lingkungan yang sudah rusak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 merupakan landasan untuk berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup. Selain ketentuan perundang-undangan, kemampuan kelembagaan dalam menangani masalah lingkungan hidup juga ditingkatkan, yang melingkupi peningkatan kemampuan manajemen aparatur, penyediaan sarana yang memadai, pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum, peraturan perundang-undangan, dan koordinasi antara sektor dan antar daerah dalam upaya pengelolaan sumber daya alam.

Di samping itu peran aktif masyarakat juga ditingkatkan dengan melibatkan organisasi keagamaan, sosial, adat pemuda, wanita, pelajar baik formal maupun non formal yang berada di pedesaan maupun perkotaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan membina

pengetahuan serta kemampuannya sehingga peran serta lembaga masyarakat akan lebih efektif. Upaya penataan lingkungan hidup itu sekaligus diikuti dengan upaya peningkatan kualitas penduduk (aparatur dan masyarakat).

Kesadaran “universal” akan pentingnya lingkungan hidup pertama kali dibicarakan dalam konferensi Lingkungan Hidup Sedunia I di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 1972. Konferensi ini dapat dianggap sebagai pengejawantahan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya kerja sama penanganan masalah lingkungan hidup dan sekaligus menjadi titik awal pertemuan berikutnya yang membicarakan masalah pembangunan dan lingkungan hidup. Konferensi Stockholm dengan motto Hanya Satu Bumi itu menghasilkan deklarasi dan rekomendasi yang dapat dikelompokkan menjadi lima bidang utama yaitu permukiman, pengelolaan sumber daya alam, pencemaran, pendidikan dan pembangunan.

Deklarasi Stockholm menyerukan perlunya komitmen, pandangan dan prinsip bersama bangsa-bangsa di dunia untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup umat manusia. Konsep lingkungan hidup manusia yang diperkenalkan menekankan perlunya langkah-langkah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan yang diderita sebagian besar manusia di negara berkembang.

Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatkan seluruh pemerintah di dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang bagi penyelamatan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan pertimbangan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, Konferensi Stockholm mengkaji ulang pola pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola

konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata ekonomi internasional.

Lingkungan hidup dan kualitas penduduk adalah matarantai ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya saling membutuhkan, melengkapi, menyempurnakan. Merusak yang satu akan berakibat fatal pada yang lainnya. Hal ini berarti, jika kualitas penduduk ditingkatkan maka dapat dipastikan kualitas lingkungan akan terjamin. Sebaliknya, jika kualitas penduduk diabaikan maka akan berakibat fatal pada lingkungan secara keseluruhan.

G. Rangkuman

1. Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Dunia. Pertumbuhan penduduk Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan. Pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan negatif. Dampak positif dari besarnya jumlah penduduk antara lain sebagai penyediaan tenaga kerja yang melimpah, potensi pemasaran produk, dan pertahanan Negara. Sedangkan dampak negatif dapat menimbulkan kerawanan Sosial, berkurangnya daya dukung lingkungan, pendidikan rendah, dan lapangan pekerjaan yang terbatas. Strategi penanggulangan pertumbuhan penduduk melalui berbagai program salah satunya program Keluarga Berencana.
2. Remaja dan orang muda dua istilah dalam kelompok penduduk yang sama. Remaja itu disebut orang muda demikian juga orang muda masuk dalam kelompok remaja. Batasan usia orang muda yang digunakan oleh BKKBN menggunakan usia 12-24 tahun sebagai "*Adolescent and Youth*", atau pada usia 10-24 tahun yang lebih rendah lagi untuk menyebut "Kaum Muda". Hasil sensus penduduk tahun 2010 mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai

237,6 juta jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut diantaranya 53,4 juta kelompok muda dan akan meningkat lagi menjadi 59 juta jiwa pada tahun 2025. Berbagai tantang dan peluang bagi penduduk usia muda harus diantisipasi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Penduduk usia produktif seringkali dihubungkan dengan Bonus demografi. Bonus demografi adalah angka beban ketergantungan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif paling rendah. Dengan arti kata setiap penduduk usia kerja menanggung sedikit penduduk usia tidak produktif. Bonus demografi ini dapat bermanfaat apabila penduduk usia produktif memiliki kemampuan dan kesempatan dalam pekerjaan. Apabila bonus demografi ini tidak dapat dimanfaatkan oleh negara maka akan terjadi dampak negatif dari bonus demografi berbalik menjadi “Bencana Demografi”. Untuk mengantisipasi bertambahnya penduduk usia produktif sebagai Bonus Demografi perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi kebutuhan mereka.
4. Usia lanjut adalah penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun keatas. Lansia termasuk dalam kategori penduduk rentan dilihat dari segi kemunduran fisik, psikologis, sosial, ekonomi dan kesehatan. Pertambahan penduduk usia lanjut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekaligus sebagai tantangan dalam pembangunan nasional. Peningkatan jumlah lansia merupakan dampak dari peningkatan usia harapan hidup. Tantangan peningkatan jumlah lansia akan menimbulkan permasalahan sosial. Program yang terkait dengan pemberdayaan lansia antara lain: Program Jaminan Sosial Lanjut Usia (PJSLU); Usaha Ekonomi Produktif (UEP); Program Pendampingan dan Perawatan Lansia di Rumah (*Home Care*); Posyandu Lansia; Puskesmas Lansia; dan Bina Keluarga Lansia.

5. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Membicarakan lingkungan dan lingkungan hidup berkaitan dengan istilah kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Untuk menciptakan lingkungan ramah penduduk perlu mengendalikan kerusakan maupun pencemaran lingkungan dari mulai lingkaran terkecil hunian rumah tangga hingga lingkungan hutan sebagai ekosistem.

H. PENDALAMAN MATERI 2 LIMA ISU KEPENDUDUKAN

Jawablah pertanyaan dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari pilihan A, B, C, D, atau E dengan memberi tanda (X) di bawah ini:

1. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 (dalam jutaan jiwa) adalah:
 - A. 119,2 juta jiwa
 - B. 146,9 juta jiwa
 - C. 178,6 juta jiwa
 - D. 205,1 juta jiwa
 - E. 237,6 juta jiwa
2. Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia pemerintah melaksanakan program yaitu:
 - A. Transmigrasi
 - B. Keluarga Berencana
 - C. Urbanisasi
 - D. Aborsi
 - E. Translokasi

3. Batasan usia penduduk muda yang digunakan oleh BKKBN sebagai "*Adolescent and Youth*" pada usia:
 - A. 10-24 tahun
 - B. 12-24 tahun
 - C. 15-24 tahun
 - D. 18-24 tahun
 - E. 20-24 tahun
4. Persoalan remaja dan orang muda yang harus menjadi perhatian semua pihak antara lain:
 - A. Remaja pengguna Narkoba
 - B. Pernikahan anak di bawah umur
 - C. Drop-out sekolah dan pengangguran muda
 - D. Perokok usia anak
 - E. Jawaban A, B, C, dan D, Semua benar
5. Penduduk usia produktif seringkali dihubungkan dengan Bonus demografi, apa artinya:
 - A. Beban ketergantungan lebih besar dibanding usia produktif
 - B. Beban ketergantungan sama besar dibanding usia produktif
 - C. Beban ketergantungan lebih kecil dibanding usia produktif
 - D. Beban ketergantungan lebih kecil dibanding usia tidak produktif
 - E. Beban ketergantungan sama kecil dibanding usia tidak produktif
6. Adanya bonus demografi harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencegah yang disebut "bencana demografi" maka harus dipersiapkan:
 - A. Sarana pendidikan yang memadai
 - B. Lapangan pekerjaan yang luas
 - C. Perlindungan terhadap tenaga kerja
 - D. Keterampilan sesuai kompetensi
 - E. Jawaban A, B, C, dan D, semua benar

7. Batasan usia lanjut yang dinyatakan di dalam undang-undang tentang kesejahteraan usia lanjut yaitu:
 - A. 50 tahun lebih
 - B. 55 tahun lebih
 - C. 60 tahun lebih
 - D. 65 tahun lebih
 - E. 70 tahun lebih

8. Beberapa persoalan usia lanjut yang dihadapi oleh bangsa Indonesia antara lain:
 - A. Partisipasi kerja lansia
 - B. Jumlah buta huruf lansia
 - C. Tingkat kesenjangan lansia
 - D. Kebutuhan fisik dan kesehatan lansia
 - E. Jawab A, B, C, dan D Semua benar

9. Lingkungan dan penduduk merupakan dua entitas yang sinergi untuk mewujudkan lingkungan ramah penduduk sebaiknya:
 - A. Melakukan pembalakkan hutan tanpa batas
 - B. Membuang sampah ke sungai
 - C. Membiarkan lingkungan tercemar
 - D. Membuat bangunan tanpa halaman
 - E. Jawabam A, B, C, dan D, semua tidak benar

10. Lingkungan ramah penduduk dalam skala kecil dapat diwujudkan oleh setiap rumah tangga melakukan:
 - A. Membuang sampah pada tempatnya
 - B. Menanam pohon disekitar rumah hunian
 - C. Memperbaiki lingkungan sekitar yang rusak
 - D. Membersihkan lingkungan yang tercemar
 - E. Jawaban A, B, C, dan D benar

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban singkat!

1. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia sangat cepat?
2. Pertumbuhan penduduk usia remaja dan orang muda di Indonesia semakin besar dapat menjadi peluang dan sekaligus tantangan. Sebutkan peluang dan tantangannya.
3. Apa yang dimaksud dengan bonus demografi dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh pemerintah dalam menghadapi bonus demografi?
4. Keberadaan penduduk lanjut usia di Indonesia tidak bisa dihindari sebagai dampak perubahan demografi karenanya perlu disiapkan layanan program. Sebutkan beberapa layanan program lansia yang diperlukan?
5. Program lingkungan ramah penduduk dapat dimulai keserasiannya antara hutan lingkungan sekitarnya dengan penduduk. Bagaimana peran penduduk rumah tangga untuk memulainya?

I. KUNCI JAWABAN MATERI 2 LIMA ISU KEPENDUDUKAN

1. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 (dalam jutaan jiwa) adalah:
E. 237,6 juta jiwa
2. Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia pemerintah melaksanakan program yaitu:
B. Keluarga Berencana
3. Batasan usia penduduk muda yang digunakan oleh BKKBN sebagai "*Adolescent and Youth*" pada usia:
A. 10-24 tahun

4. Persoalan remaja dan orang muda yang harus menjadi perhatian semua pihak antara lain:
E. Jawaban A, B, C, dan D, Semua benar
5. Penduduk usia produktif seringkali dihubungkan dengan Bonus demografi, apa artinya:
C. Beban ketergantungan lebih kecil dibanding usia produktif
6. Adanya bonus demografi harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencegah yang disebut “bencana demografi” maka harus dipersiapkan:
E. Jawaban A, B, C, dan D, semua benar
7. Batasan usia lanjut yang dinyatakan di dalam undang-undang tentang kesejahteraan usia lanjut yaitu:
C. 60 tahun lebih
8. Beberapa persoalan usia lanjut yang dihadapi oleh bangsa Indonesia antara lain:
E. Jawab A, B, C, dan D, Semua benar
9. Lingkungan dan penduduk merupakan dua entitas yang sinergi untuk mewujudkan lingkungan ramah penduduk sebaiknya:
E. Jawab A, B, C, dan D, semua tidak benar
10. Lingkungan ramah penduduk dalam skala kecil dapat diwujudkan oleh setiap rumah tangga dengan melakukan:
E. Jawaban A, B, C, dan D, semua benar

SUBBAHASAN
PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA BERKARAKTER KEBANGSAAN

3

PENDUDUK BERKARAKTER KEBANGSAAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kependudukan ini peserta diklat dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan kembali materi PENDUDUK BERKARAKTER KEBANGSAAN yang meliputi: (1) Konsep Revolusi Mental; (2) Revolusi Mental Berbasis Pancasila; (3) Prioritas Revolusi Mental; (4) Kewarganegaraan dan Bela Negara.

A. Pendahuluan

Karakter atau watak adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. “Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

B. Konsep Revolusi Mental

1. Pengertian Revolusi Mental

Istilah revolusi dalam kamus besar Indonesia didefinisikan sebagai (1) perubahan ketatanegaraan, pemerintahan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan kekerasan seperti dengan perlawanan bersenjata; (2) perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang.

Kingsley Davis menafsirkan revolusi sebagai perubahan sosial yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Selo Soemardjan mendefinisikan revolusi sebagai setiap perubahan dalam lembaga-lembaga sosial di masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat.

Pengertian revolusi kemudian sangat populer dengan terjadinya gerakan politik di Amerika yang terkenal dengan Revolusi Amerika 1776, dan setelah itu Revolusi Perancis 1789, Revolusi 1848 dengan *Communist Manifesto* yang kemudian disusul gerakan komunis berskala dunia, revolusi mengandung makna ekstrem dan kekerasan.



Perubahan yang cepat dalam suatu tatanan bukanlah hal yang esensial dari suatu revolusi dan tidak mesti dilalui dengan kekerasan. Revolusi Kapitalis di Eropa menunjukkan revolusi nir-kekerasan dan membutuhkan waktu yang lama. Yang menjadi hal pokok dalam revolusi adalah adanya “kebaruan”. Revolusi adalah transformasi kehidupan yang mengandung kebaruan dalam struktur mental dan keyakinan yang membawa perubahan mendasar pada basis material, super struktur kebudayaan dan politik sebagai agen perantara dalam perubahan.

Istilah mental berasal dari kata latin “mens” (mentis) yang berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Mental dapat diartikan sebagai suasana kejiwaan dan pola pikir (*mindset*) seseorang atau sekelompok orang. Revolusi mental dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang cepat pada sikap dan mental.

Revolusi Pancasila diartikan sebagai suatu ikhtiar perubahan mendasar pada sistem sosial meliputi ranah material, mental, politikal berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila, dalam usaha mewujudkan perikehidupan dan kewarganegaraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual). Atas dasar

pertimbangan ini, Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah menandatangani Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dalam Kepres tersebut dinyatakan bahwa:

- PERTAMA : Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.
- KEDUA : Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional.
- KETIGA : Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.



2. Tujuan Revolusi Mental

Revolusi mental diperlukan bangsa Indonesia ini untuk menghilangkan warisan kolonialisme yang masih menyeliputi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rasa tidak percaya diri, jiwa mengabdikan, sikap “nerimo”, mental korupsi, mengagumi bangsa

lain masih melekat dalam kepribadian masyarakat Indonesia. Revolusi mental perlu diupayakan dengan tujuan untuk:

- a. Mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
- b. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern dengan fondasi tiga pilar Trisakti.
- c. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, dan berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul menerapkan nilai-nilai integritas, kerja keras/etos kerja, dan semangat gotong royong.

Upaya pencapaian tujuan tersebut harus memenuhi delapan Prinsip Revolusi Mental, yaitu:

- a. Bukan proyek tapi gerakan sosial;
- b. Ada tekad politik untuk menjamin kesungguhan pemerintah;
- c. Harus bersifat lintas-sektoral, tidak boleh diserahkan pada kementerian tertentu;
- d. Bersifat partisipatoris (kolaborasi pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat dan akademisi);
- e. Diawali program pemicu (value attack);
- f. Desain program harus ramah pengguna (User Friendly), populer, menjadi bagian dari gaya hidup dan Sistemik-Holistik;
- g. Nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan sosial (moralitas publik);
- h. Dapat diukur dampaknya.

Dengan melakukan revolusi mental maka tujuan Negara yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewarganegaraan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur diharapkan segera dapat tercapai.

3. Sasaran Revolusi Mental

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan pesan bahwa ada tiga sasaran dalam revolusi mental yang akan diterapkan ke semua birokrasi dalam pemerintahan, yakni:

- a. Merubah *mindset* cara berpikir dan cara pandang. Era birokrasi priyayi sudah selesai, kita sudah harus masuk ke dalam era birokrat yang melayani rakyat. Salah satu cara meng-impelementasikannya adalah dalam (*public service*) pelayanan publik. Bahwa aparatur sipil negara sebagai representasi dari pemerintahan, hadir setiap rakyat membutuhkan mereka.
- b. Merubah strukur organisasi agar ramping, efisien, tidak boleh gemuk, dan tidak boleh ada organisasi-organisasi dalam pemerintahan yang menduplikasi fungsi. Dengan struktur yang ramping, maka tata-kelola akan lebih sehat.
- c. Merubah kultur dan budaya kerja yang lebih disiplin, bertanggung jawab, mengedepankan kebersamaan dan gotong royong.

4. Nilai Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong

Revolusi Mental membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Sebagai Gerakan Kolektif, Revolusi Mental melibatkan seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan pranata sosial-budaya yang ada di masyarakat, yang dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, insititusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial meliputi integritas, semangat kerja (etos kerja) dan memiliki sikap gotong royong, dan berorientasi pada pelayanan publik dan kemaslahatan umum.

a. Integritas

Integritas berasal dari bahasa Perancis *intégrité* atau Latin integritas, yang memiliki akar kata integer, yang berarti utuh, menyatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran.

Integritas berarti perkataan menjadi satu dengan perbuatan. Hal ini harus dimaknai sebagai apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa diperbuat, berkata dan berlaku jujur, dapat dipercaya, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral dan etika. Adapun perilaku yang menunjukkan Integritas antara lain: jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak munafik.

Pada tataran kolektif nilai integritas dapat memandu masyarakat untuk menampilkan komitmen pada apa yang menjadi tugasnya serta dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Ditataran Negara, nilai ini dapat dipercaya mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja secara profesional, transparan, jujur dapat diandalkan dan terpercaya. Dengan nilai ini kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara dapat meningkat, karena masyarakat percaya bahwa aspirasinya dijalankan dengan baik.

b. Etos kerja

Etos berasal dari bahasa Latin modern, Yunani *ethos*, yang berarti karakter asli, karakteristik bawaan, yang membedakan seseorang atau kelompok dari yang lain. Menurut KBBI, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial, sementara etos kerja berarti semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.

Etos kerja dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis dan selalu mencari cara-cara yang produktif dan inovatif. Setidaknya ada 6 nilai yang terkandung di dalam Etos Kerja yakni: semangat, mandiri, memiliki daya saing, optimis, inovatif, dan produktif.

c. Gotong royong

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gotong royong berarti bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu). Makna nilai gotong royong mirip dengan nilai kerja sama, yang merupakan salah satu nilai yang dianut BKKBN. Dengan menerapkan gotong royong, berarti kita dapat meninggalkan mentalitas *silo*, kondisi di mana salah satu atau banyak bagian organisasi bekerja secara terpisah dari yang lain. Dengan bergotong royong, kita akan dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi.

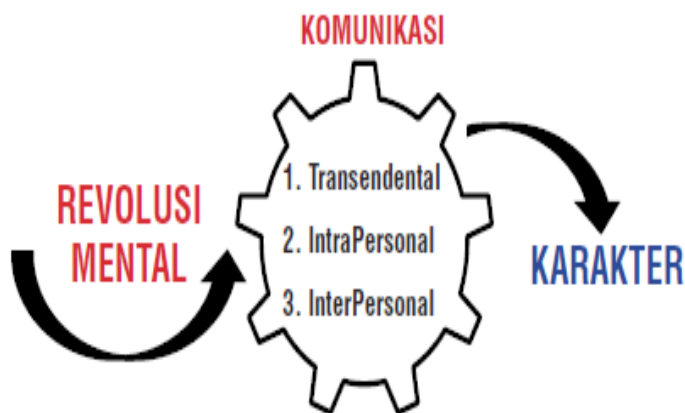
Gotong royong dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan cepat, efektif, dan efisien. Gotong royong sebagai usaha bersama yang ditempuh dengan cara saling bahu-membahu demi kepentingan bersama dan kebahagiaan bersama. Gotong royong melibatkan kesadaran setiap lapisan masyarakat, dimulai dari diri sendiri hingga pada level pemerintahan dan bangsa Indonesia.

Semangat solidaritas mendorong kerjasama antar individu dan antar kelompok. Ketika solidaritas telah terbentuk, maka kepentingan

individu atau sekelompok masyarakat dapat dikesampingkan terlebih dahulu untuk kepentingan bersama. Kekuatan-kekuatan dan sumber daya yang dimiliki setiap orang diberikan dalam semangat kebersamaan sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas. Semangat gotong royong merupakan aksi kolektif masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial serta jejaring sosial. Nilai Gotong Royong dapat dilaksanakan melalui kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan.

5. Komunikasi dalam Revolusi Mental

Revolusi Mental sebagai sebuah gerakan mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku, revolusi mental adalah sebuah GERAKAN HIDUP BARU yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan agar Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa di dunia. Proses yang harus dilalui untuk menuju kepribadian/karakter yang tangguh/baik melalui proses komunikasi. Ada tiga komunikasi yang perlu dibangun yakni: (1) komunikasi transendental, (2) intrapersonal; dan (3) interpersonal.



Manusia Indonesia adalah manusia berketuhanan (Sila Ke-1), meyakini bahwa keberadaan manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita hanya sebagai makhluk ciptaanNya dan seharusnya sebagai makhluk menghambakan dirinya kepada Sang Pencipta, bukan yang lain. Kewajibannya adalah mentaati dan menjalankan apa yang mejadi perintah-Nya dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Setiap orang tidak boleh menyakiti orang lain, harus berbuat jujur, berkelakuan baik dan akhirnya akan menemukan salah satu dari dua tempat, yakni syurga atau neraka. Bentuk komunikasi inilah sebagai komunikasi transendental yang bila dikembangkan akan menjadikan manusia yang memiliki integritas.

Komunkasi intrapersonal, adalah komunikasi dengan diri sendiri, merenung, tafakur, bertanya kepada diri sendiri dengan melakukan introspeksi diri. Bahwa kita adalah lahir dari orang tua yang hidup di Nusantara, hidup bersama penghuni-penghuni Nusantara, untuk mengelola bumi Nusantara menuju kemakmuran rakyat, kesejahteraan bangsa, kejayaan Nusantara, dan pada akhirnya juga kembali kepangkuan ibu pertiwi Nusantara. Pengembangan komunikasi intrapersonal ini akan menumbuhkan rasa kemanusiaan (Sila Ke-2), dan memiliki semangat yang tinggi (etos kerja) untuk meraih kejayaan Nusantara.

Manusia Indonesia mempercayai bahwa manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, hidup berkelompok, bersuku, berbangsa. Dari konsekuensi hidup berkumpul, disinsyafi (melakukan kerjasama/permufakatan dengan adanya saling pengertian), bahwa dibalik itu ada keberagaman pemikiran, perbedaan keinginan, ke-bhinekaan budaya yang harus disatukan untuk menuju satu tujuan yang diinginkan. Disinilah kecerdikan para pendiri bangsa mencantumkan sila Persatuan Indonesia sebagai pijakan bernegara. Komunikasi interpersonal dikembangkan akan menumbuhkan rasa kekeluargaan, persatuan, dan semangat gotong royong untuk menjadikan golongan, suku, bangsa Indonesia menjadi maju, kuat dan disegani oleh bangsa lain.

Implementasi ketiga komunikasi ini harus didasari oleh nilai-nilai dari ke-tiga sila tersebut akan menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki integritas, semangat kerja yang tinggi, semangat gotong royong dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila Ke-5). Penyampaian pendapat, keinginan, terjadinya silang pendapat disampaikan secara santun melalui musyawarah untuk mendapatkan mufakat (Sila Ke-4).

6. Sifat Manusia Indonesia

Menurut Mochtar Lubis, terdapat 12 sifat manusia Indonesia dalam bertindak dan berperilaku, yaitu:

- a. Hipokrit alias Munafik: Hal ini bisa dibuktikan bahwa banyak sekali, terutama para pejabat Indonesia yang munafik. Dibuktikan dengan tidak sesuainya perkataan diawal dengan dikemudian hari, adanya banyak kasus yang menyebutkan bahwa ternyata perbuatan mereka bejat, tidak sesuai dengan tampilan.
- b. Segan dan Enggan Bertanggung Jawab: “Bukan saya”, adalah kalimat yang cukup populer di mulut manusia Indonesia. Ini bukti adanya tidak kebertanggung-jawaban Manusia Indonesia.
- c. Berjiwa Feodal: Mereka yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan harus dihormati oleh yang dikuasai, yang kecil dan tanpa kekuasaan harus mengabdikan kepada yang besar, bahkan kepada keluarganya.
- d. Percaya Takhayul: Dulu, dan sampai sekarang, masih ada yang demikian. Contoh kongkritnya adalah Ahmad Ponari dan membawa air kemakam untuk diminum sendiri.
- e. Artistik: Ciri ini selalu memperlihatkan sesuatu yang indah, baik, bagus serta mempesonakan untuk dipandang. Ciri ini datang dari sikap manusia Indonesia yang ramah dan menyenangkan orang lain.
- f. Watak yang Lemah: Lemahnya watak orang Indonesia dapat

dilihat dari mulai tergerusnya (terhancurkan sedikit demi sedikit) budaya sendiri dan terganti dengan budaya lain.

- g. Tidak Hemat: Kekayaan Ahmad Fathanah yang diberikan kepada beberapa perempuan adalah bukti kuat hal ini. Dan kebanyakan orang Indonesia akan berhutang terlebih dahulu dan akan dibayarkan dengan sesuatu yang sudah pasti didapatkan dikemudian hari.
- h. Lebih suka tidak bekerja keras, kecuali kalau terpaksa: Artis instan pejabat instan dan lain sebagainya sudah terbiasa dalam negeri ini. Artinya, manusia Indonesia menginginkan sesuatu yang instan, tanpa melalui proses panjang.
- i. Manusia Indonesia Tukang Menggerutu/Berani Berbicara di belakang: Dan menggerutunya ini ketika dibelakang orang tersebut. Tidak berani didepannya.
- j. Cepat Cemburu dan Dengki: Sifat inilah yang mungkin membuat bangsa ini tetap terpuruk. Karena ketika ada manusia yang lebih dan partai yang lebih baik maka akan dihancurkan lewat berbagai cara.
- k. Manusia yang Sok: Punya sedikit saja peningkatan hidup dari sebelumnya, maka akan pamer ke tetangganya.
- l. Manusia Plagiat: Hilangnya kebudayaan dan kepribadian Nasional Indonesia disebabkan oleh pribadi manusia Indonesia yang mudah meniru.

C. Revolusi Mental Berbasis Pancasila

1. Gagasan Revolusi Mental

Membicarakan revolusi mental tidak terlepas dari gagasan besar pendiri bangsa ini yaitu Ir. Soekarno yang tidak puas dengan kondisi bangsa saat itu agar dapat secara cepat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Gerakan Revolusi mental ini berangkat dari anggapan bahwa dengan mengubah mentalitas akan menimbulkan perubahan perilaku; perilaku yang terus berulang-ulang akan menjadi kebiasaan; sedangkan kebiasaan yang terus dilakukan akan membentuk sebuah karakter. Gerakan revolusi mental tidak hanya berhenti pada perubahan pola pikir dan sikap kejiwaan saja, tetapi juga konsekuensi turunannya dalam bentuk perubahan kebiasaan serta pembentukan karakter yang menyatukan antara pikiran, sikap dan tindakan sebagai suatu integritas.

Para pendiri bangsa menyadari benar bahwa perjuangan kemerdekaan masih jauh dari tuntas. Proklamasi kemerdekaan hanyalah jembatan emas untuk meraih kemerdekaan sejati. Sebagai jembatan emas, proklamasi kemerdekaan hanyalah titik keberangkatan untuk meraih cita-cita masyarakat adil dan makmur, melalui serangkaian perjuangan secara persisten (*istiqomah*). Pokok-pokok ajaran Soekarno dalam revolusi mental yang dianggap masih relevan saat ini adalah perlunya *investment*, yaitu: (1) *investment of human skill*; (2) *material investment*; dan (3) *mental investment*.”

Investasi keterampilan dan material amat penting. Akan tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah investasi mental. Investasi keterampilan dan material tidak bisa menjadi dasar persatuan dan kemakmuran bersama tanpa didasari investasi mental. Tanpa kekayaan mental, upaya-upaya pemupukan keterampilan dan material hanya akan melanggengkan perbudakan.

Perlunya program “*Nation and Character Building*” dalam membangun masyarakat Indonesia. Dalam pandangannya, Indonesia adalah bangsa besar, namun seringkali memberi nilai terlalu rendah pada bangsanya alias bermental kecil; masih belum terbebas dari mentalitas kaum terjajah yang sering mengidap perasaan rendah diri (*minderwaardigheidscomplex*). Hal ini sebagai akibat penjajahan dan feodalisme selama ratusan tahun, terbentuklah karakter rakyat yang disebut “abdikrat”, meminjam istilah dari Verhaar dalam bukunya *Identitas Manusia*.

Akibatnya, terbentuklah mentalitas pecundang dengan penuh perasaan tak berdaya dan tidak memiliki kepercayaan diri atau *self-confidence*. Memasuki alam kemerdekaan, menyerukan agar watak demikian harus dikikis habis. Rakyat harus berjiwa merdeka, berani berkata “ini dadaku, mana dadamu”; berani mandiri dan menghargai diri sendiri. Dalam kaitannya dengan dinamika perkembangan global, mengingatkan tentang munculnya berbagai peluang dan ancaman yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Namun demikian peluang-peluang baru yang didorong oleh perkembangan teknologi tersebut bisa membawa musibah bagi kemanusiaan sekiranya tidak dibarengi prasyarat-prasyarat mental dan moral.

Bangsa Indonesia harus memerangi dirinya sendiri sehubungan dengan kecenderungan menurunnya kesadaran nasional dan menurunnya kekuatan jiwa nasional. Selain itu, ia juga menyesalkan pudarnya jiwa kerakyatan dari para pemimpin. Akibat itu semua bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensional. Meski demikian, perlunya merawat optimisme. Untuk bisa keluar dari berbagai krisis tersebut, perlunya Revolusi Mental untuk segala bentuk penyelewengan.

Gerakan Hidup Baru perlu dibangkitkan dengan tujuan untuk melaksanakan revolusi mental sebagai persiapan membangun masyarakat yang dicita-citakan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945. Sedangkan isi dari Gerakan Hidup Baru adalah: Perombakan cara pandang, cara berfikir, cara kerja, cara hidup yang merintangi kemajuan dalam rangka mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, memiliki kepribadian yang berbudaya. Tujuan ini dapat ditempuh dengan melakukan revolusi mental, yakni “menggempleng manusia Indonesia ini menjadi manusia Baru, yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala”.

Gerakan Hidup Baru tidak bertahan lama karena krisis yang berkepanjangan dalam dunia politik. Dalam perkembangan lebih lanjut, pembangunan yang dijalankan terlalu menekankan pembangunan

raga dengan mengabaikan pembangunan jiwa. Perubahan-perubahan besar dan massif dalam penampilan fisik-material tidak diikuti oleh perubahan mendasar pada struktur-struktur mentalitas. Pada relung terdalam kejiwaan bangsa ini masih bercokol mentalitas feodalistis yang menghisap ke bawah, tapi mudah bermetamorfosis menjadi mentalitas budak di hadapan tuan-tuan agung. Mentalitas budak menjadikan bangsa ini mudah mengekor bangsa lain; saat yang sama sulit menghargai kelebihan dan kemenangan sesama bangsanya sendiri.

Lemahnya mentalitas kedaulatan membuat politik negeri ini tak leluasa mengembangkan pilihan sistem dan kebijakan politik sendiri. Keluar, kewibawaan Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional kian memudar. Kedalam, pilihan-pilihan pembangunan tidak lagi ditentukan oleh apa yang disebut Tan Malaka sebagai “kemauan, pelor, atau bambu runcingnya rakyat Indonesia sendiri”. Tanpa kedaulatan mengembangkan sistem pemerintahan sendiri, demokrasi padat modal membuat pilihan-pilihan politik kerap dimenangkan kepentingan korporasi, karena aspirasi rakyat tidak memilih sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri.

Lemahnya mentalitas kepribadian membuat kebudayaan bangsa ini tak memiliki jangkar karakter yang kuat. Tanpa kekuatan karakter, Indonesia adalah bangsa besar bermental kecil; bangsa besar yang mengidap perasaan rendah diri. Bangsa yang selalu melihat dunia luar sebagai pusat teladan, tanpa menyadari dan menghargai kelebihan-kelebihan bangsa sendiri. Tanpa kekuatan karakter, kita sulit menjadi pemenang dalam era persaingan global.

Untuk bisa bangkit dari keterpurukan, bangsa ini harus kembali ke trayek sejarah yang tercegat: melanjutkan revolusi mental. Inti dari revolusi mental ini adalah perubahan besar dalam struktur mental manusia Indonesia melalui proses *nation and character building*. Bangsa Indonesia harus berani berubah meninggalkan pola kolonial yang menyeret keterpurukan yang semakin dalam. Orang berani

bukan mereka yang tidak pernah merasa takut, tapi mereka yang bisa menaklukkan rasa takut itu. Berani menghargai diri sendiri, bangga terhadap bangsa sendiri.

1. Tiga Ranah Revolusi Mental

Untuk mengatasi krisis multidimensional yang melanda bangsa saat ini, imperatif Pancasila menghendaki adanya perubahan mendasar secara akseleratif, yang melibatkan revolusi material, mental-kultural dan politikal.

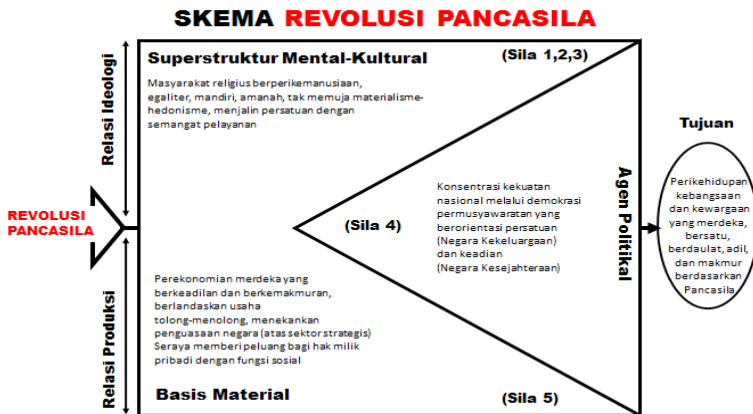
Revolusi (basis) material tidak menganut sistem kapitalis yang memberikan otoritas sepenuhnya kepada kepemilikan pribadi/swasta, dan bukan pula menganut sistem sosialis dimana peranan Negara sangat dominan mengabaikan hak-hak individu. Namun diarahkan untuk menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran; berlandaskan usaha tolong-menolong (gotong royong) dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta kekayaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial.

Revolusi (superstruktur) mental-kultural diarahkan untuk menciptakan masyarakat religius yang berprikemanusiaan, yang egaliter, mandiri, amanah dan terbebas dari berhala (pemujaan) materialisme-hedonisme; serta sanggup menjalin persatuan (gotong royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan).

Revolusi (agensi) politikal diarahkan untuk menciptakan agen perubahan dalam bentuk integrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan (negara kekeluargaan) dan keadilan (negara kesejahteraan); dengan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan.

Ketiga ranah revolusi itu bisa dibedakan tapi tak dapat dipisahkan. Satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno, revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia bisa berdikari (mandiri) dalam perekonomian, revolusi mental, agar bangsa Indonesia bisa berkepribadian dalam kebudayaan; revolusi politik, agar bangsa Indonesia bisa berdaulat dalam politik.

Secara sendiri-sendiri dan secara simultan ketiga ranah revolusi itu diarahkan untuk mencapai tujuan Revolusi Pancasila: mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual). Revolusi material dan mental memerlukan dukungan kelembagaan dan kepemimpinan politik sebagai agen perubahan yang kuat melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan dan keadilan.



Sumber: Yudi Latif, 2015, *Revolusi Pancasila*.

Pembangunan mental karakter ini harus mempertautkan antara proses membentuk pribadi yang bermental karakter baik dengan kolektivitas bangsa yang bermental karakter baik pula. Bahwa kebaikan dan kekuatan mental karakter individual hanya

bisa memperoleh kepenuhan manfaatnya jika terintegrasi ke dalam kebaikan dan kekuatan mental karakter bangsa secara kolektif.

2. Mental Pancasila

Sebagai dasar dan haluan pembangunan mental-karakter ini adalah nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ke-1, ke-2, dan ke-3. Menurut pandangan hidup Pancasila, keberadaan manusia ada yang diciptakan oleh cinta kasih Sang Maha Pencipta. Dihadapan Sang Maha Pencipta, semua manusia sederajat, yang melahirkan semangat mental egalitarianisme. Setiap pribadi dimuliakan Sang Pencipta dengan bawaan hak asasi yang tidak bisa dirampas, seperti hak hidup, hak milik dan kehormatan (*dignitas*), dengan kedudukan yang sama di depan hukum.

Penghormatan terhadap eksistensi individu dan hak asasinya tidak berarti harus mengarah kepada individualisme. Individualisme memandang bahwa manusia secara perseorangan merupakan unit dasar dari seluruh pengalaman manusia. Postulat dasar dari individualisme adalah otonomi indenpenden dari setiap pribadi. Ungkapan yang sangat terkenal dari individualisme menyatakan: "Kamu datang ke dunia seorang diri, dan meninggalkan dunia seorang diri". Meski kenyataan tidak ada seorangpun yang lahir di dunia sendirian. Selalu ada Ibu dan budaya komunitas yang menyertainya, bahkan mengantarnya hingga ke "tempat peristirahatan terakhir".

Apa yang menjadi karakteristik dan individualisme adalah keyakinan implisit bahwa relasi sosial bukanlah pembentukan perseorangan dalam pengalamannya yang paling fundamental. Dengan kata lain, perseorangan tidak dipandang sebagai produk relasi-relasi sosial. Relasi sosial adalah sesuatu yang terjadi pada individu ketimbang sesuatu yang mendefinisikan identitas dan mengkoordinasikan eksistensi individu. Individu tidaklah dibentuk dan diubah secara fundamental oleh relasi sosial, dan oleh karena itu tetap sebagai pribadi yang otonom indenpenden.

Berbeda dengan individualisme, Pancasila memandang, bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya, setiap pribadi manusia tidaklah bisa berdiri sendiri terkucil dari keberadaan yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua manusia, kecuali mereka yang hidup di bawah keadaan yang luar biasa, tergantung dari bentuk-bentuk kerjasama dan kalaborasi dengan sesama yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya.

Tanpa kehadiran yang lain, manusia tidak akan pernah menjadi manusia sepenuhnya. Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhan yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu, selain menjadi manusia yang baik, manusia harus membentuk kolektivitas yang baik. Setiap individu mengembangkan rasa kasih sayang, saling menghargai, saling mengerti, saling member, tolong menolong dalam bingkai memberikan rasa kemanusiaan.

Dalam kaitan ini, pengembangan mental-karakter harus berorientasi ganda: ke dalam dan ke luar. Ke dalam, pengembangan mental-karakter harus memberi wahana kepada setiap individu untuk mengenali siapa dirinya sebagai “perwujudan khusus” (*“diferensi”*) dari alam. Sebagai perwujudan khusus dari alam, setiap orang memiliki keistimewaan kecerdasannya masing-masing. Proses pengembangan mental - karakter harus membantu individu menemukan ke-khasan, potensi diri tersebut diharapkan dapat menempatkan dalam konteks keseimbangan dan keberlangsungan jagad besar.

Sedangkan keluar, pengembangan mental - karakter harus memberi wahana setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama, melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa dan olah raga. Kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter seseorang berkembang

menjadi lebih baik atau sebaliknya. Perilaku seseorang cerminan dari kelompok.

Sikap mental yang harus ditumbuhkan sebagai ekspresi kemerdekaan bangsa ini adalah mental kemandirian. Kemandirian tidaklah sama dengan kesendirian. Kemandirian adalah sikap mental yang bisa dan berani berfikir, bersikap dan bertindak secara berdaulat, bebas dari intervensi dan paksaan pihak-pihak lain. Menumbuhkan mental sendiri, selain mensyaratkan mental egaliter, juga meniscayakan adanya kecerdasan dan kreativitas berbasis pengembangan ilmu dan teknologi.

Kemandirian kolektif bangsa Indonesia juga bisa tumbuh persisten bila warga Indonesia bisa menunaikan kewajiban publiknya secara amanah, jujur dan bersih. Kolektivitas yang tidak disertai mentalitas kejujuran akan merobohkan kemandirian bangsa. Dalam suatu bangsa dimana korupsi merajalela, kedaulatan bangsa tersebut mudah jatuh ke dalam dikte-dikte bangsa lain.

Selain semangat-mental egaliter, mandiri dan amanah, manusia sebagai makhluk religius yang berperikemanusiaan juga harus membebaskan dirinya dari behala/ pemujaan materialisme dan hedonisme. Kegagalan proyek emansipasi revolusi Perancis yang melahirkan tirani kapitalis dan revolusi Rusia melahirkan tirani “nomenklatur” terjadi karena keduanya sama-sama terpenjara pemujaan terhadap materialisme.

Menurut pandangan hidup Pancasila, materi itu penting tetapi tidak untuk diberhalakan. Dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, materi itu bersifat relative yang tak dapat dimutlakkan. Dengan semangat ketuhanan yang berperikemanusiaan, materi sebagai hak milik itu memiliki fungsi sosial yang harus digunakan dengan semangat altruis (kepentingan orang lain).

Semangat altruis bangsa Indonesia sebagai makhluk sosial dapat mengembangkan pergaulan hidup kebangsaan yang ditandai oleh segala kemajemukannya dengan mentalitas persatuan – gotong

royong. Persatuan dikembangkan dengan menghargai perbedaan, keunikan individu maupun golongan. Untuk dapat menumbuhkan mentalitas persatuan dalam keberagaman/kebhinekaan diperlukan semangat mental pengorbanan dan pelayanan.

D. Prioritas Revolusi Mental

Sebagaimana perusahaan/organisasi yang merupakan sekumpulan orang dipersatukan untuk mencapai tujuan. Sekaitan dengan itu diperlukan suatu budaya yang efektif dalam pencapaian tujuan. Seperti halnya BKKBN budaya kerja difokuskan kepada “CETAK TEGAS”, yakni karyawan diharapkan memiliki ke-Cerdasan, ke-Tangguh-an, Kerjasama, Integritas dan memiliki ke-Ikhlas-an dalam melaksanakan tugas.

Dengan mempertimbangkan realitas hambatan mental yang ada serta idealitas nilai-nilai budaya ke-Indonesiaan, gagasan revolusi mental Pancasila bisa diprioritaskan pada tiga mentalitas inti sebagai sasaran utama. Kegiatan berkisar pada cita penguatan mentalitas-budaya kemandirian, mentalitas-budaya gotong royong, dan mentalitas-budaya pelayanan (“TRICITA REVOLUSI MENTAL”).

Pentingnya mentalitas-budaya “kemandirian” berangkat dari asumsi bahwa secara kultural, sebab utama yang membuat manusia Indonesia tidak berdikari dalam ekonomi, tidak berdaulat dalam politik dan tidak berkepribadian dalam kebudayaan adalah karena manusia-bangsa Indonesia secara umum tidak bisa mengenali dirinya, tidak menghargai dirinya, kurang percaya diri, lemah pendirian, lemah kepribadian, sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya. Jika disederhanakan, manusia Indonesia tidak punya mentalitas-kemandirian.

Karena tidak memiliki mentalitas kemandirian, perilaku manusia-bangsa Indonesia cenderung terperangkap dalam dua pilihan ekstrem: melakukan apa yang orang (bangsa) lain lakukan, yang mendorong

mentalitas konformis; atau melakukan apa yang diinginkan orang (bangsa) lain, yang menyuburkan mentalitas pecundang dan totalitarian.

Revolusi mental harus menumbuhkan mentalitas kemandirian agar manusia bangsa Indonesia bisa dan berani berfikir, bersikap dan bertindak secara berdaulat, bebas dari intervensi dan paksaan pihak-pihak lain; mampu mengenal diri, percaya diri, punya pendirian, dan dapat mengaktualisasikan potensi dirinya. Unsur-unsur yang terkait dengan kemandirian ini adalah egalitarianisme, percaya diri (berdiri, berkepribadian), aktualisasi keragaman kecerdasan (talenta) insane, kreativitas berbasis sains dan teknologi, dan produktivitas.

Pentingnya mentalitas-budaya “gotong-royong” berangkat dari asumsi bahwa nilai penting kualitas dan kepercayaan diri hanya menemukan kekenyamanan maknanya dalam jaringan kerjasama dengan yang lain. Setiap huruf alfabet, dari A sampai Z, merupakan satu karakter yang masing-masing sama pentingnya. Meski demikian, betapapun pentingnya keberadaan setiap karakter (huruf) itu, tidaklah bermakna apa-apa tanpa bersekutu dengan huruf-huruf lain dalam membentuk kata dan kalimat.

Dalam kemajemukan karakter masyarakat Indonesia, gotong-royong adalah nilai fundamental bangsa ini. Dalam realitas kehidupan bangsa, terutama politik, hari ini, praktik gotong royong masih berjalan, namun dalam konotasi toleransi negatif, “tolong menolong dalam kejahatan dan pengrusakan”. Gerakan revolusi mental harus menempatkan gotong-royong itu dalam konteks toleransi positif, “tolong menolong dalam kebaikan dan pembangunan.” Tolong menolong untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan. Semangat toleransi yang memadukan kemandirian dan kerjasama dalam menunaikan pelayanan publik dan kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab dan bermutu untuk kebaikan dan kemuliaan hidup bersama.

Revolusi mental harus merestorasi warisan budaya gotong

royong yang mulai pudar ini dengan mengembangkannya dalam pengertian yang lebih luas. Restorasi dan transformasi budaya gotong royong bisa mencakup pengembangan budaya 'silih asih, silih asah dan silih asuh'; berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; tolong menolong dalam semangat kooperasi; saling menghargai dalam perbedaan seraya aktif meningkatkan pemahaman dan titik temu dalam perbedaan (active engagement); mampu menghargai dan mengapresiasi karya dan prestasi orang lain; serta mampu menjalin sinergi antarpotensi, antaragensi, antarsektor, antarwilayah.

Pentingnya mentalitas-budaya “pelayanan” berangkat dari asumsi bahwa pemupukan kemandirian dan pengautan welas asih kegotongroyongan itu harus bermuara pada pelayanan. Negara Indonesia sendiri dirancang oleh para pendiri bangsa berlandaskan empat basis negara pelayan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun dalam realitas hidup bangsa Indonesia, apapun yang dikerjakan Tuhan sebagai pelayanan kepada bangsa ini serba elok, fantastis, subur dan makmur. Tetapi, apapun yang dikerjakan manusia sebagai pelayanan kepada nusa bangsanya serba amburadul, asal-asalan, mandul dan miskin. Pengembangan metalitas pelayanan ini dapat diperkuat dengan memupuk semangat rela berkorban, gigih meraih mutu yang terbaik, mendorong etos kerja keras, kerja tangkas (profesional), serta mengembangkan sifat jujur, amanah dan bersih.

Perubahan pada ketiga mentalitas-budaya inti tersebut bisa menurunkan mentalitas-mentalitas ikutan. Kreativitas dan inovasi, misalnya, akan lahir kalau tersedia ekosistem kreativitas yang merupakan perpaduan dari ketiga unsur tadi. Dengan kata lain, kreativitas merupakan fungsi dari pemupukan talenta (unsur kemandirian), yang di dukung oleh adanya ruang toleransi untuk

saling mengapresiasi (unsur gotong royong) dan tersedianya sarana teknologis (peralatan teknis, perangkat informasi, organisasi, fasilitator) yang merupakan unsur pelayanan.

Tricita revolusi mental itu harus menjadi landasan ideologi kerja bagi penyusunan platform dengan segala turunan program dan kebijakannya di semua lini dan sektor pemerintahan. Keberadaan ideologi kerja memberikan framework (panduan dan haluan) yang memudahkan perumusan prioritas pembangunan penancangan program kerja, serta pilihan kebijakan yang diperlukan.

Dalam implementasinya, gerakan revolusi mental Pancasila ini tidak boleh dilakukan dengan pendekatan vertikal: negara yang ambil inisiatif, negara yang menafsir, negara yang melakukan. Cara terbaiknya dengan pendekatan horisontal dalam bingkai semangat gotong royong yang melibatkan partisipasi berbagai agen sosial dari kalangan masyarakat sipil, masyarakat media, pekerja budaya, dunia pendidikan dan dunia usaha.

Manusia memiliki identitas sendiri, apa yang menjadi karakteristik dan individualism adalah keyakinan implisit bahwa relasi sosial bukanlah pembentukan perseorangan dalam pengalamannya yang paling fundamental, maka Revolusi mental sebaiknya dimulai dari keluarga menjadi strategis dan menentukan, sebab keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pembentukan karakter, dan pendidikan dilakukan sejak awal kehidupan manusia.

Merujuk materi Diklat Penjenjangan Widyaiswara Madya di BKKBN bahwa *“di dalam masyarakat patrilineal maka unsur penteladanan menjadi penting untuk merubah sikap seseorang”*. Dan sejalan apa yang dikatakan oleh K. Hajar Dewantoro: *“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”*. Memiliki makna bahwa seorang pemimpin hendaklah memberi teladan atau contoh tindakan yang baik, bilamana berada ditengah-tengah bawahannya hendaklah dapat menumbuhkan daya cipta, inovasi, kreatifitas, gotong royong. Dan dari belakang seorang pemimpin hendaklah dapat memberikan motivasi dan arahan.

Dengan prioritas dan pendekatan seperti itu, gerakan revolusi mental secara sinergis dan simultan bisa membawa perubahan mendasar pada struktur mental dan keyakinan bangsa. Dengan perubahan mendasar itu, suatu pemutusan dengan mentalitas budaya dan tatanan dekade bisa dilakukan sehingga bisa menciptakan suasana kejiwaan yang lebih siap berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sedangkan musuh atau penghambat pelaksanaan Revolusi Pancasila ditengarai sebagai berikut:

- a. Unsur anti dan Kontra Revolusi dalam partai dan lembaga;
- b. Kekuatan Kapitalisme;
- c. Unsur-unsur komprador (proxy);
- d. Unsur-unsur pro neo liberalism;
- e. Unsur-unsur kleptokrasi dan pemburu rente dalam demokrasi;
- f. Unsur-unsur anti persatuan/mengedepankan kepentingan pribadi atau sekelompok;
- g. Unsur-unsur pelaku budaya dan media yang mempromosikan nilai-nilai materialism, hidonisme;
- h. Unsur-unsur fondantelisme;
- i. Golongan konservatif dan pro asing;
- j. Golongan bunglon (oportunis), dll.

E. Kewarganegaraan dan Bela Negara

1. Kewarganegaraan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.” dan “ Syarat-syarat tentang pembelaan

diatur dengan undang-undang.” Setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik seorang warga. Karakteristik atau atribut kewarganegaraan itu mencakup:

- a. Perasaan akan identitas;
- b. Pemilikan hak-hak tertentu;
- c. Pemenuhan kewajiban-kewajiban yang sesuai;
- d. Tingkat ketertarikan dan keterlibatan dalam masalah publik;
- e. Penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar.

Memiliki kewarganegaraan berarti seseorang itu memiliki identitas atau status dalam lingkup nasional. Memiliki kewarganegaraan berarti didapatkannya sejumlah hak dan kewajiban yang berlaku timbal balik dengan negara. Setiap orang berhak dan berkewajiban atas negara, sebaliknya negara memiliki hak dan kewajiban atas orang tersebut. Terkait dengan hak dan kewajiban ini, maka seseorang menjadikan turut terlibat atau berpartisipasi dalam kehidupan negaranya. Kewarganegaraan seseorang juga menjadikan orang tersebut berpartisipasi dengan warga negara lainnya sehingga tumbuh penerimaan atas nilai-nilai sosial bersama yang ada di negara tersebut.

Pendapat lain menyatakan kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Dalam kamus maya Wikipedia juga diutarakan bahwa Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Pengertian Kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis; dan (2) Kewarganegaraan dalam arti formal dan material.

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal. Dengan adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, bahwa orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan.

Tanda dari adanya ikatan hukum seperti akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lain-lain. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, dan lain-lain. Dengan kata lain ikatan ini lahir dari penghayatan orang yang bersangkutan.

Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hal ikhwal mengenai warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat publik. Kewarganegaraan dalam arti material merujuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. Kedudukan seseorang sebagai warga.

Kewarganegaraan mempunyai kemiripan dengan kebangsaan. Yang membedakan antara keduanya adalah hak-hak untuk aktif dalam dunia politik. Terdapat kemungkinan dalam memperoleh kebangsaan tanpa menjadi warga negara. Misalnya secara hukum merupakan subyek suatu negara serta berhak mendapatkan perlindungan tanpa mempunyai hak dalam berpartisipasi politik. Begitu juga dimungkinkan untuk mempunyai hak politik tanpa menjadi suatu anggota bangsa dari negara tersebut.

Dibawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan mempunyai

implikasi hak serta kewajiban. Dalam filosofi “kewarganegaraan aktif”, warga negara disyaratkan dapat menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas dengan cara melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, dan berbagai kegiatan positif lainnya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya.

2. Bela Negara

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.

Kesadaran bela negara itu hakekatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara itu sangat luas, dari yang paling halus, hingga yang paling keras. Mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara.

Konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan non fisik. Secara fisik dengan mengangkat senjata menghadapi serangan atau agresi musuh, secara non fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

Wilayah Indonesia yang sebagian besar adalah wilayah perairan mempunyai banyak celah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh negara lain yang pada akhirnya dapat meruntuhkan bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia. Indonesia yang memiliki kurang lebih 13.670 pulau memerlukan pengawasan yang cukup ketat.

Pengawasan terhadap wilayah tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI/Polri saja tetapi semua lapisan masyarakat Indonesia bila hanya mengandalkan TNI/Polri saja yang persenjataannya kurang lengkap mungkin bangsa Indonesia sudah tercabik-cabik oleh bangsa lain/dengan adanya bela negara kita dapat mempererat rasa persatuan di antara penduduk Indonesia yang saling berbhineka tunggal ika.

Sikap bela negara terhadap bangsa Indonesia merupakan kekuatan Negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran akan bela negara, kita harus dapat memiliki sikap dan prilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Dalam kaitannya dengan pemuda penerus bangsa hendaknya ditanamkan sikap cinta tanah air sejak dini sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan Negara lebih meyakini dan lebih dalam. Dalam sikap bela negara kita hendaknya mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung di negara kita, tidak mungkin kita tunjukan sikap bela negara yang bersifat keras seandainya situasi keamanan nasional terkendali.

Menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitar sudah merupakan salah satu sikap bela negara dalam skala kecil. Mentaati peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Bahkan menyanyikan lagu bela negara yang diciptakan oleh Dharma Oratmangun atau mengenang hari bela negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2006 adalah salah satu bentuk bela negara skala kecil.

F. Rangkuman

1. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Dalam Kepres tersebut dinyatakan bahwa: PERTAMA: Menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. KEDUA: Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional. KETIGA: Pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni.
2. Karakter kebangsaan merupakan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia dalam berkebangsaan sebagai warganegara.
3. Revolusi mental dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang cepat pada sikap dan mental seseorang atau bangsa untuk menuju kearah suatu perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk menghilangkan rasa rendah diri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Ada tiga sasaran dalam revolusi mental yang akan diterapkan ke semua birokrasi dalam pemerintahan, yakni: merubah *mindset* cara berpikir dan cara pandang; merubah struktur organisasi yang ramping; dan merubah kultur dan budaya kerja yang lebih disiplin, bertanggung jawab, mengedepankan kebersamaan dan gotong royong.
5. Revolusi mental merupakan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan pranata sosial-budaya yang ada di masyarakat, yang dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial meliputi integritas, semangat kerja (etos kerja) dan memiliki sikap gotong royong, dan berorientasi pada pelayanan publik dan kemaslahatan umum.
6. Revolusi mental sebagai proses harus dilalui untuk menuju

kepribadian/karakter yang tangguh melalui tiga komunikasi yang perlu dibangun yakni: komunikasi transendental; intrapersonal; dan interpersonal.

7. Terdapat 12 sifat manusia Indonesia dalam bertindak dan berperilaku, yaitu: Hipokrit alias Munafik, Segan dan Enggan Bertanggung Jawab, Berjiwa Feodal: Percaya Takhayul, Artistik, Watak yang Lemah, Tidak Hemat, Lebih suka tidak bekerja keras, kecuali kalau terpaksa, Manusia Indonesia Tukang Menggerutu, Cepat Cemburu dan Dengki, Manusia Yang Sok, dan Manusia Plagiat.
8. Revolusi mental berbasis Pancasila sebagai dasar dan haluan pembangunan mental-karakter didasarkan pada sila ke-1, ke-2, dan ke-3 yang intinya keberadaan manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta, semua manusia sederajat, yang memiliki hak hidup, hak milik dan kehormatan (*dignitas*), dengan kedudukan yang sama di depan hukum.
9. Prioritas revolusi mental dalam TRICITA REVOLUSI MENTAL dengan mempertimbangkan realitas hambatan mental yang ada serta idealitas nilai-nilai budaya ke-indonesiaan, gagasan revolusi mental Pancasila bisa diprioritaskan pada tiga mentalitas inti sebagai sasaran utama yaitu: penguatan mentalitas-budaya kemandirian, mentalitas-budaya gotong royong, dan mentalitas-budaya pelayanan.
10. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara untuk membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam sesuai perundang-undangan.

G. PENDALAMAN MATERI 3 PENDUDUK BERKARAKTER KEBANGSAAN

Jawablah pertanyaan dengan memilih salah satu jawaban yang paling tepat dari pilihan A, B, C, D, atau E dengan memberi tanda (X) di bawah ini:

1. Tujuan Revolusi Mental adalah
 - A. Mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan;
 - B. Membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimistik dalam menatap masa depan;
 - C. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi;
 - D. berkepribadian yang kuat melalui pembentukan manusia Indonesia baru yang unggul menerapkan nilai-nilai integritas, kerja keras/etos kerja, dan semangat gotong royong.
 - E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar
2. Sasaran dari Revolusi Mental adalah:
 - A. Merubah *mindset* cara berpikir dan cara pandang;
 - B. Merubah strukur organisasi agar ramping, efisien, tidak boleh gemuk;
 - C. Tidak boleh ada organisasi-organisasi dalam pemerintahan yang menduplikasi fungsi;
 - D. Merubah kultur dan budaya kerja yang lebih disiplin, bertanggung jawab, mengedepankan kebersamaan dan gotong royong.
 - E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar
3. Tiga nilai Revolusi mental:
 - A. Kemandirian, Gotong Royong, Pelayanan
 - B. Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong
 - C. Kemandirian, Gotong Royong, Etos Kerja
 - D. Integritas, Pelayanan, Gotong Royong
 - E. Integritas, Pelayanan, Kerjasama

4. Perilaku yang terkandung dalam Integritas, adalah:
 - A. Jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak munafik.
 - B. semangat, mandiri, memiliki daya saing, optimis, inovatif, dan produktif
 - C. kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan
 - D. kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemewahan
 - E. Kecuali jawaban D salah
5. Nilai yang terkandung dalam etos kerja
 - A. Jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak munafik.
 - B. semangat, mandiri, memiliki daya saing,
 - C. optimis, inovatif, dan produktif
 - D. kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan
 - E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar
6. Nilai yang terkandung dalam gotong royong
 - A. Jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab,
 - B. tidak munafik, semangat, mandiri, memiliki daya saing,
 - C. optimis, inovatif, dan produktif, kerja sama,
 - D. solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan
 - E. Jawaban A, B, C, dan D benar
7. Komunikasi dalam Revolusi mental adalah:
 - A. Tranmental, Intrapersonal, dan Interpersonal
 - B. Transendental, Intrapersonal, dan Interpersonal
 - C. Transendental, Transpiritual, dan Interpersonal
 - D. Transendental, Intrapersonal, dan Intermental
 - E. Transpiritual, Intrapersonal, dan Intermental

8. 12 sifat manusia Indonesia menurut Muchtar Lubis, adalah:
- A. Hipokrit alias Munafik, Segan dan Enggan Bertanggung Jawab, Berjiwa Feodal,
 - B. Percaya Takhayul, Artistik, Watak yang Lemah, Tidak Hemat,
 - C. Lebih suka tidak bekerja keras, kecuali kalau terpaksa, Manusia Indonesia Tukang Menggerutu,
 - D. Cepat Cemburu dan Dengki, Manusia Yang Sok, dan Manusia Plagiat.
 - E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar
9. Mental Pancasila meliputi:
- A. Material, Mental Kultural, Politikal
 - B. Material, Integritas, Sosial Kultural
 - C. Mental Pelayanan, Sosial Kultural, Kemandirian
 - D. Integritas, Mental kultural, Mental Politikal
 - E. Material, Integritas, Sosial Kultural, Mental Politikal
10. Tricita Revolusi Mental
- A. Kemandirian, Gotong Royong, Pelayanan
 - B. Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong
 - C. Kemandirian, Gotong Royong, Etos Kerja
 - D. Integritas, Pelayanan, Gotong Royong
 - E. Integritas, Pelayanan, Kerjasama
11. Pengertian Kewarganegaraan secara Yuridis
- A. Kewarganegaraan menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan dengan hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara
 - B. Kewarganegaraan menunjuk pada tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum
 - C. Kewarganegaraan menunjuk dengan ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal
 - D. Kewarganegaraan menunjuk pada ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, dan lain-lain.

- E. Kewarganegaraan menunjuk pada tempat kewarganegaraan dan waktu dalam sistem hukum.
12. Menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitar, termasuk dalam konsep:
- A. Bela Negara
 - B. Revolusi Mental
 - C. Wawasan Kebangsaan
 - D. Kependudukan
 - E. Nasionalis

H. KUNCI JAWABAN MATERI 3 PENDUDUK BERKARAKTER KEBANGSAAN

- 1. Tujuan Revolusi Mental adalah
E. Jawaban A, B, C, dan D, semua benar
- 2. Sasaran dari Revolusi Mental adalah:
E. Jawaban A, B, C, dan D, semua benar
- 3. Tiga nilai Revolusi mental:
B. Integritas, Etos Kerja, dan Gotong Royong
- 4. Perilaku yang terkandung dalam Integritas, adalah:
A. Jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak munafik.
- 5. Nilai yang terkandung dalam etos kerja
B. semangat, mandiri, memiliki daya saing
- 6. Nilai yang terkandung dalam gotong royong
D. solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan

7. Komunikasi dalam Revolusi mental adalah:
B. Transendental, Intrapersonal, dan Interpersonal
8. 12 sifat manusia Indonesia menurut Muchtar Lubis, adalah:
E. Jawaban A, B, C, dan D semua benar
9. Mental Pancasila meliputi:
C. Mental Pelayanan, Sosial Kultural, Kemandirian
10. Tricita Revolusi Mental
A. Kemandirian, Gotong Royong, Pelayanan
11. Pengertian Kewarganegaraan secara Yuridis
C. Kewarganegaraan menunjuk dengan ikatan hukum antara orang-orang dengan negara atau kewarganegaraan sebagai status legal
12. Menjaga diri, keluarga dan lingkungan sekitar, termasuk dalam konsep:
A. Bela Negara

SUBBAHASAN
PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA BERKARAKTER KEBANGSAAN

4

ISU KEPENDUDUKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

INDIKATOR KEBERHASILAN

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kependudukan ini peserta diklat dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan kembali materi ISU KEPENDUDUKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN yang meliputi: (1) Terbentuknya ASEAN; (2) Perjanjian Kerjasama ASEAN; (3) Batasan dan Pengertian MEA; (4) Ciri-ciri dan Unsur Masyarakat ekonomi ASEAN; dan (5) Menghadapi Isu Kependudukan MEA.

A. Pendahuluan

Sejak terbentuknya ASEAN sebagai kawasan geopolitik di kawasan Asia Tenggara pada 8 Agustus 1967 di Kota Bangkok Thailand maka Negara-negara anggota ASEAN akan mengalami tantangan yang sangat berat dan sekaligus juga menjadi kesempatan dalam menghadapi kekuatan politik dan ekonomi global. Untuk menghadapi persaingan tersebut Negara-negara anggota ASEAN mulai 31 Desember 2015 atau awal Januari 2016 memberlakukan konsep pasar dan basis produksi tunggal ASEAN melalui empat karakteristik dan lima elemen bagi kemajuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

B. Terbentuknya ASEAN

ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah organisasi geopolitik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Anggota ASEAN didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada 8 Agustus 1967 di Kota Bangkok (Thailand). Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan, menjaga stabilitas dan perdamaian serta membuka kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan prinsip kedamaian.

Pada awal pembentukan ASEAN, jumlah anggotanya hanya lima negara yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina, sekaligus sebagai penggagas berdirinya ASEAN. Dalam versi Indonesia, ASEAN disebut PERBARA (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Saat ini, anggota ASEAN menjadi 10 negara dengan masuknya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja Bergabungnya negara-negara dalam organisasi ASEAN ini merupakan kekuatan baru geopolitik-ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang dapat diperhitungkan oleh kawasan lain di dunia internasional.

Negara-negara ASEAN sebagai kekuatan geopolitik-ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara akan mengalami ujian yang sangat berat dan sekaligus kesempatan dalam menghadapi kekuatan politik dan ekonomi global. Dimulai 31 Desember 2015 atau awal Januari 2016 akan mengalami ujian berat, karena akan bersaing ketat di antara negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang kehidupan. Bila persaingan dilakukan secara fair, sehat dan berkeadilan maka dapat menjadi kesempatan untuk menyatukan ekonomi ASEAN dalam menghadapi kekuatan ekonomi internasional yang sudah lama berkembang dan mengalami kemajuan.

Sebaliknya bila persaingan internal ASEAN mengalami banyak hambatan, kendala bahkan terjadi saling memboikot akan berakibat fatal. Indikasinya bahwa negara-negara ASEAN relatif merupakan negara-negara baru berkembang (*development country*) bahkan masih ada negara yang masuk dalam kategori negara miskin (*under development country*). Adanya ketimpangan di antara negara-negara ASEAN akan terjadi dua kemungkinan yaitu terciptanya kemakmuran bersama atau saling bersaing secara politis yang berujung pada perpecahan kembali.

C. Perjanjian Kerjasama ASEAN

Istilah Asia Tenggara kali pertama diperkenalkan oleh Pasukan Sekutu yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Pada waktu itu Komando Asia Tenggara (*South East Asia Command*) berpangkalan di Kolombo. Saat itu wilayah Asia Tenggara sedang diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia II berlangsung. Sebelum Perang Dunia II, orang-orang Eropa menamakan wilayah Asia Tenggara ke dalam Wilayah Timur (*Oriental*) dan Timur Jauh (*Far East*).

Keberadaan ASEAN yang anti Komunis dan pro-pasar terbuka mampu meningkatkan daya tarik kawasan terhadap para investor asing. Kawasan ini merupakan lingkungan politik yang stabil serta sistem politik dan ekonomi yang berorientasi ke Barat. Stabilitas

politik dan dinamika ekonomi yang diraih kawasan ASEAN telah menjadikannya sebagai suatu model keberhasilan kerjasama negara-negara berkembang lainnya.

Berbagai keberhasilan dan kegiatan ASEAN dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas mampu diatasinya. Misalnya menyelesaikan masalah Kamboja dapat meningkatkan profil dan kredibilitas ASEAN di forum-forum internasional. Bahkan akhir-akhir ini ASEAN telah menunjukkan keberhasilannya membantu masalah Myanmar dalam menangani “manusia perahu” yang melakukan eksodus ke berbagai wilayah di Asia Tenggara karena hegemoni umat beragama tertentu terhadap umat agama minoritas.

Indonesia bersama Malaysia tampil untuk menampung manusia perahu yang terombang-ambing di laut bebas dan berhasil mendarat di sekitar wilayah perairan Indonesia dan Malaysia. Selain itu juga kedua negara ini dapat menengahi konflik etnis dan agama di Myanmar secara diplomatis. Barangkali inilah karakter bangsa-bangsa ASEAN dalam mengelola kawasan untuk terwujudnya stabilitas politik kawasan dan ekonomi berkeadilan.

Organisasi negara-negara anggota ASEAN berjalan sesuai rencana dan kini memasuki “Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN” yang disebut MEA. Dalam pandangan banyak masyarakat ASEAN yang sama-sama mengkhawatirkan menjadi pasar bebas tak terkendali. Dengan prinsip menghilangkan sekat-sekat dan hambatan politis sehingga memerlukan persiapan secara mentalitas dan sebagainya.

MEA merupakan perwujudan dari tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang telah digariskan di dalam visi ASEAN 2020. Tujuan MEA untuk menciptakan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera, dan memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini untuk mewujudkan arus barang, jasa, dan investasi, aliran modal yang lebih bebas, serta pembangunan ekonomi yang adil dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada 2020.

Ada empat karakteristik dan lima elemen MEA yang akan diberlakukan pada akhir Desember 2015. Empat karakteristik MEA adalah: (1) pasar dan basis produksi tunggal; (2) kawasan yang memiliki daya saing yang tinggi; (3) kawasan pembangunan ekonomi yang adil; dan (4) kawasan yang terintegrasi secara penuh ke dalam ekonomi global.

Selain karakteristik itu, dalam konsep pasar dan basis produksi tunggal ASEAN juga ada lima elemen penting yang akan diwujudkan yaitu: (1) arus barang yang bebas (*free flow of goods*); (2) arus jasa yang bebas (*free flow of services*); (3) arus investasi yang bebas (*free flow of investment*); (4) aliran modal yang lebih bebas (*free flow of capital*); dan (5) aliran tenaga kerja terampil yang bebas (*free flow of skill labour*).

Karakteristik dan elemen-elemen inilah yang harus disikapi dan dihadapi oleh masyarakat ASEAN mendatang dengan mempersiapkan segala sesuatunya agar setiap bangsa di negara-negara anggota ASEAN ini tidak hanya menjadi penonton melainkan dapat mengambil peran sesuai dengan kemampuan dan proporsional.

Sebagai negara anggota ASEAN dengan luas wilayah, jumlah penduduk, dan ukuran ekonomi terbesar di Asia tenggara maka peran Indonesia adalah sangat menentukan bagi masa depan negara-negara anggota ASEAN. Karena tanpa Indonesia, ASEAN akan kehilangan 40% dari penduduknya dan sekitar 40% dari daratannya. Tanpa Indonesia maka ASEAN akan lebih kecil sehingga relevansinya pun akan memudar.

D. Batasan MEA

MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade* antara negara-negara anggota ASEAN. Para anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut.

MEA adalah istilah yang dalam bahasa Indonesia tapi pada dasarnya sama saja dengan AEC atau ASEAN ECONOMIC COMMUNITY.

Awal mula MEA berawal pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 1997. Para pemimpin ASEAN akhirnya memutuskan untuk melakukan perubahan ASEAN menjadi suatu kawasan makmur, stabil dan bersaing. Sebagai upaya dalam perkembangan ekonomi yang berlaku adil untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial ekonomi di kawasan.

Pada KTT Bali yang dilaksanakan pada Oktober 2003, para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan menjadi pelaku integrasi ekonomi regional pada 2020. ASEA SECURITY COMMUNITY dan beberapa komunitas sosial Budaya ASEAN merupakan dua pilar yang tidak bisa terpisahkan dari komunitas ASEAN. Seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sama secara kuat dalam membangun komunitas ASEAN pada 2020. Dalam pertemuan dengan Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia disepakati untuk memajukan masyarakat Ekonomi ASEAN dengan agenda dan target yang jelas dan terjadwal dalam pelaksanaannya.



Dalam KTT ASEAN ke-12 pada Januari 2007, para pemimpin mulai menegaskan komitmennya untuk melakukan percepatan pembentukan komunitas ASEAN di tahun 2015 yang telah diusulkan oleh ASEAN Vision 2020 dan ASEAN Concord II. Penandatanganan deklarasi CEBU mengenai percepatan pembentukan komunitas ekonomi ASEAN di tahun 2015. Upaya yang dilakukan untuk pengubahan ASEAN menjadi suatu wilayah perdagangan yang bebas untuk barang, investasi, tenaga kerja terampil, jasa dan aliran modal tanpa batas.

E. Ciri-ciri dan Unsur MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ialah suatu realisasi dari tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang telah dianut didalam ASEAN Visi 2020. Disepakati berdasarkan atas konvergensi kepentingan para negara-negara anggota ASEAN. Untuk memperluas dan memperdalam integrasi ekonomi lewat inisiatif yang ada dan baru dengan memiliki batas waktu yang jelas. MEA melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi untuk mengarah ke luar, terbuka, dan mengarah pada pasar ekonomi. Prinsip yang teguh pendirian dengan peraturan multilateral serta patuh terhadap sistem pelaksanaan dan kepatuhan komitmen ekonomi yang efektif berdasarkan aturan.

MEA menjadi pasar dan basis dari produksi tunggal yang dapat membuat ASEAN terlihat dinamis dan dapat bersaing dengan adanya mekanisme dan langkah-langkah dalam memperkuat pelaksanaan baru yang berinisiatif ekonomi. Mempercepat perpaduan regional yang ada disektor-sektor prioritas. Memberikan fasilitas terhadap gerakan bisnis, tenaga kerja yang memiliki bakat dan terampil supaya dapat memperkuat kelembagaan mekanisme pasar bebas di kawasan ASEAN.

MEA akan mengatasi kesenjangan dalam pembangunan dan melakukan percepatan integrasi kepada negara Laos, Myanmar,

Vietnam dan Kamboja lewat *Initiative for ASEAN integration* dan inisiatif dari regional yang lainnya. Adapun bentuk kerjasamanya ialah:

- a. Pengembangan sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas;
- b. Pengakuan terkait kualifikasi profesional;
- c. Konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi;
- d. Memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan;
- e. Meningkatkan infrastruktur;
- f. Melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN;
- g. Memperpadukan segala industri yang ada diseluruh wilayah untuk dapat mempromosikan sumber daerah;
- h. Meningkatkan peran dari sektor swasta untuk dapat membangun MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pentingnya digalakkannya perdagangan eksternal dan keperluan dalam komunitas ASEAN yang secara keseluruhan untuk menatap kedepan. Adapun ciri-ciri utama MEA

- a. Memiliki wilayah pembangunan ekonomi yang merata;
- b. Daerah-daerah akan terintegrasi secara penuh dalam ekonomi global;
- c. Basis dan pasar produksi tunggal.

Ciri-ciri ini akan sangat saling berkaitan dengan kuat dengan memasukkan pada unsur-unsur yang paling dibutuhkan dari setiap masing-masing ciri-ciri. Kemudian dapat memastikan agar konsisten dan adanya keterpaduan dari unsur-unsur dan pelaksanaannya yang tepat. Saling berkoordinasi antara para pemangku kekuasaan atau kepentingan.

MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Pada intinya, MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya.

F. Menghadapi Isu Kependudukan MEA

Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2016 dapat menguntungkan Indonesia. Dibalik keuntungan tersebut dalam pelaksanaan MEA 2016 ini, juga terdapat dampak negatif terhadap perekonomian dengan adanya persaingan bebas yang lebih ketat. Indonesia harus membenahi sektor yang lemah untuk menghadapi MEA 2016 seperti kesiapan akan produk-produk yang bernilai saing tinggi untuk menghadapi pasar bebas di negara-negara anggota ASEAN secara efisien dalam perekonomian.

Ada tiga permasalahan utama yang harus dibenahi dalam dunia ketenagakerjaan saat pelaksanaan MEA 2016. *Pertama*, kesempatan kerja yang terbatas. *Kedua*, masih banyak tenaga kerja yang berkualitas rendah dan kurang produktif. *Ketiga*, masih tingginya tingkat pengangguran. Demikian juga ada dua aspek penting sebagai penunjang ketenagakerjaan, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA). Sumber daya alam yang melimpah tidak akan berarti dan jika tidak dikelola dengan baik oleh tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas. Karena tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dan strategis.

Selain dapat menguntungkan bagi perekonomian, MEA juga dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan bagi ratusan juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Dengan adanya bonus demografi sebagai senjata utama, Indonesia harusnya mampu menghadapi MEA 2016 dengan sebaik mungkin. Tetapi, Indonesia harus memastikan bahwa penduduk usia produktif tak hanya bergelar “produktif” saja, tetapi kualitas, *skill* dan kompetensi yang mereka miliki harus juga benar-benar produktif.

Kenyataannya dari segi sumber daya manusia, Indonesia masih memiliki beberapa masalah sangat mendasar dalam memasuki masyarakat ekonomi ASEAN yaitu:

- a. Masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia;
- b. Kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN;
- c. Rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja;
- d. Pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja dengan pendidikan rendah sehingga produktivitas tenaga kerja menjadi rendah;
- e. Meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan kerja;
- f. Sektor informal mendominasi lapangan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
- g. pekerjaan, dimana sektor ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan SDM diantaranya adalah:

- a. Memperkenalkan sejak dini mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN kepada para Aparatur Sipil Negara agar optimis dalam menghadapi MEA dan menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemampuan untuk berkolaborasi;
- b. Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada baik dengan sering mengadakan workshop ataupun seminar bagi angkatan kerja baru maupun pelatihan peningkatan kualitas *skill* bagi angkatan kerja yang sudah ada;
- c. Mengadakan pelatihan bagi pekerja Indonesia untuk belajar memahami dan terus meng-update teknologi terkini yang mendukung setiap pekerjaannya. Karena teknologi terus berkembang, penguasaan dalam bidang teknologi sangatlah penting untuk menunjang pekerjaan;
- d. Menciptakan tenaga kerja yang kompeten dari lembaga-lembaga pendidikan ditingkat madya, yakni dari sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) dan program-program vokasi, baik D1, D2, maupun D3 sebanyak-banyaknya.

- e. Mengadakan pelatihan dan pendidikan profesi terhadap tenaga kerja profesional.
- f. Untuk tenaga-tenaga ahli, harus diberikan sertifikasi atas standar keahlian dan kompetensi untuk menjadi jaminan daya saing SDM di dalam maupun luar negeri.

Adanya upaya dari pemerintah diharapkan juga ada kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas diri dengan terus mengembangkan keahlian dan ilmu pengetahuannya masing-masing. Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi ekonomi ini juga harus ditanamkan rasa percaya diri, nilai-nilai tanggung jawab dan peningkatan etos kerja. Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap bersaing dengan negara lain di kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

G. RANGKUMAN

1. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara dengan beranggotakan 10 negara yaitu: Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. Tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan, menjaga stabilitas dan perdamaian serta membuka kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan prinsip kedamaian.
2. Keberadaan ASEAN yang anti Komunis dan pro-pasar terbuka mampu meningkatkan daya tarik kawasan terhadap para investor asing. Kawasan ini merupakan lingkungan politik yang stabil serta sistem politik dan ekonomi yang berorientasi ke Barat. Stabilitas politik dan dinamika ekonomi yang diraih kawasan ASEAN telah menjadikannya sebagai suatu model keberhasilan kerjasama negara-negara berkembang lainnya.

3. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade* antara negara-negara anggota ASEAN. Para anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut. MEA adalah istilah yang dalam bahasa Indonesia tapi pada dasarnya sama saja dengan AEC atau ASEAN ECONOMIC COMMUNITY.
4. Empat karakteristik yang diberlakukan pada akhir Desember 2015 atau awal Januari 2016 dalam menghadapi MEA adalah: (1) pasar dan basis produksi tunggal; (2) kawasan yang memiliki daya saing yang tinggi; (3) kawasan pembangunan ekonomi yang adil; dan (4) kawasan yang terintegrasi secara penuh ke dalam ekonomi global.
5. Dalam konsep pasar dan basis produksi tunggal ASEAN juga ada lima elemen penting yang akan diwujudkan yaitu: (1) arus barang yang bebas (*free flow of goods*); (2) arus jasa yang bebas (*free flow of services*); (3) arus investasi yang bebas (*free flow of investment*); (4) aliran modal yang lebih bebas (*free flow of capital*); dan (5) aliran tenaga kerja terampil yang bebas (*free flow of skill labour*).
6. Dalam menghadapi isu kependudukan ASEAN Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2016 dapat menguntungkan Indonesia. Dibalik keuntungan tersebut dalam pelaksanaan MEA 2016 ini, juga terdapat dampak negatif terhadap perekonomian dengan adanya persaingan bebas yang lebih ketat. Indonesia harus membenahi sektor yang lemah untuk menghadapi MEA 2016 seperti kesiapan akan produk-produk yang bernilai saing tinggi untuk menghadapi pasar bebas di negara-negara anggota ASEAN secara efisien dalam perekonomian.

H. PENDALAMAN MATERI 4 ISU KEPENDUDUKAN MEA

Jawablah pertanyaan dengan memilih satu jawaban yang paling tepat dari pilihan A, B, C, D, atau E dengan memberi tanda (X) di bawah ini:

1. Pada awal pembentukan ASEAN, jumlah anggotanya hanya lima negara yakni:
 - A. Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura dan Filipina
 - B. Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura dan Laos
 - C. Indonesia, Thailand, Malaysia, Myanmar dan Filipina
 - D. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina
 - E. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Kamboja

2. Empat karakteristik yang diberlakukan dalam menghadapi MEA adalah:
 - A. Pasar dan basis produksi tunggal
 - B. Kawasan yang memiliki daya saing yang tinggi
 - C. Kawasan pembangunan ekonomi yang adil
 - D. Kawasan yang terintegrasi secara penuh ke dalam ekonomi global
 - E. Jawaban A, B, C, dan D, semua benar

3. Lima elemen penting yang akan diwujudkan dalam MEA yaitu:
 - A. Arus barang yang bebas
 - B. Arus jasa yang bebas
 - C. Arus investasi yang bebas
 - D. Aliran modal yang lebih bebas, dan aliran tenaga kerja terampil yang bebas
 - E. Jawaban A, B, C, dan D benar

4. Tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN untuk mempersatukan:
 - A. Kasatuan politik
 - B. Kesatuan Ekonomi

- C. Kesatuan Geografis
- D. Kesatuan Budaya
- E. Kesatuan Agama

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban singkat.

1. Jelaskan tujuan terbentuknya ASEAN yang dilakukan oleh 10 negara anggota ASEAN!
2. Apa yang paling prinsip diadakannya Perjanjian Kerjasama ASEAN?
3. Sebutkan ciri-ciri dan unsur-unsur Masyarakat ekonomi ASEAN!
4. Apa saja yang terkait dengan isu-isu Kependudukan ASEAN yang harus dihadapi masyarakat Indonesia?

I. KUNCI JAWABAN MATERI 4 ISU KEPENDUDUKAN MEA

1. Pada awal pembentukan ASEAN, jumlah anggotanya hanya lima negara yakni:
D. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina
2. Empat karakteristik yang diberlakukan dalam menghadapi MEA adalah:
E. Jawaban A, B, C, dan D, semua benar
3. Lima elemen penting yang akan diwujudkan dalam MEA yaitu:
E. Jawaban A, B, C, dan D, semua benar
4. Tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN untuk mempersatukan:
B. Kesatuan Ekonomi

STUDI KASUS MODUL PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN

A. Pendahuluan

Studi kasus pendidikan kependudukan bagi Aparatur Sipil Negara bersumber dari buku: Bahan Ajar Kasus berbasis Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga pada Diklat Pegawai Aparatur Sipil Negara (BKKBN-LAN, 2015). Studi kasus meliputi empat kasus yaitu: (1) OooH,... Indonesia-ku; (3) Bonus Demografi Menuju Bencana Demografi; (3) Lansia untuk Indonesia; (4) Dampak Sosial Migrasi di Indonesia.

B. Tugas

Peserta pelatihan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan kasus-kasus di bawah ini. Kemudian membaca masing-masing dalam kelompok. Setelah itu mendiskusikan permasalahannya yang ada dalam studi kasus untuk merumuskan masalah dan mencari solusinya. Hasilnya dipresentasikan dalam diskusi panel bersama kelompok lainnya yang berbeda.

1. Studi Kasus dengan tema: Oooh, ... Indonesia-ku

Indonesia negeri tercinta memiliki sumber daya alam yang sangat kaya raya dalam sumber daya manusia yang melimpah. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk sebanyak 237,6 juta jiwa. Penduduk Indonesia masih menempati urutan ke-4 penduduk di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

Setelah berjalan 5 tahun kedepan diperkirakan pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sebesar 3,5 juta jiwa pertahunnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga jumlah

penduduk Brunei: 322 ribu jiwa, Malaysia 30 juta jiwa, Thailand: 67 juta jiwa, Filipina: 107 juta jiwa. Indonesia menjadi terbesar penduduknya.

Jumlah penduduk yang besar belum mampu dikelola secara benar sehingga menimbulkan dampak sosial yang negatif, misalnya pengangguran, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, kelaparan dan kematian. Laporan terkini dikisaran 60 juta jiwa penduduk Indonesia di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ada hubungannya dengan wilayah geografis yang tersebar di wilayah-wilayah seluruh Indonesia. sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah Pulau Jawa.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak 2003/2004 hingga sekarang telah berjalan 13 tahun nampaknya belum mampu pemeratakan pembangunan dan menurunkan kemiskinan di daerah. otonomi daerah belum mampu mengontrol pertumbuhan penduduk hingga mempertanggungjawabkan jumlah penduduk tersebut menjadi berkualitas. Apalagi di masa otonomi daerah dinas/kantor yang mengelola kependudukan dan KB malah tidak banyak difungsikan secara maksimal.

2. Studi Kasus dengan tema: Bonus Demografi Menuju Bencana Demografi

Angka bonus demografi yang sering dibanggakan pemerintah bisa memudar. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, Indonesia akan mengalami bonus demografi sejak 2010 hingga 2045, ketika 100 penduduk usia kerja menanggung kurang dari 50 penduduk usia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun.

Bandingkan pada tahun 1971 sebanyak 100 menanggung 86 orang, sedangkan pada tahun 2000 sudah berubah, yaitu 100 menanggung 51 orang. Berdasarkan sensus itu, puncak bonus demografi akan terjadi pada tahun 2020 hingga 2030. Saat itu, 100 orang hanya akan menanggung 44 orang.

Namun, berdasarkan sensus penduduk 2010 terjadi perkembangan yang mengkhawatirkan. Bonus demografi terbaik akan terjadi pada 2028 hingga 2031, yaitu ketika 100 orang akan menanggung 47 orang. Telah terjadi pergeseran, puncak bonus demografi hanya terjadi tiga tahun (bukan lagi 10 tahun) dan penduduk yang ditanggung bukan lagi 44 orang, melainkan 47 orang.

Artinya beban angkatan kerja makin berat dan jika situasi ini tidak dicermati, bonus demografi itu akan benar-benar lenyap. Saat ini saja pertumbuhan penduduk lansia (usia 65 tahun ke atas) berkembang dengan cepat. Pada sisi lain, angka pertumbuhan penduduk naik terus.

Gempita bonus demografi bukanlah sesuatu yang turun dari langit secara begitu saja. Melainkan hasil kerja keras, kerja cerdas, sistematis dan jangka panjang. Pada masa orde baru pelaksanaan KB cukup gencar dengan slogan “dua anak cukup” memberi kesan kuat. Nikah usia muda ada rasa malu, melahirkan di atas 40 tahun mulai berkurang sehingga berdampak pada pengendalian penduduk.

Namun demikian pada masa reformasi membuat persoalan demografi bukan hal yang strategis lagi. Hal ini disebabkan, pertama otonomi daerah menjadikan pemerintah pusat tidak memiliki otoritas dalam mengendalikan pemerintahan daerah. Kedua, Pemerintahan daerah dalam pilkada selalu menyampaikan program-program yang bersifat instan. Ketiga, pelaksana bidang pengendalian kependudukan dan KB di daerah dan pusat pun kurang mendapat perhatian.

Berdasarkan kasus yang terjadi diharapkan para peserta latihan dapat mendiskusikannya untuk memberi masukan dan solusi pemecahan masalah yang berkaitan dengan terciptanya bonus demografi di Indonesia.

3. Studi Kasus dengan tema: Penduduk Usia Lanjut (Lansia) Indonesia

Berbicara tentang penduduk, secara umum dibagi kedalam dua kelompok yaitu penduduk produktif dan penduduk non-produktif.

Jika dilihat dari rentang usia yang disebut kelompok produktif dikisaran usia 15 – 64 tahun, sedangkan usia non produktif di luar usia itu. Hal yang perlu dicermati adalah penduduk usia 60-64 yang terkategori penduduk lansia tetapi masih produktif.

Perkembangan penduduk lansia di Indonesia menarik dicermati karena dari tahun ke tahun jumlah cukup meningkat. Berdasarkan data dari Kemenkokesra jika tahun 1980 usia harapan hidup (UHH) 52,2 tahun dengan jumlah lansia sebanyak 7.998.543 orang (5,45%), maka pada tahun 2006 menjadi 19 juta orang (8,90%) disertai dengan UHH meningkat menjadi 66,2 tahun. Pada tahun 2010 perkiraan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 23,9 juta (9,77%) dan UHH sekitar 67,4 tahun. Sepuluh tahun kemudian pada tahun 2020 perkiraan penduduk lansia Indonesia akan mencapai 28,8 juta (11,34%) dengan UHH 71,1 tahun.

Seperti apa kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan lansia? Dalam undang-undang tentang kesejahteraan lansia (UU No. 13 Tahun 1998) dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan: Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Dalam Pasal 2 disebutkan lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia dibagi dua yaitu lanjut

usia potensial (ayat 3) dan lanjut usia tidak potensial (ayat4). Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan dan dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan yang disebut lanjut tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

Bagi lanjut usia yang tidak potensial (ayat 7) pemerintah dan masyarakat mengupayakan perlindungan sosial sebagai kemudahan pelayanan agar lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. Selanjutnya dalam ayat 9 disebutkan bahwa pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar lanjut usia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

Berdasarkan undang-undang kesejahteraan lanjut usia itu, tampaknya yang terbanyak di Indonesia adalah penduduk lanjut usia yang tidak potensial. Sebab berdasarkan pekerjaan, hanya sedikit penduduk Indonesia yang tersalurkan di sektor formal dan kebanyakan di sektor informal yang tidak jelas jaminan sosial hidupnya. Melihat kecenderungan meningkatnya penduduk lansia tersebut pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial terutama bagi lansia tidak potensial.

4. Studi Kasus dengan tema: Dampak Sosial Migrasi di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar di dunia. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 237,6 juta jiwa yang tersebar di seluruh wilayah. Laju pertumbuhan penduduk pun masih cukup tinggi yakni 1,49% pertahun.

Meskipun dari segi jumlah penduduk, Indonesia tergolong mempunyai sumber daya manusia yang melimpah secara

kuantitas. Namun dari segi kualitas belum memadai untuk bersaing dengan negara-negara lain. Sebanyak 60% penduduk Indonesia hanya tamat sekolah dasar atau bahkan lebih rendah. Angka kemiskinan menurut badan Pusat Statistik berjumlah 28,59 juta jiwa. Pengangguran mencapai 7,2 juta jiwa. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pembangunan di setiap sektor belum merata di seluruh wilayah, serta penduduk yang menghuni wilayah belum tersebar secara merata.

Persoalan tersebut kemudian menimbulkan fenomena migrasi masyarakat menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan kependudukan Indonesia. tanpa adanya kebijakan mobilitas penduduk, migrasi dapat mengakibatkan terjadinya konflik sosial. Migrasi yang tidak terkontrol dapat berdampak pada melemahnya ketahanan sosial. Selain didorong oleh faktor ekonomi dalam bentuk urbanisasi, yakni mencari penghidupan yang lebih layak ke daerah perkotaan yang lebih maju, migrasi juga disebabkan oleh banyak hal antara lain kerawanan bencana, konflik daerah dan sebagainya.

Selain menghadapi migrasi penduduk lokal, terutama dalam bentuk urbanisasi, Indonesia juga harus mampu mengatasi migrasi secara illegal dari penduduk asing yang tentunya dapat menambah beban dan mengancam stabilitas nasional yang sesungguhnya sampai dengan saat ini belum stabil. Tidak hanya dalam pengaturan dan pengawasan yang lebih baik perpindahan penduduk, hal utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menekan laju pertumbuhan penduduk agar dapat dikendalikan.

Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensial dalam meningkatkan pembangunan, namun juga dapat menjadi beban bagi bangsa ini jika tidak dapat dipenuhi akan kebutuhannya. Apalagi jika terjadinya ketimpangan pembangunan di berbagai daerah tidak merata akan terjadi migrasi yang akan menjadi beban masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih, dkk, (2010), *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- BKKBN, (2010), *Kebijaksanaan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Suatu Rekayasa Demografi Membangun Bangsa)*, Direktorat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Jakarta.
-, (2010), *Dinamika Penduduk dan Pembangunan Berkelanjutan*, Direktorat Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan, Jakarta.
-, (2010), *Penduduk Usia Produktif dan Ketenagakerjaan*, Direktorat Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan, Jakarta.
-, (2010), *Advokasi Isu Kaum Muda di Indonesia*, Direktorat Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan, Jakarta.
-, (2010), *Penduduk Usia Lanjut di Indonesia Tahun 2050-2050*, Direktorat Kerjasama Pendidikan dan Kependudukan, Jakarta.
-, (2015), *Bahan Ajar Kasus Berbasis Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga pada Diklat Pegawai Aparatur Sipil Negara*, Pusdiklat BKKBN, Jakarta.
-(2017). *Laporan Awal SDKI 2017*. Jakarta: BKKBN
- Khadir, Abdul, dkk, (2015), *Ikhtishar dalam Memahami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: CV. Budi Utomo.
- Latif, Yudi, (2015), *Revolusi Pancasila*, Jakarta: Mizan.
-, (2015), *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta; PT.Gramedia.
- PBB, (1966), *Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik*, Jenewa.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (*International Convention on The Elimination of All Form of Racial Discrimination* 1965).

Wirosuhardjo, Kartomo, (2007), *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Internet

www.hizbullahmaulana1.wordpress.com/mea-2016

www.ypdi-alhasan.org/pembentukan-karakter-unggul-berakhlakul-karimah-melalui-madrasah

www.scribd.com/ukuran-demografi

www.andriwijanarko.files.wordpress.com/ekonomi-kepen

www.fkm.usu.ac.id/biostatistika-kependudukan

www.eprints.undip.ac.id/ba-fmipa

www.aidia-aidianurfitra.blogspot.com

www.praynadeak.wordpress.com/category/demografi-studi-kependudukan

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT (RBPMD)

1	Nama Diklat	:	Diklat Teknis Kependudukan dan KB bagi ASN
2	Mata Diklat	:	Dasar-Dasar Kependudukan
3	Alokasi waktu (menit)	:	4 JP (180 menit)
4	Deskripsi singkat	:	Mata Diklat ini membahas tentang Fertilitas, Mortalitas, Migrasi, Umur Harapan Hidup, Data Kependudukan serta manfaat data kependudukan
5	Tujuan Pembelajaran		
	a. Hasil belajar	:	Peserta diharapkan mampu menguraikan kaidah dasar-dasar kependudukan
	b. Indikator hasil belajar	:	

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK		METODE	MEDIA	ESTIMASI WAKTU (menit)	REFERENSI
		MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK				
1	Peserta dapat: Memahami Pengertian dan penerapan Fertilitas, mortalitas, migrasi penduduk dengan baik dan benar	1. Pengertian dan penerapan fertilitas, mortalitas dan migrasi penduduk	1.1. Fertilitas 1.2. Mortalitas 1.3. Migrasi	1. Ceramah interaktif 2. Tanya Jawab 3. Curah Pendapat	1. LCD 2. Laptop 3. Handout	90 menit	1. Tim Penulis Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Dasar-dasar Demografi, Salemba Empat, 2010 2. www.bkkbn.go.id , tanggal 10 Desember 2017 pkl 14.00 3. www.datastatistik-indonesia.com , tanggal 23 April 2017, pkl 10.00
2	Memahami Umur Harapan Hidup, Data Kependudukan dan Manfaat Data kependudukan dengan baik dan benar	2. Umur Harapan Hidup dan Data Kependudukan	2.1. Umur Harapan Hidup 2.2. Data Kependudukan 2.3. Administrasi kependudukan	1. Ceramah interaktif 2. Tanya Jawab 3. Curah Pendapat	1. LCD 2. Laptop 3. Handout	90 menit	
	Jumlah					180 menit	

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT (RBPMD)

1	Nama Diklat	:	Diklat Teknis Kependudukan dan KB bagi ASN
2	Mata Diklat	:	Lima Isu Kependudukan
3	Alokasi waktu (menit)	:	6 JP (270 Menit)
4	Deskripsi singkat	:	Mata Diklat ini membahas tentang Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk, Remaja dan Orang Muda, Penduduk Usia Produktif, Penduduk Lanjut Usia serta Urbanisasi dan Perkotaan
5	Tujuan Pembelajaran	:	
	a. Hasil belajar	:	Peserta diharapkan mampu menguraikan Lima isu kependudukan
	b. Indikator hasil belajar	:	

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK		METODE	MEDIA	ESTIMASI WAKTU (Jampel)	REFERENSI
		MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK				
1	Peserta dapat: Memahami Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk dengan baik dan benar	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	1.1. Pengertian Jumlah dan pertumbuhan penduduk 1.2. Jumlah penduduk 1.3. Pertumbuhan penduduk	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Curah Pendapat	1. LCD 2. Laptop 3. Handout	90	1. RH. Pardoko, Kebijakan Kependudukan Nasional, BKKB, Jakarta, 1980 2. Prof Dr. Haryono Suyono, Makalah dan Paper KB dan Kependuduka, BKKB, 2001-2002. 3. Tim Penulis Lembaga Demografi Universitas Indonesia, Dasar-dasar Demografi, Salemba Empat, 2010
2	Memahami konsep Remaja dan Orang Muda dengan baik dan benar	Remaja dan Orang Muda	2.1. Pengertian Remaja 2.2. Orang Muda di Indonesia	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Curah Pendapat	1. LCD 2. Flip Chart	90	
3	Memahami konsep Penduduk Usia Produktif dengan baik dan benar	Penduduk Usia Produktif	3.1 Pengertian Penduduk Usia produktif 3.2 Permasalahan	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya Jawab 3. Latihan soal	1. LCD 2. Flip Chart	45	
4.	Memahami konsep	Penduduk	4.1 Pengertian	1. Ceramah	1. LCD	45	

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK		METODE	MEDIA	ESTIMASI WAKTU (Jampel)	REFERENSI
		MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK				
	Penduduk Lanjut Usia dengan baik dan benar	Lanjut Usia	penduduk lanjut usia 4.2 Permasalahan lansia	Interaktif	2. Flip Chard		
5.	Memahami konsep Urbanisasi dan Perkotaan dengan baik dan benar	Urbanisasi dan Perkotaan	5.1 Urbanisasi 5.2 Kepadatan Penduduk di Perkotaan	1 Ceramah Interaktif	1. LCD 2. Flip Chard	45	
Jumlah							270

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT (RBPMD)

1	Nama Diklat	:	Diklat Teknis Kependudukan dan KB bagi ASN
2	Mata Diklat	:	Karakter Kebangsaan
3	Alokasi waktu (menit)	:	6 JP (270 Menit)
4	Deskripsi singkat	:	Mata Diklat ini membahas tentang Revolusi Mental, Kewarganegaraan serta penduduk Usia Produktif dan Bela Negara
5	Tujuan Pembelajaran		
	c. Hasil belajar	:	Peserta diharapkan mampu menguraikan Karakter Kebangsaan
	d. Indikator hasil belajar	:	

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK		METODE	MEDIA	ESTIMASI WAKTU (Jampel)	REFERENSI
		MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK				
1	Peserta dapat: Memahami konsep Revolusi Mental dengan baik dan benar	Revolusi Mental	2.1 Pengertian revolusi menta 2.2 Penerapan revolusi mental	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Curah Pendapat	1. LCD 2. Laptop 3. Handout	90	BKKBN. <i>Revolusi Mental berbasis Keluarga. 2016</i>
2	Memahami konsep Revolusi Mental dengan baik dan benar	Revolusi Mental Berdasarkan Pancasila dan Prioritasnya	2.1 Pengertian Revolusi Mental 2.2 Prioritas Revolusi Mental	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Curah Pendapat	1. LCD 2. Flip Chart	90	
3	Memahami konsep Kewarganegaraan dan Bela Negara dengan baik dan benar	Kewarganegaraan dan bela Negara	1.1 Pengertian Kewarganegaraan 1.2 Permasalahan Bela Negara	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya Jawab 3. Latihan soal	1. LCD 2. Flip Chart	90	
Jumlah						270	

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN MATA DIKLAT (RBPMD)

- 1 Nama Diklat : Diklat Teknis Kependudukan dan KB bagi ASN
- 2 Mata Diklat : Isu Kependudukan Masyarakat Ekonomi ASEAN
- 3 Alokasi waktu (menit) : 6 JP (270 Menit)
- 4 Deskripsi singkat : Mata Diklat ini membahas tentang terbentuknya ASEAN, perjanjian Kerjasama ASEAN, batasan MEA, ciri-ciri dan unsur MEA, menghadapi isu kependudukan MEA
- 5 Tujuan Pembelajaran
 - a. Hasil belajar : Peserta diharapkan mampu menguraikan Isu Kependudukan MEA
 - b. Indikator hasil belajar :

NO	INDIKATOR HASIL BELAJAR	MATERI POKOK		METODE	MEDIA	ESTIMASI WAKTU (Jampel)	REFERENSI
		MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK				
1	Peserta dapat: Memahami terbentuknya ASEAN dengan baik dan benar	Pembentukan ASEAN	1.1 Pengertian pembentukan ASEAN 1.2 Perjanjian ASEAN	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Curah Pendapat	1. LCD 2. Laptop 3. Handout	90	BKKBN. Revolusi Mental berbasis Keluarga. 2016
2	Memahami konsep Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan baik dan benar	Batasan MEA dan ciri-ciri serta unsur MEA	2.1. Pengertian MEA 2.2. Ciri-ciri MEA 2.3. Unsur MEA	1. Ceramah Interaktif 2. Tanya jawab 3. Curah Pendapat	1. LCD 2. Flip Chart	90	
3	Memahami isu kependudukan MEA dengan baik dan benar	Isu kependudukan MEA	1.3 Pengertian isu kependudukan MEA 1.4 Cara mengatasi isu kependudukan MEA	1 Ceramah Interaktif 2 Tanya Jawab 3 Latihan soal	1. LCD 2. Flip Chart	90	

Copyright@ 2017

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan